

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA. 2025

SEKRETARIAT

SEKRETARIS

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN



SUSIWIJONO

KATA SAMBUTAN

**ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.**

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah serta sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat atas anggaran yang dimanahkan dan kinerja yang sudah dicapai.

Dari sisi capaian kinerja, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Tahun 2025 sebesar 106,67%. Capaian ini sejalan dengan nilai persentase realisasi penyerapan anggaran mencapai 97,81%. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mampu mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki dua tujuan yakni Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas; dan Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian.

Beberapa capaian Sekretariat pada tujuan Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Akuntabel Dan Didukung Oleh SDM Yang Profesional Dan Berintegritas di antaranya : Nilai Reformasi Birokrasi General dan Nilai Reformasi Birokrasi Tematik yang diproyeksikan meningkat dibandingkan dengan tahun lalu dengan capaian sebesar 100% dari target. Beberapa capaian tujuan yang kedua Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian diantaranya : Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan; Tingkat Input Material Sirkular; dan Pengeluaran Per kapita laki – laki dan Perempuan dengan capaian sebesar 100% dari target.

Sekretariat Kementerian akan terus berkomitmen untuk membangun tata kelola pemerintah dan budaya kerja yang efektif. Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan dijadikan dasar dalam menyusun kinerja dan langkah perbaikan di tahun mendatang.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

JAKARTA, FEBRUARI 2026
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

SUSIWIJONO

CAPAIAN KINERJA 2025 PENILAIAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN

WTP

Sebagai bentuk komitmen tinggi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2025, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan penyusunan laporan keuangan dengan nilai opini WTP dari BPK. Sepanjang tahun 2008 – 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memperoleh 17x WTP berturut-turut.

WAJAR TANPA PENGECUALIAN

17X

HASIL INDEKS KEPUASAN LAYANAN SEKRETARIAT TA. 2025

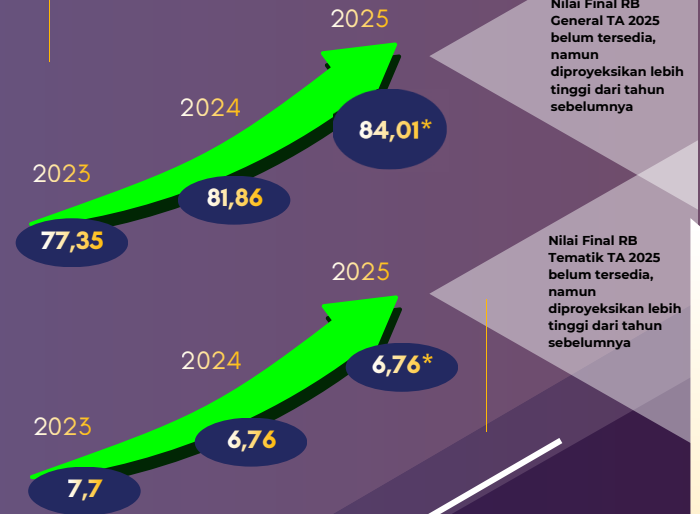
Sebagai bentuk komitmen tinggi dan pertanggungjawaban atas Layanan Sekretariat. Maka disusunlah laporan Survey Kepuasan Layanan Sekretariat 2025. Sepanjang TA 2021 - 2025, Kemenko Perekonomian telah memperoleh 5x kategori Sangat Puas.

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat TA. 2025 adalah 4 dari 4 atau Sangat Puas yang merupakan Rata-rata dari Seluruh Layanan,

4
SANGAT
PUAS

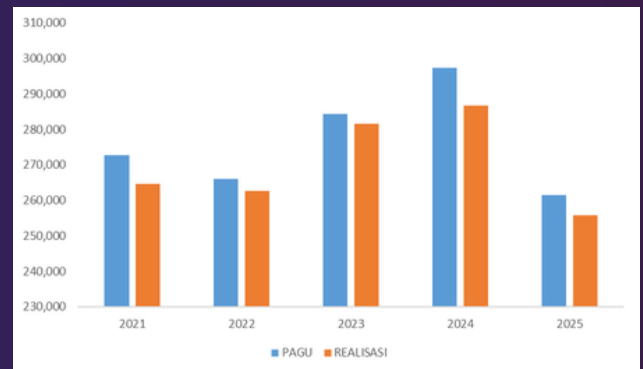
CAPAIAN KINERJA

NILAI REFORMASI BIROKRASI TA. 2023 - 2025



PERKEMBANGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT TA. 2025

Hasil Capaian Penyerapan Anggaran TA. 2025 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Berada pada Kategori “Sangat Baik” Karena Berada Pada Range :



Capaian Penyerapan 2025 adalah 97.81%

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT KEMENKO PEREKONOMIAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN IKU	% CAPAIAN NSS
Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing	Indeks Reformasi Birokrasi General	84,01	84,01*	100%	100%
	Indeks Reformasi Birokrasi Tematik	6,76	6,76*	100%	
Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	Tingkat Input Material Sirkular	9,2	9,2*	100%	100%
	Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan	L : 16.891; P : 9.920	L : 16.891*; P : 9.920*	100%	
Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%
Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Sesuai dengan Standar Nasional	Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	3 dari 4	4 dari 4	120%	120%
Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat	85%	103%	120%	120%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					106,67%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja TA. 2025, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun 2025 adalah sebesar 106,67%, dengan kategori "Memenuhi Ekspektasi".

Pada Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Secara garis besar, pencapaian yang diraih Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memenuhi ekspektasi, hal ini terlihat dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Tahun 2025 sebesar 106,67%.

PERISTIWA PENTING TAHUN 2025 SEKRETARIAT KEMENKO PEREKONOMIAN

PERISTIWA PENTING



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI kembali meraih penghargaan sebagai Kementerian Berpredikat Unggul dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award tahun 2025 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian peroleh Opini WTP 17 kali berturut-turut.



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta para pejabat Es. I dan II melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian raih predikat badan publik informatif untuk enam tahun berturut-turut.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Organisasi dan Fungsi	2
1.3 Mandat dan Peran Strategis	6
1.4 Sistematika Pelaporan	13

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Sekretariat 2025–2029	14
2.2 Prioritas Nasional Tahun 2025	17
2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat 2025	18
2.4 Perjanjian Kinerja Sekretariat 2025	24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja	28
3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2025	32
3.3 Akuntabilitas Keuangan	71

BAB IV EVALUASI KINERJA

4.1 Evaluasi atas Perencanaan Kinerja	83
4.2 Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Inspektorat	89
4.3 Rencana Aksi Peningkatan Kinerja	94

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Lampiran Dokumen Pendukung	95
---	----

DAFTAR TABEL

2.1 Sasaran Strategis IKU Sekretariat Kemenko Perekonomian 2025–2029	16
2.2 Rencana Kerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2025	19
2.3 Rencana Kerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Tahun 2025	19
2.4 Rencana Kerja Biro KLIP Tahun 2025	20
2.5 Rencana Kerja Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Tahun 2025	21
2.6 Rencana Kerja Inspektorat	21
2.6 Rencana Kerja Staf Ahli Tahun 2025	22
2.7 Rencana Kerja Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi	23
2.8 Rencana Kerja Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi Tahun 2025	23
2.9 Rencana Kerja Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja Tahun 2025	23
3.1 NKO PK Sekretariat Kemenko Perekonomian TA 2025	32
3.2 SP Terwujudnya Birokrasi Kemenko Perekonomian yang Berdaya Saing	33
3.3 IKU Nilai RB General 2025	35
3.4 Capaian Indikator RB General	36
3.5 Perubahan Tema pada Komponen di RB Tematik	41
3.6 Indikator Penilaian Rencana Aksi Tematik Kemenpan RB	41
3.7 IKU Nilai RB Tematik 2025	41
3.8 SP Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	44
3.9 IKU Tingkat Input Material Sirkular 2025	45
3.10 IKU Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan	49
3.11 Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	52
3.12 Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan	53
3.13 SP Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	58
3.14 Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	59
3.15 SP Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas	63
3.16 IKU Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat 2025	65
3.17 SP Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kemenko Perekonomian yang Baik	69
3.18 IKU Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat 2025	69
3.19 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja (Output) Kegiatan	72
3.20 Pagu Anggaran dan Realisasi Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi	73
3.21 Pagu Anggaran dan Realisasi Peningkatan Pelayanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	74
3.22 Pagu Anggaran dan Realisasi Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan	74

DAFTAR TABEL

3.23 Pagu Anggaran dan Realisasi Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Umum	75
3.24 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengawasan Inspektorat	75
3.25 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian	75
3.26 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kebijakan Pemerataan Ekonomi	76
3.27 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi	76
3.28 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kebijakan Cipta Kerja	76
3.29 Realisasi dan Capaian Kinerja	77
3.30 Kategori Nilai Kinerja Anggaran	81
4.1 Target Kinerja Rencana Strategis Tahun 2025–2029	84
4.2 Target Kinerja pada Renja dan PK 2025	85
4.3 Pengelompokan Sasaran Program Renstra dan Perjanjian Kinerja 2025	86
4.4 Perbandingan Capaian antara Target Renstra dan Realisasi Kinerja	87
4.5 Perjanjian Kinerja Sekretaris Kemenko Perekonomian 2026	89
4.6 Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat 2025	90
4.7 Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja	91
4.8 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Perencanaan Kinerja	91
4.9 Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja	93
4.10 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pengukuran Kinerja	93
4.11 Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja	94
4.12 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pelaporan Kinerja	94
4.13 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	94
4.14 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	94

DAFTAR GAMBAR

1.1 Siklus Kegiatan Kinerja 2025	1
1.2 Struktur Sekretariat Kemenko Perekonomian	2
1.3 Agenda Pembangunan	8
2.1 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025	17
2.2 Program Prioritas Nasional	17
2.3 Dukungan Sekretariat terhadap Prioritas Nasional	18
3.1 Proses Perhitungan NKO	28
3.2 Nilai SMART Menko Bidang Perekonomian Tahun 2024	81

DAFTAR BAGAN

1.1 Sistematika Pelaporan	13
3.1 Proses Perhitungan NKO	30



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

#untuk ekonomi Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

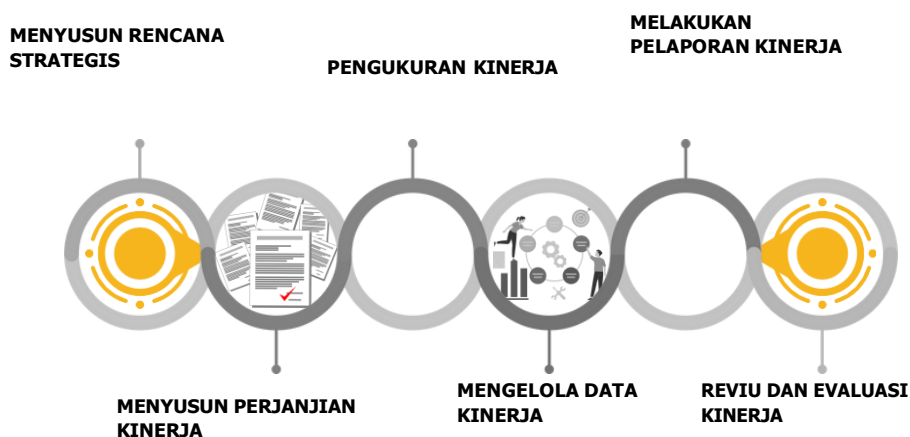
- LATAR BELAKANG
- TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- MANDAT DAN PERAN STRATEGIS
- SISTEMATIKA LAPORAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2020 mengamanahkan Sekretariat untuk dapat mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan praktik *good governance*, Sekretariat mengawal berbagai indikator kinerja yang berdampak dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Adapun bentuk dari *special mission* ini melalui koordinasi atas kebijakan strategis yang melibatkan lintas antar unit Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, beberapa diantaranya: (1) Koordinasi Kebijakan Ekonomi Syariah; (2) Koordinasi Kebijakan *Indonesia Nation Single Window* (INSW); dan (3) Koordinasi Rekomendasi Tindak Lanjut Putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

Penerapan SAKIP mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dari rangkaian sistematis di atas, tahun 2025 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengimplementasikan berapa kegiatan terkait yakni:



Gambar 1.1 Siklus kegiatan kinerja tahun 2025

Pelaporan kinerja merupakan salah satu siklus SAKIP yang wajib dijalankan oleh seluruh instansi pemerintahan. Kewajibannya ini tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kegiatan pelaporan kinerja tidak hanya dilakukan untuk mendokumentasikan kegiatan yang sudah dilakukan tetapi juga sebagai bahan pertimbangan untuk rangkaian proses selanjutnya. Adapun kegiatan pelaporan yang dimaksud adalah menyusun laporan kinerja tahunan.

Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko Perekonomian Tahun 2025 merupakan salah satu wujud dari penerapan SAKIP di lingkungan Kemenko Perekonomian dalam hal pelaporan kinerja serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama periode Tahun 2025. Disisi lain, manfaat yang diharapkan dari Laporan Kinerja Sekretariat Tahun 2025 adalah:



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas: (1) Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama; (2) Biro Hukum dan Organisasi; (3) Biro Umum dan Sumber Daya Manusia; dan (4) Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan

1.2. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



Gambar 1.2 Struktur Sekretariat Kemenko Perekonomian

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator;
- Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator;
- Pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;
- Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- Pengelolaan data dan informasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA



Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, dan rencana kerja, serta pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran pembangunan nasional, analisis dan harmonisasi kebijakan, pengelolaan data perekonomian, sistem dan teknologi informasi, serta pelaksanaan kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, serta rencana kerja di lingkungan Kementerian Koordinator;
- Pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran pembangunan nasional pada lingkup koordinasi Kementerian Koordinator;
- Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan pengembangan rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian;
- Pelaksanaan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator;
- Pelaksanaan pengelolaan data perekonomian, sistem, dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Koordinator
- Perencanaan, koordinasi, dan administrasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri;
- pelaksanaan dukungan tata usaha dan rumah tangga biro; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

BIRO KOMUNIKASI LAYANAN INFORMASI DAN PERSIDANGAN



HARYO LIMANSETO

*“MEWUJUDKAN TATA KELOLA KOMUNIKASI,
LAYANAN INFORMASI DAN LAYANAN PERSIDANGAN
YANG BAIK”*

PLT. KEPALA BIRO KOMUNIKASI LAYANAN
INFORMASI DAN PERSIDANGAN

Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan manajemen di bidang strategi komunikasi, publikasi, pelaksanaan komunikasi layanan publik, dukungan koordinasi penyiapan, harmonisasi, dan dokumentasi naskah pimpinan, serta penyiapan dan pelaksanaan persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan manajemen strategi komunikasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- Pelaksanaan koordinasi dengan kementerian/lembaga, lembaga masyarakat, media massa, serta pemangku kepentingan lainnya terkait isu koordinasi di bidang perekonomian;
- Pengelolaan publikasi informasi dan kebijakan di bidang perekonomian serta hasil pelaksanaannya dalam bentuk multimedia dan publikasi elektronik lainnya, termasuk laman dan media sosial, serta pemutakhiran informasi dan kebijakan dimaksud;
- Penyiapan dan pengelolaan liputan serta dokumentasi kegiatan di lingkungan Kementerian Koordinator;
- Penyusunan dan penerbitan siaran pers, keterangan pers, tanggapan atau bantahan, artikel, advertorial, serta surat pembaca dan bentuk publikasi lainnya;
- Pelaksanaan pemantauan dan penelaahan pemberitaan terkait isu di bidang perekonomian;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah pimpinan yang meliputi penyiapan data dukung, penyusunan konsep, harmonisasi naskah, serta penatausahaan dan digitalisasi naskah pimpinan Kementerian Koordinator;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi persidangan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi yang mencakup penyiapan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pengelolaan digitalisasi dokumen, serta penyusunan dan distribusi risalah rapat koordinasi tingkat menteri, rapat kelompok kerja, forum koordinasi, dan rapat pimpinan Kementerian Koordinator;
- Pelaksanaan dukungan tata usaha dan rumah tangga biro; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI



Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan serta evaluasi peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, pemberian advokasi hukum, penelaahan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas diatas, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan koordinasi perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Koordinator;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, serta pendapat hukum atas kebijakan di bidang perekonomian;
- Pelaksanaan analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja sama di bidang perekonomian;
- Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator;
- Pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator;
- Pelaksanaan pengelolaan penataan organisasi dan tata laksana yang meliputi koordinasi, analisis, dan evaluasi struktur organisasi, perencanaan kebutuhan pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, proses bisnis, mekanisme kerja, serta standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Koordinator;
- Pelaksanaan pengelolaan reformasi birokrasi yang meliputi koordinasi, analisis, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- Pelaksanaan dukungan tata usaha dan rumah tangga biro; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI



Biro Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan manajemen sumber daya manusia, ketatausahaan, keuangan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan manajemen sumber daya manusia;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Pengelolaan barang milik negara;
- Pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- Pengelolaan kearsipan;
- Pelaksanaan urusan keprotokolan;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan;
- Pengelolaan layanan kesehatan;
- Pelaksanaan dukungan tata usaha dan rumah tangga biro; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Kementerian Koordinator.

1.3. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis nasional yang memuat visi, misi, serta program Presiden terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 merupakan tahapan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045, yang memiliki sasaran untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. RPJMN 2025- 2029 sebagai tahap pertama implementasi RPJPN tahun 2025-2049. RPJMN tahun 2025-2029 berfokus pada penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Visi Presiden pada RPJMN tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 yang merupakan terjemahan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Presiden-Wakil Presiden periode 2025 – 2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Mengacu pada visi tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan dengan visi Kementerian sebagai berikut :

***“Terwujudnya Perekonomian yang Maju melalui
Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju
Indonesia Emas 2045.”***

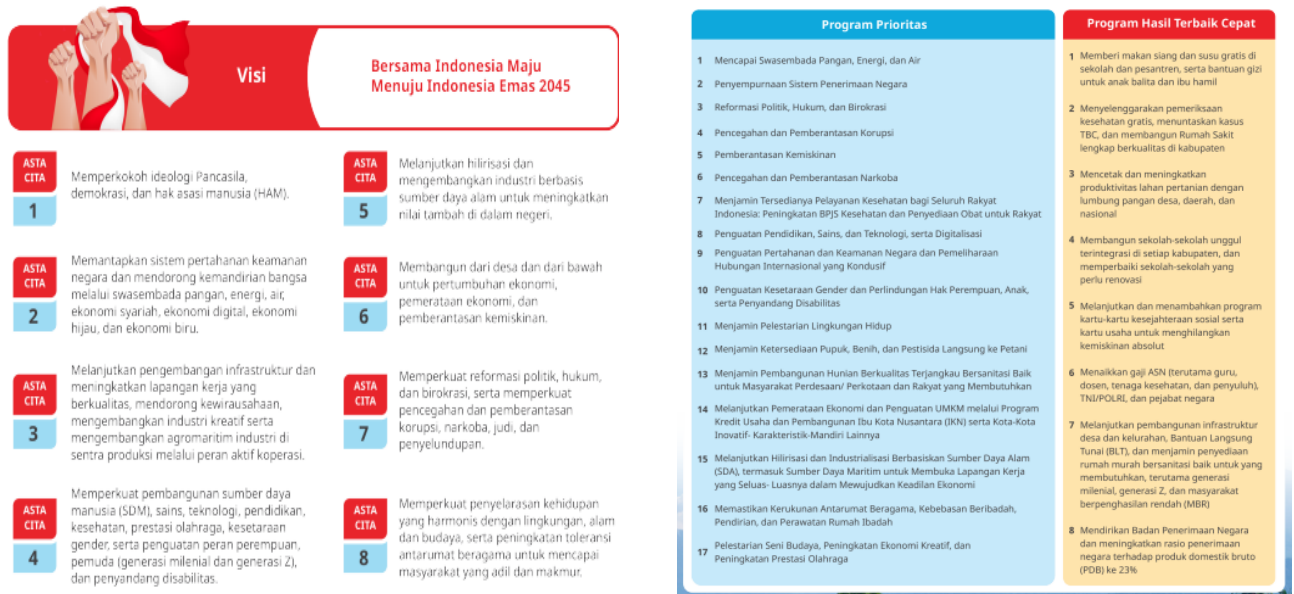
Dalam mencapai visi, maka diciptakan beberapa misi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam rangka mendukung pencapaian seluruh Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan memenuhi kebutuhan permintaan/tuntutan masyarakat terkait penyelenggaraan *good governance*, maka visi dari Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah :

***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik dalam Sinkronisasi,
Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang
Berkualitas”***

Misi ini akan diwujudkan melalui beberapa 7 (tujuh) kegiatan, yaitu :

- ❖ Menerapkan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.
- ❖ Menyusun rekomendasi strategis untuk mendukung proses pengambilan kebijakan.
- ❖ Mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.
- ❖ Mengimplementasikan strategi komunikasi publik yang adaptif sesuai dengan kebutuhan publik dan organisasi.
- ❖ Menyediakan layanan manajemen yang terintegrasi.
- ❖ Menyediakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pendukung (enabler) proses bisnis organisasi.
- ❖ Mengembangkan pengelolaan BMN yang akuntabel serta mampu memenuhi kebutuhan organisasi.

Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama dalam penyusunan RPJMN 2025–2029, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) Agenda Pembangunan.



Gambar 1.3 Agenda Pembangunan
Sumber : RPJMN 2025–2029

Dari ke-8 (delapan) Agenda Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung lima Agenda Pembangunan yang terdiri dari:

- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (**Agenda Pembangunan Ke-2**).
- Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi (**Agenda Pembangunan Ke- 3**)
- Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas (**Agenda Pembangunan Ke-4**)
- Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (**Agenda Pembangunan Ke-5**)
- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (**Agenda Pembangunan Ke-7**)

Dari ke-5 (lima) Agenda Pembangunan yang didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada RPJMN 2025-2029, Sekretariat Kementerian Bidang Perekonomian berkontribusi pada Agenda Pembangunan ke-2, ke-3, ke-4 dan Ke-5. Dapat diuraikan sebagai berikut :

Agenda Pembangunan ke-2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kontribusi dari Sekretariat dalam mendukung PN ini melalui program/kegiatan :

- **Pengembangan Ekonomi Syariah**

Dalam kerangka RPJMN Tahun 2025-2029, Ekonomi Syariah dibangun sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan 5 pilar strategi utama, yaitu:

- **Pilar 1** : Penguatan industri halal dan UMKM halal, meliputi hulusinasi bahan baku halal, hilirisasi dan industrialisasi, pariwisata ramah muslim dan ekonomi kreatif, sistem ketelusuran halal terintegrasi.
- **Pilar 2** : Penguatan ekspor halal & kerja sama ekonomi syariah internasional, meliputi produk halal andalan ekspor, akses pasar ekspor produk halal ke NTE prioritas, kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem haji dan umroh.
- **Pilar 3** : Penguatan keuangan syariah, meliputi struktur dan ketahanan industri, karakteristik/ ke-khasan keuangan syariah, peran keuangan syariah dalam ekosistem syariah, peran keuangan syariah dalam perekonomian nasional, modernisasi koperasi syariah sektor produksi dan keuangan mikro.
- **Pilar 4** : Penguatan dana sosial syariah meliputi tata kelola institusi pengelola zakat wakaf, afirmasi pemerintah, peran zakat wakaf dalam perlindungan sosial, peran zakat wakaf dalam ekosistem syaria
- **Pilar 5** : Penguatan ekosistem pendukung meliputi, lptek inovasi 4.0 SDM unggul berbasis nilai syariah, layanan digital data ekonomi syariah dan PDB syariah, regulasi dan kelembagaan ekonomi syariah, inklusi, literasi, promosi, dan branding ekonomi syariah, akselerasi sertifikasi halal, kemitraan rantai nilai UMK-UMB.

- **Tingkat Input Sirkular**

PP Ekosistem Ekonomi Sirkular dengan indikator Tingkat Input Material Sirkular yang diampu oleh Kemenko Perekonomian mendukung Prioritas Nasional 2 Sasaran 06 yaitu Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau dalam RPJMN 2025- 2029. Kementerian PPN/BAPPENAS telah menyusun Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN-ES) Indonesia 2025-2045 sebagai panduan implementasi PP ini. Dalam RAN-ES tersebut dijelaskan bahwa Ekonomi Sirkular merupakan model ekonomi yang menerapkan pendekatan sistemik untuk meminimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai.

Berdasarkan RPJMN 2025 - 2029, proyek prioritas yang menjadi kawalan Kementerian Perekonomian dalam menkoordinasikan kebijakan pada sektor Material Sirkular adalah

- Pengembangan kebijakan, teknologi dan fasilitasi pengelolaan sampah dengan prinsip sirkular
- Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Nikel Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Tembaga Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Bauksit Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Timah Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Kimia

Ruang Lingkup Kebijakan Penerapan ekonomi sirkular di Indonesia diarahkan pada 3 (tiga) kebijakan utama, yaitu (a) pengurangan penggunaan sumber daya, (b) perpanjangan daya guna produk dan material, dan (c) peningkatan daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi. Arah kebijakan ekonomi sirkular tersebut menjadi acuan dalam dalam perancangan strategi transisi serta menentukan aksi dan implementasi.

Agenda Pembangunan ke-3, yaitu melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi. Kontribusi dari Sekretariat dalam mendukung PN ini melalui program/kegiatan :

- Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP)

Menjawab tantangan gejolak perekonomian global, pelambatan pertumbuhan ekonomi, pelemahan daya beli dan meningkatnya jumlah pengangguran, pada tahun 2025 Pemerintah meluncurkan Program Paket Kebijakan Ekonomi (8+4+5) yang mencakup:

- 8 Program Akselerasi 2025, yaitu: (1) magang lulusan perguruan tinggi, (2) PPh 21 DTP sektor pariwisata, (3) bantuan pangan, (4) diskon iuran JKK/JKM bagi pekerja transportasi informal, (5) manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan, (6) padat karya tunai, (7) deregulasi PP 28/2025, serta (8) program perkotaan.
- 4 Program Lanjutan ke 2026, yaitu: perpanjangan insentif perpajakan (PPh Final UMKM, PPh 21 DTP sektor pariwisata dan padat karya, diskon iuran JKK/JKM).
- 5 Program Penyerapan Tenaga Kerja, yaitu: operasionalisasi Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP), replanting perkebunan rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih

Ruang lingkup tugas utama Satgas adalah sebagai berikut:

- Akselerasi implementasi Program Prioritas melalui Monitoring Penyerapan anggaran,
- Evaluasi Pelaksanaan Program dan
- Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor

Agenda Pembangunan ke-4, yaitu memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. Kontribusi dari Sekretariat dalam mendukung PN ini melalui program/kegiatan :

- Undang-Undang Cipta Kerja

Kelas menengah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, kelas menengah yang mencakup aspiring middle class & middle class mencapai 72,20 persen dari total penduduk dan berkontribusi pada 82,30 persen konsumsi rumah tangga nasional. Pada RPJMN 2025 – 2029, proporsi penduduk kelas menengah (middle class) ditargetkan meningkat dari 17,50 persen pada 2025 menjadi 20 persen pada 2029. Dalam rangka penciptaan lapangan kerja berkualitas untuk menjawab tantangan middle-income trap dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kelas menengah, pemerintah menginisiasi kebijakan cipta kerja.

Kebijakan ini telah diterjemahkan dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Dalam implementasinya, pemerintah dapat merumuskan dan menerbitkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas khususnya yang berkaitan dengan UU 6/2023 dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaan dari UU 6/2023 yang telah diundangkan saat ini sebanyak 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Revisi dan perbaikan peraturan pelaksanaan masih dilakukan secara bertahap dan simultan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai perwakilan pemerintah dalam mengkoordinasikan kebijakan cipta kerja, berperan dalam melakukan kegiatan sosialisasi, pemantauan, peninjauan terkait UU 6/2023 dan peraturan pelaksanaannya dalam rangka implementasi peraturan di masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri agar diketahui dan dipahami dengan baik oleh semua pihak dan stakeholder terkait.

Berkaitan dengan pengesahan UU 6/2023, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga berperan dalam mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permintaan *Judicial Review*—baik gugatan yang bersifat formil maupun materiil.

- Pendapatan Perkapita Laki-Laki dan Perempuan

Salah satu indikator RPJMN 2025–2029 adalah Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP), yang diampu oleh Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian. PPLP tercantum dalam Prioritas Nasional 4, Program Prioritas ke- 19, dan menjadi indikator ke-6 yang mencerminkan capaian kesejahteraan berbasis gender. Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan merupakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan jenis kelamin kepala rumah tangga (L/P) yang dihitung berdasarkan paritas daya beli dengan mempertimbangkan perbedaan harga antar daerah dan pembobotan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki maupun perempuan

Agenda Pembangunan ke-5, yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah didalam Negeri. Kontribusi dari Sekretariat dalam mendukung PN ini melalui program/kegiatan

- *Indonesia National Single Window (INSW)*

Indonesia National Single Window mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi layanan publik di bidang ekspor dan/atau impor diperlukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga yang dilakukan oleh dewan pengarah dengan melibatkan 17 K/L. Isu strategis yang akan menjadi prioritas koordinasi adalah:

- *Service Level Agreement*;
- Optimalisasi Unit Layanan *Single Window*;
- Tata Kelola Data dan Informasi di SINSW;
- Harmonisasi Kode Pelabuhan.

1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- Mandat dan Peran
- Sistematika Laporan

BAB II : PERENCANAAN

- Perencanaan Strategis
- Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Tahun 2025
- Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- Pengukuran Kinerja
- Analisis Capaian Kinerja
- Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : EVALUASI KINERJA

- Evaluasi Perencanaan Kinerja
- Tindaklanjut atas Evaluasi SAKIP Inspektorat
- Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Lampiran



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II

PERENCANAAN

- RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT 2025-2029
- PRIORITAS NASIONAL
- RENCANA KERJA TAHUN 2025
- PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT TAHUN 2025

2.1. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT 2025-2029

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, serta program Kementerian, sekaligus berkontribusi terhadap target RPJMN 2025–2029 dan Visi Indonesia Emas 2045. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Renstra Sekretariat Kementerian tahun 2025–2029 memuat rumusan visi, yaitu:

“ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas “

dalam mendukung capaian visi Sekretariat Kementerian dan memenuhi kebutuhan serta tuntutan masyarakat terkait penyelenggaraan *good governance*, misi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah : “

“ Mewujudkan Tata Kelola dan Dukungan Manajemen dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas Adaptif dan Akuntabel

Misi ini akan diwujudkan melalui:

- Menerapkan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.
- Menyediakan rekomendasi-rekomendasi strategis untuk mendukung proses pengambilan kebijakan.
- Mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.
- Menerapkan strategi komunikasi publik yang adaptif sesuai dengan tuntutan publik dan organisasi.
- Menyediakan layanan manajemen yang terintegrasi.
- Menyediakan TIK yang mampu menjadi enabler proses bisnis organisasi.
- Mengembangkan pengelolaan BMN yang akuntabel dan mampu memenuhi kebutuhan.

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian memiliki 2 (dua) tujuan strategis, yaitu :

1

Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian

2

Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki 5 (lima) sasaran strategis, yang dijabarkan ke 13 (tiga belas) indikator kinerja utama. Target kinerja dari Sekretariat Kementerian dari tahun 2025 - 2029 dapat diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian							
1	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	100	100
2	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas	a. Tingkat Input Material Sirkular (%)	9,2	9,4	9,6	9,8	10
		b. Pengeluaran Per kapita laki – laki dan Perempuan	L; 16.89 1 P; 9.920	L: 17.13 8; P: 10.08 6	L: 17.38 8; P: 10.25 6	L: 17.64 1; P: 10.42 8	L: 17.89 9; P: 10.60 3
Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas							
3	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing	a. Nilai Reformasi Birokrasi General	83,95	84,2	84,7	85,1	85,6
		b. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	6,78	6,82	6,86	6,89	6,78



4	Terwujudnya pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	
5	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai	a. Tingkat Maturitas SPIP	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	
		b. Tindak lanjut Rekomendasi BPK	75	75	75	75	75	
		c. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
		d. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		e. Survei Penilaian Integritas (SPI)	82	82	82	82	82	
		f. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	3	3	3	3	3	
		g. Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	

TABEL 2.1 Sasaran Strategis IKU Sekretariat Kemenko Perekonomian 2025 s.d 2029

2.2. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

Rencana Kerja Pemerintah 2025 merupakan perencanaan tahunan dimasa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, dan hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya, isu strategis dan FKP, maka ditetapkan tema RKP tahun 2025 adalah “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”

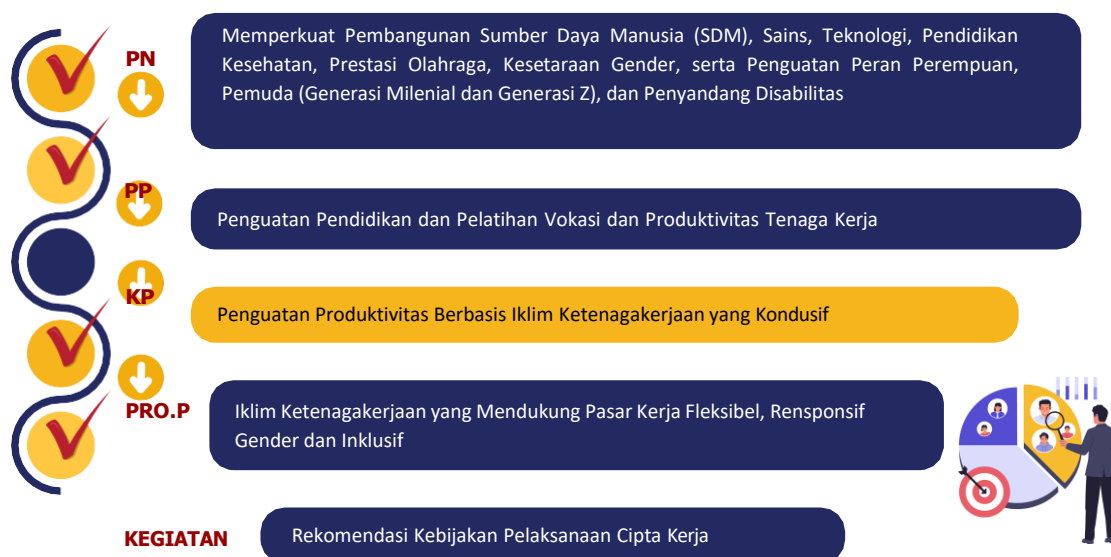


Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

PRIORITAS NASIONAL 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PRIORITAS NASIONAL 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
PRIORITAS NASIONAL 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	PRIORITAS NASIONAL 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
PRIORITAS NASIONAL 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PRIORITAS NASIONAL 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
PRIORITAS NASIONAL 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.	PRIORITAS NASIONAL 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari 8 (delapan) Agenda Prioritas Nasional, 4 (empat) diantaranya masuk ke dalam Rencana Kerja Sekretariat tahun 2025 yaitu PN ke-2, PN ke-3, PN ke-4, dan PN ke-5.

Pada PN Ke-4, yaitu memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas yang terdapat pada unit kerja Biro Hukum dan Organisasi melalui kegiatan Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja. Secara umum, dukungan Sekretariat Kementerian terhadap prioritas nasional digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Dukungan Sekretariat Terhadap Prioritas Nasional

2.3. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT 2025

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki kewajiban untuk dapat mendorong pencapaian seluruh tujuan strategis Kementerian. Tujuan strategis Kementerian ini selanjutnya dijabarkan ke dalam 2 (dua) tujuan Sekretaris kementerian yakni:

- Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian
- Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas

Pada awal tahun 2025, Sekretariat telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk mewujudkan dua tujuan organisasi tersebut. Adapun rencana kerja dan anggaran Sekretariat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1

Rencana Kerja terkait tujuan Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas, yaitu :

RENCANA KERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2025

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025
<i>Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Hukum dan Organisasi</i>		1,897,237,000
<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	3 Layanan	1,406,566,000
Layanan Hukum I	1 Layanan	503,446,000
Layanan Hukum II	1 Layanan	433,975,000
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	469,145,000
<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	1 Dokumen	490,671,000
Layanan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	490,671,000

Tabel 2.2 Rencana Kerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2025

Adapun Indikator kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini dan alokasi kegiatan yang tertulis diatas adalah sebagai berikut :

- Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
- Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
- Tingkat Capaian Sistem Kerja
- Indeks Reformasi Hukum
- Persentase Penyelesaian Dokumen Koordinasi Perumusan Produk Hukum
- Persentase Penyelesaian Dokumen Advokasi Hukum
- Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Organisasi
- Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Sistem Kerja
- Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi Tematik
- Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi General

RENCANA KERJA BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA TAHUN 2025

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025
<i>Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama</i>		12,926,769,000
<i>Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan</i>	4 Rekomendasi Kebijakan	546,060,000
Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Perekonomian	4 Rekomendasi Kebijakan	546,060,000
<i>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2 Unit	8,561,085,000
Layanan Sarana Sistem Informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2 Unit	8,561,085,000

Tabel 2.3 Rencana Kerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Tahun 2025

Adapun Indikator kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini dan alokasi kegiatan yang tertulis diatas adalah sebagai berikut :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Indeks Kualitas Kebijakan
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Indeks Pemerintah Digital
- Indeks Perencanaan
- Capaian Prioritas Nasional
- Capaian Indikator Kinerja Utama

RENCANA KERJA BIRO KOMUNIKASI, LAYANAN INFORMASI DAN PERSIDANGAN TAHUN 2025

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025
<i>Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama</i>		12,926,769,000
<i>Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan</i>	4 Rekomendasi Kebijakan	546,060,000
Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Perekonomian	4 Rekomendasi Kebijakan	546,060,000
<i>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2 Unit	8,561,085,000
Layanan Sarana Sistem Informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2 Unit	8,561,085,000

Tabel 2.4 Rencana Kerja Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan Tahun 2025

Adapun Indikator kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini dan alokasi kegiatan yang tertulis diatas adalah sebagai berikut :

- Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kemenko Bidang Perekonomian di Media Massa
- Persentase Penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi Tepat Waktu
- Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang terselesaikan Tepat Waktu
- Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan
- Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu
- Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan
- Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan

RENCANA KERJA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025
<i>Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia</i>		217,491,618,000
<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	4 Layanan	210,702,256,000
Layanan Protokoler	1 Layanan	1,199,931,000
Layanan Umum	1 Layanan	2.367.760.000
Layanan Perkantoran	2 Layanan	208,871,522,000
<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>	37 Paket	4,784,980,000
Layanan Sarana Internal	37 Paket	4,784,980,000
<i>Layanan Manajemen SDM Internal</i>	750 Orang	1,636,546,000
Layanan Manajemen SDM	750 Orang	1,636,546,000
<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	1 Dokumen	367,836,000
Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	367,836,000

Tabel 2.5 Rencana Kerja Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

Adapun Indikator kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini dan alokasi kegiatan yang tertulis diatas adalah sebagai berikut:

- Indeks Penyelenggaraan Arsip
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- Indeks Pengelolaan Aset
- Indeks NSPK Manajemen ASN
- Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa

RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2025

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025
<i>Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai</i>		891,453,000
<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	10 Dokumen	891,453,000
Layanan Audit Internal	10 Dokumen	891,453,000

Tabel 2.5 Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025

Adapun Indikator kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini dan alokasi kegiatan yang tertulis diatas adalah sebagai berikut:

- Tingkat Maturitas SPIP
- Tingkat Keberhasilan Zona Integritas
- Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR
- Opini BPK
- Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
- Persentase Survey Penilaian Integritas (SPI)
- Nilai Kapabilitas APIP (IACM)
- Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
- Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti

2

Rencana Kerja terkait tujuan Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian, yaitu :, yaitu:

RENCANA KERJA STAF AHLI TAHUN 2025

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025
<i>Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis yang Berkualitas</i>		1,696,774,000
<i>Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan</i>	5 Rekomendasi Kebijakan	1,696,774,000
Rekomendasi Kebijakan atas isu-isu strategis di bidang Regulasi, Penegak Hukum, dan Ketahanan Ekonomi	2 Rekomendasi Kebijakan	295,772,000
Rekomendasi Kebijakan atas isu-isu strategis di bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam	2 Rekomendasi Kebijakan	558,351,000
Rekomendasi Kebijakan atas isu-isu strategis di bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia	2 Rekomendasi Kebijakan	24,380,000
Rekomendasi Kebijakan atas isu-isu strategis di bidang Pembangunan Daerah	2 Rekomendasi Kebijakan	510,291,000
Rekomendasi Kebijakan atas isu-isu strategis di bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi	2 Rekomendasi Kebijakan	307,980,000

Tabel 2.6 Rencana Kerja Staf Ahli Tahun 2025

Adapun Indikator kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini dan alokasi kegiatan yang tertulis diatas adalah sebagai berikut :

- Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis di Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi yang diterima Menko Perekonomian
- Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa yang diterima Menko Perekonomian
- Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Transformasi Digital yang diterima Menko Perekonomian
- Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu di Bidang Pembangunan Daerah yang diterima Menko Perekonomian
- Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu di Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang diterima Menko Perekonomian



RENCANA KERJA KOORDINASI PERCEPATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI TAHUN 2025

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025
Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas		11,474,225,000
<i>Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan</i>	4 Rekomendasi Kebijakan	11,474,225,000
Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Efektifitas Kebijakan Ekonomi	2 Rekomendasi Kebijakan	4,690,950,000
Rekomendasi Kebijakan Penguatan Hubungan Diplomas Strategis	2 Rekomendasi Kebijakan	6,783,275,000

Tabel 2.7 Rencana Kerja Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Tahun 2025

Adapun Indikator kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini dan alokasi kegiatan yang tertulis diatas adalah sebagai berikut :

- Persentase Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang diterima Sesmenko
- Persentase Pemenuhan Dukungan Kebijakan Penguatan Hubungan Diplomas Strategis

RENCANA KERJA KOORDINASI KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI TAHUN 2025

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025
Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas		7,229,481,000
<i>Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan</i>	4 Rekomendasi Kebijakan	7,229,481,000
Rekomendasi Implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	2 Rekomendasi Kebijakan	7,024,186,000
Rekomendasi Kebijakan Percepatan Implementasi Jaminan Produk Halal	2 Rekomendasi Kebijakan	205,295,000

Tabel 2.8 Rencana Kerja Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi Tahun 2025

Adapun Indikator kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini dan alokasi kegiatan yang tertulis diatas adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Pengeluaran Perkapita laki-laki dan Perempuan
- Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor dalam rangka Pemerataan Ekonomi yang Ditindaklanjuti

RENCANA KERJA KOORDINASI KEBIJAKAN CIPTA KERJA TAHUN 2025

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025
Terwujudnya Dukungan Koordinasi Cipta Kerja yang Efektif		2,343,854,000
<i>Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM</i>	2 Rekomendasi Kebijakan	2,343,854,000
Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	2 Rekomendasi Kebijakan	2,343,854,000

Tabel 2.9 Rencana Kerja Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi Tahun 2025

Adapun Indikator kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini dan alokasi kegiatan yang tertulis diatas adalah sebagai berikut :

- Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut terkait Undang-Undang Cipta Kerja

2.4. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT 2025

Berdasarkan PermenPAN RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan tertentu yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut, terbangun komitmen penerima amanah serta kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur yang harus dicapai berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta didukung oleh sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak hanya terbatas pada hasil kegiatan pada tahun berjalan, tetapi juga mencakup capaian kinerja (outcome) yang merupakan dampak dari pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan tidak hanya mencakup keluaran (output), tetapi juga hasil (outcome) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga tercipta kesinambungan kinerja dari tahun ke tahun. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan komitmen nyata antara pemberi dan penerima amanah dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, serta kinerja aparatur;
2. Menjadi tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Menjadi dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Menjadi dasar bagi pemberi amanah dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Menjadi dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 sedikit berbeda dengan Rencana Strategis yang telah disusun untuk jangka waktu 2025-2029, perbedaan ini dikarenakan adanya penajaman Perjanjian Kinerja yang dilakukan pada saat penyusunannya. Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian 2025, dilengkapi dengan lampiran yang memuat sasaran program, indikator kinerja, dan target kinerja, serta rencana aksi yang disusun dalam dokumen terpisah.

Pada tahun 2025, terdapat beberapa pemutahiran sasaran dan indikator yang ada di Renstra ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat TA 2025, IKU tersebut meliputi:

1. Menurunkan beberapa IKU seperti Tingkat Maturitas SPIP; Tindak lanjut Rekomendasi BPK; Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas; Opini BPK; Survei Penilaian Integritas (SPI); Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR); dan Nilai Kapabilitas APIP (IACM) ke tingkat Eselon II di lingkungan Sekretariat. Hal ini dilakukan karena beberapa IKU tersebut merupakan indeks-indeks dalam RB General yang merupakan IKU Sekretariat juga. Sehingga agar terlihat cascading atas IKU RB General tersebut, maka IKU yang merupakan indeks dalam RB General diturunkan ke tingkat Eselon II.
2. Menambahkan dua sasaran ("Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Sesuai Dengan Standar Nasional" dan "Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik") karena terdapat tambahan beberapa IKU yang akan didetailkan pada poin 3 dan 4 di bawah.

3. Menambahkan IKU Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan sebagai IKU yang bersifat proses bisnis untuk mendukung beberapa IKU yang bersifat outcome.
4. Menambahkan IKU Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat ke dalam PK Sekretariat karena untuk mengukur tingkat RB yang dilaksanakan pada setiap Eselon 1.

Perubahan yang terjadi ini juga didorong oleh evaluasi atas kinerja sebelumnya, yang menjadi masukan atas cascading kinerja agar dapat terlihat pada indikator di setiap level.

Selain penyusunan dan penetapan sasaran dan indikator kinerja, target pada Perjanjian Kinerja Sekretariat pada tahun 2025 juga berbeda dengan target pada Renstra tahun 2025-2029. Hal ini disebabkan karena hasil evaluasi realisasi Perjanjian Kinerja tahun lalu dan penyesuaian dengan kondisi saat ini.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing	1.1	Nilai Reformasi Birokrasi General	84,01
		1.2	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	6,76
2.	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas	2.1	Tingkat Input Material Sirkular	9,2%
		2.2	Pengeluaran Perkapita laki – laki dan Perempuan	Laki-laki 16.891; Perempuan; 9.920
3.	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	3.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan	100%
4.	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan standar Nasional	4.1	Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	100%
5.	Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	3 dari 4
6.	Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat	85%

Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Total

(Tiga Ratus Sebelas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Anggaran

Rp. 262.272.212.000,-
Rp. 48.985.416.000,-

Rp. 311.257.628.000,-

Pihak kedua,

Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian

Airlangga Hartarto

Pihak Pertama,

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

Susi Wijono



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- PENGUKURAN KINERJA
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.1. PENGUKURAN KINERJA

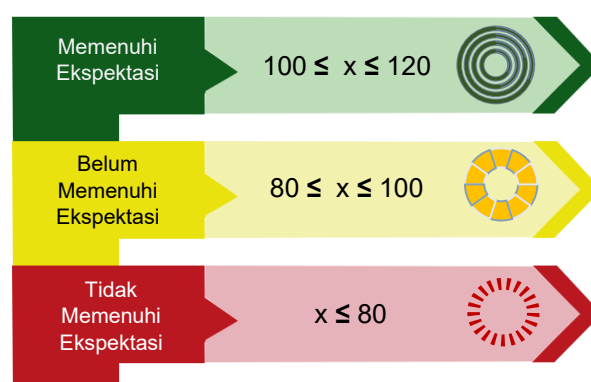
Pada Sub-bab Pengukuran Kinerja ini menjelaskan mengenai pengelolaan dan pengukuran yang meliputi metode pengukuran, polarisasi indikator kinerja program, perhitungan nilai sasaran strategis perhitungan dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

1. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan Kinerja pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi Penetapan Kinerja melalui penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, Pengukuran Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara periodik. Pelaksanaan pengumpulan data, pelaporan dan monitoring atas capaian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan dalam Sistem Manajemen Kinerja secara terintegrasi dan dapat diakses secara luas oleh publik melalui sistem aplikasi ekon-GO (Evaluasi Kinerja Online-Gerai Otomatisasi), di laman situs <https://kinerja.ekon.go.id>. Mekanisme pengelolaan kinerja diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 19 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian.

2. Pengukuran Kinerja Organisasi.

Pengukuran kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan pada awal Tahun, sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025, dilakukan pengukuran terhadap Capaian Kinerja Organisasi atau disebut Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai sasaran strategis dari unit kerja. Status capaian NKO yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh nilai capaian NKO, sebagai berikut :



Gambar 3.1. Proses Perhitungan NKO

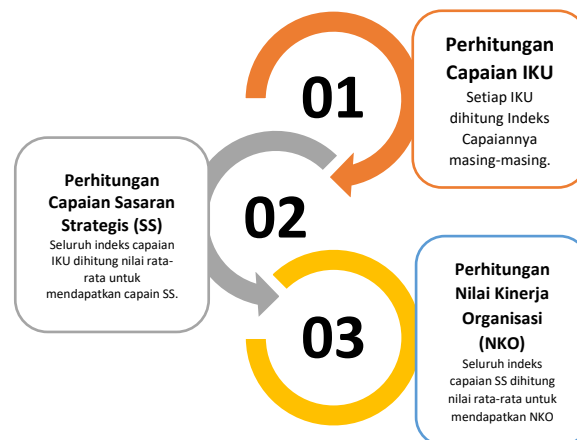
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS). Nilai Sasaran Strategis (NSS) merupakan konsolidasi dari seluruh Capaian IKU dalam sasaran tersebut. NKO digunakan untuk menilai kinerja pada seluruh tingkatan unit kerja. Dengan kata lain, perhitungan NKO mengacu pada nilai Capaian NSS. Capaian NSS dihitung

berdasarkan Capaian IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian, komponen perhitungan NKO terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama;
2. Nilai Sasaran Strategis (NSS);
3. Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Proses penghitungan Nilai Kinerja Organisasi dapat digambarkan dalam tahapan berikut ini :

Bagan 3.1 . Proses Perhitungan NKO



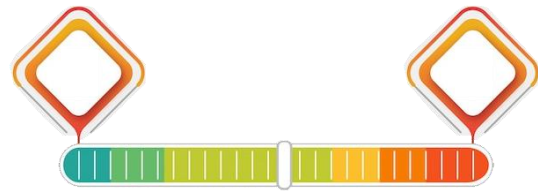
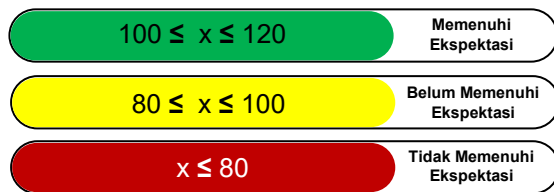
Perhitungan capaian kinerja diawali dengan menghitung capaian IKU yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari realisasi kinerja, sesuai rumusan pada manual IKU masing-masing. Dalam hal pada suatu periode tertentu ternyata belum tersedia data realisasi, maka capaian IKU pada periode tersebut dianggap belum tersedia (N/A), bukan diberikan nilai 0 (nol). Namun, harus disertakan alasan atas kondisi tersebut. Selanjutnya, capaian IKU dilakukan indeksasi capaian IKU, yaitu dengan membandingkan antara realisasi IKU dengan target setelah memperhitungkan polarisasi IKU. Terdapat tiga jenis polarisasi IKU yaitu :

1. Polarisasi *Maximize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target;
2. Polarisasi *Minimize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target; dan
3. Polarisasi *Stabilize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120. Berdasarkan hasil perhitungan capaian IKU tersebut, maka dapat diperoleh konsolidasi dari seluruh IKU dalam ukuran Nilai Sasaran Strategis (NSS). Mekanisme penghitungan NSS adalah dengan menghitung nilai rata-rata Capaian IKU dalam sasaran strategis yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat IKU yang tidak memiliki nilai (N/A), maka IKU tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan NSS. Perhitungan NKO dilakukan berdasarkan konsolidasi seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS) dari sebuah unit organisasi.

3. Formulasi Indeks Capaian IKU

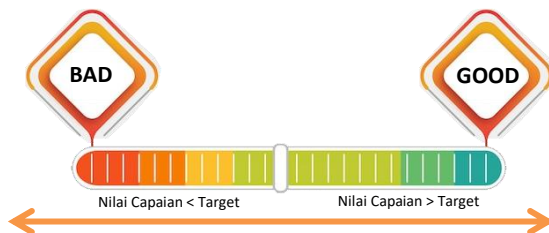
Capaian Indikator Kinerja Utama dihitung dengan membandingkan antara target dengan realisasi. Adapun status Capaian IKU ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:



Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan menjadi 3, yaitu :

(1) Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target. **Contoh** : % Pertumbuhan Ekonomi.



Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dan dihitung dengan formula :

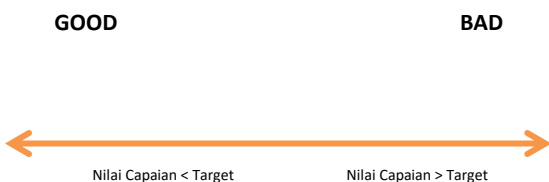
$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan adalah :

$$\left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100$$

(1) Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target. **Contoh** : % Jumlah Temuan



Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU minimize memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan skala konversi sebagai berikut :

Formula yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Realisasi Terburuk} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

(2) Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target atau Semakin Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik. Contoh : Persentase deviasi asumsi makro ekonomi. Formula perhitungan capaian IKU dengan polarisasi stabilize adalah :

Jika *realisasi < lower target*

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Lower Target}}$$

Jika *realisasi > upper target*

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{(2 - (\text{Realisasi} \times 100\%))}{\text{Upper Target}}$$

Jika *lower target ≤ realisasi ≤ upper target* maka capaiannya 100%

4. Penghitungan Nilai Sasaran Strategis

NSS adalah nilai hasil konsolidasi dari rata-rata seluruh IKU di dalam suatu Sasaran Strategis (SS). Pada Tahun 2025, dari 5 (lima) Sasaran Strategis pada Sekretariat Kemenko, seluruh atau 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) bersifat Maximize

5. Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat 2025

Penilaian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan dengan menghitung capaian atas Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja TA 2025, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun 2025 adalah sebesar 106,67%, dengan kategori “Memenuhi Ekspektasi”. Berikut ini adalah table NKO Sekretariat TA. 2025:



3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TA. 2025

TABEL 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Perjanjian Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA. 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	% Capaian IKU	% Capaian NSS
1. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing	1.1. Indeks Reformasi Birokrasi General	84,01	84,01*	100%	100%
	1.2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	6,76	6,76*	100%	
2. Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	2.1. Tingkat Input Material Sirkular	9,2%	9,2%*	100%	100%
	2.2. Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan	Laki-laki 16,891; Perempuan 9,920	Laki-laki 16.891*; Perempuan 9.920*	100%	
3. Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	3.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%
4. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Sesuai dengan Standar Nasional	4.1. Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	100%	100%	100%	100%
5. Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas	5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	3 dari 4	4 dari 4	120%	120%
6. Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	6.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat	85%	103%	120%	120%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					106,67%

Ket: *nilai proyeksi



B.1 CAPAIAN SASARAN PROGRAM TERWUJUDNYA BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING

Nilai Reformasi Birokrasi adalah nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai good governance. Penilaian dilakukan melalui dua fokus, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setiap tahunnya dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

TABEL 3.2 SP Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Berdaya Saing					
Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Kinerja	NSS
Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Berdaya Saing	1.1. Nilai Reformasi Birokrasi General	84,01	84,01*	100%	100%
	1.2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	6,76	6,76*	100%	
	% NSS				Memenuhi ekspektasi

Ket: *nilai proyeksi

Berdasarkan tabel di atas, Sasaran “Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Berdaya Saing” terdiri atas dua indikator yaitu “Nilai Reformasi Birokrasi General” dan “Nilai Reformasi Birokrasi Tematik”. Berdasarkan hasil perhitungan Nilai Sasaran Strategis diperoleh hasil bahwa sasaran strategis “Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Berdaya Saing” memperoleh nilai sebesar 100%.



B. 1.1. Nilai Reformasi Birokrasi General

Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan isu-isu struktural (hulu) yang mencakup penguatan tata kelola organisasi, efektivitas atas proses bisnis, sistem kerja, dan peningkatan layanan publik. Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi General ini berpedoman pada

Permen PAN-RB No. 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Nilai RB General dihitung berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB terhadap capaian pelaksanaan pada indikator Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan. Setiap indikator memiliki bobot dan kriteria penilaian tertentu. Indikator RB General Kemenko Perekonomian terdiri dari 27 Indikator :

1. Rencana Aksi Pembangunan RB General;
2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General;
3. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi;
4. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi;
5. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas;
7. Nilai SAKIP;
8. Indeks Perencanaan Pembangunan;
9. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE;
10. Tingkat Digitalisasi Arsip;
11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
12. Indeks Pengelolaan Aset;
13. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR);
14. Indeks Kualitas Kebijakan Publik;
15. Indeks Reformasi Hukum (IRH);
16. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor;
17. Indeks Tata Kelola Pengadaan;
18. Indeks Sistem Merit;
19. Indeks Pelayanan Publik;
20. Indeks SPBE;
21. Capaian Prioritas Nasional;
22. Capaian Indikator Kinerja Utama;
23. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
24. Tindak lanjut Rekomendasi;
25. Indeks BerAKHLAK;
26. Survei Penilaian Integritas;
27. Survey Kepuasan Masyarakat.

Tujuan dari IKU ini untuk dapat menggambarkan pelaksanaan atas RB General di lingkungan Kemenko Perekonomian dijalankan secara konsisten, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat menjadi alat ukur keberhasilan terhadap tata kelola organisasi.

Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General

No	Reformasi Birokrasi	2023	2024	2025
A.	Target	-	-	84,01
B.	Realisasi/Proyeksi Realisasi	77,35	81,86	84,01*
C.	Realisasi RB Nasional tingkat K/L (General dan Tematik)	76,81	82,98	82,98*
Persentase Nilai Capaian		100%	100%	100%*

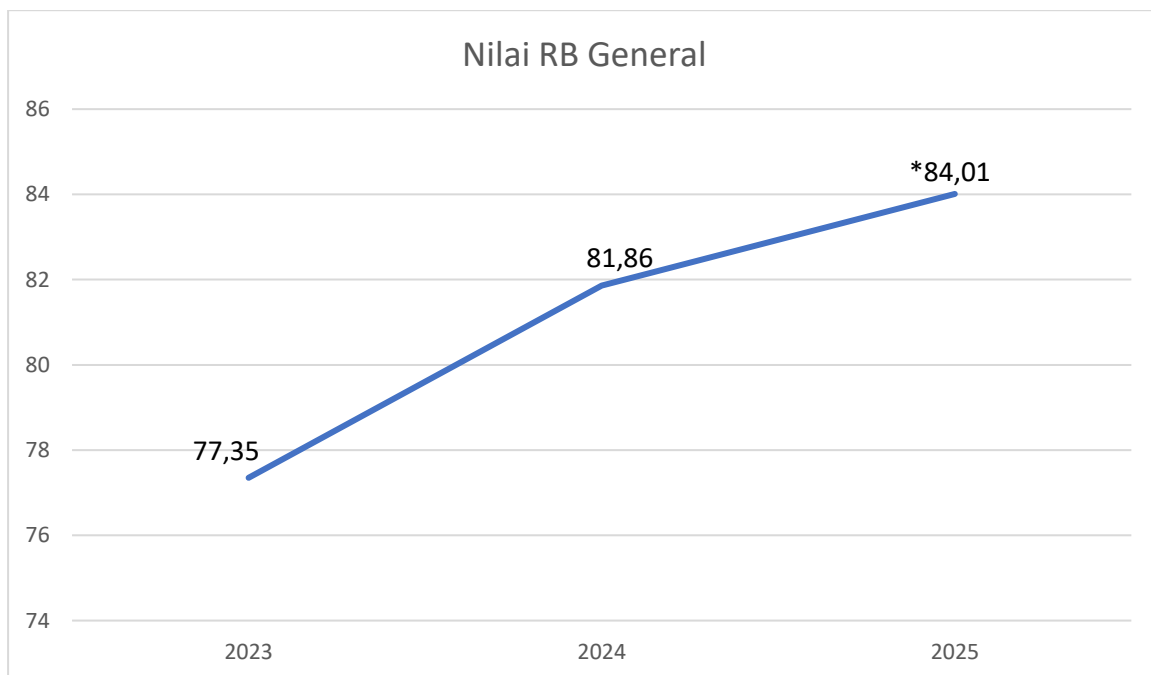
Ket: *nilai proyeksi

Untuk menghitung Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dilakukan perhitungan 27 indikator yang masuk ke dalam RB General. Indikator-indikator tersebut akan dijumlahkan setelah dilakukan pembobotan pada setiap indikator. Berdasarkan tabel capaian nilai RB General di atas realisasi nilai RB General berhasil diraih sebesar 84,01 atau dengan capaian 100% dari target. Realisasi nilai tersebut menggunakan nilai proyeksi setelah masa sanggah, karena hingga laporan ini dibuat nilai resmi belum keluar dan hanya ada nilai sementara sebesar 80,05. Pada tahun 2023 dan 2024 belum terdapat target RB General dikarenakan pada tahun tersebut Indikator Kinerja Utama RB di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih menjadi satu antara RB General dan RB Tematik.

No	Indikator RB General	Bobot	Nilai Maksimal	Nilai 2024	Capaian Indeks 2024	Proyeksi Nilai 2025	Proyeksi Capaian Indeks 2025
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	3	2,55	2,55	2,55	2,55
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	100,00	5,95	100	7,00
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	100,00	2,00	100	2,00
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	5,00	2,00	5	2,00
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	5	3,55	2,84	3,58	2,86
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	3	3	0,50	0,50	0,50	0,50
7	Nilai SAKIP	4	100	73,32	2,93	75	3,00
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	100	96,01	1,92	97	1,94
9	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	5	3,00	1,20	3	1,20
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	100	98,09	1,96	90	1,80
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	100	97,56	1,95	95	1,90
12	Indeks Pengelolaan Aset	2	4	3,87	1,90	3,60	1,80
13	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	1,5	5	3,00	0,90	3	0,90
14	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	100	98,77	1,48	99	1,49
15	Indeks Reformasi Hukum	1,5	100	96,98	1,45	90	1,35
16	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	5	2,45	0,73	2,60	0,78
17	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	100	75,76	1,52	85	1,70
18	Indeks Sistem Merit	4	410	345,50	3,37	345,50	3,37
19	Indeks Pelayanan Publik	1,5	5	4,48	1,34	4,50	1,35

No	Indikator RB General	Bobot	Nilai Maksimal	Nilai 2024	Capaian Indeks 2024	Proyeksi Nilai 2025	Proyeksi Capaian Indeks 2025
20	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	100	-	-	-	-
21	Indeks SPBE	9	5	4,00	7,20	4,20	7,56
22	Capaian Prioritas Nasional	3	100	89,57	2,69	100	3,00
23	Capaian IKU	7	100	100,00	5,50	100	5,50
24	Opini BPK WTP	5	WTP	WTP	5,00	5	5,00
25	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	100	63,76	2,55	75	3,00
26	Indeks BerAkhlaq	4	100	82,67	3,31	85	3,40
27	Survei Penilaian Integritas	10	100	81,81	8,18	82	8,20
28	Survei Kepuasan Masyarakat	8	100	89,62	7,17	95	7,60

Tabel 3.3 Capaian Indikator RB General



Grafik 3.1 Nilai RB General

Nilai RB General tahun 2023 hingga 2025 mengalami peningkatan terus menerus. Peningkatan ini didasarkan pada berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dari tahun ke tahun dalam hal pelaksanaan RB General. RB General mulai masuk dalam komponen perhitungan Nilai Reformasi Birokrasi pada tahun 2023, karena pada saat itu terjadi perubahan komponen penilaian RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kegiatan yang dapat Menunjang Capaian Target

Pelaksanaan RB General akan dievaluasi setiap tahunnya yang kemudian akan menghasilkan Nilai RB General. Arah perbaikan nilai RB General dilaksanakan dengan mengacu pada hasil penilaian dan rekomendasi pada tahun sebelumnya. Sebagai upaya perbaikan Reformasi Birokrasi General, sepanjang tahun 2025 Kemenko Bidang Perekonomian telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- Melaksanakan rivi u hasil evaluasi RB General tahun 2024;
- Menyusun Rencana Aksi RB tahun 2025 yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025;
- Pembentukan tim monitoring dan evaluasi RB;
- Penentuan platform/tools yang akan digunakan dalam melaksanakan RB General;
- Melakukan pengukuran dan pelaporan terhadap implementasi rencana aksi RB General secara periodik;
- Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi RB General secara periodik;
- Penyusunan rekomendasi atau umpan balik atas implementasi rencana aksi RB General yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja.

Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat

Adapun faktor-faktor pendukung dalam upaya pencapaian target kinerja Nilai Reformasi Birokrasi General tahun 2025 antara lain :

1. Penyusunan dokumen rencana kerja berupa Rencana Aksi RB General yang telah mendetail hingga pada rincian kerja yang harus dilaksanakan oleh unit kerja menjadi pedoman yang ideal sehingga pelaksanaan RB tahun 2025 dapat lebih terarah dan tepat waktu.
2. Keterlibatan unit kerja baik di sekretariat hingga unit kedeputan yang masif dalam melaksanakan rencana aksi serta untuk mendorong tercapainya kegiatan-kegiatan RB yang telah direncanakan pada rencana aksi.
3. Sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara triwulanan dapat membantu Tim RB Pusat untuk melakukan pemantauan pada rincian kegiatan apa yang belum tercapai dan terkendala sehingga dapat menjadi bahan perbaikan pelaksanaan RB supaya lebih tepat dan solutif.
4. Keterlibatan pimpinan secara aktif pada saat menghadiri agenda evaluasi RB bersama tim evaluator Kementerian PANRB.
5. Sistem database berupa bukti pelaksanaan RB yang telah terintegrasi baik baik ditingkat Kementerian maupun tingkat unit.

Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala pencapaian target kinerja Nilai Reformasi Birokrasi General tahun 2025 antara lain:

1. Kebijakan pelaksanaan RB General masih memiliki pola yang dinamis. Dengan demikian, penyusunan kebijakan internal pelaksanaan RB perlu disesuaikan dengan cepat.

2. Cakupan pelaksanaan RB General melibatkan seluruh pihak yang ada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga penyusunan rencana aksi memerlukan waktu yang lebih panjang.
3. Terdapat pergeseran jadwal pada pelaksanaan agenda dan penilaian indeks-indeks RB General.
4. Perubahan aspek penilaian pada beberapa indikator RB General, yang berdampak pada kebutuhan penyesuaian dokumen dan bukti dukung.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan pencapaian target Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025, telah dilakukan implementasi digitalisasi pelaporan dan pengumpulan rencana aksi RB melalui aplikasi Simersi secara berkala guna memastikan bahwa bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkumpul di satu bank data serta sebagai media monitoring. Selain itu, terdapat beberapa upaya efisiensi penggunaan sumber daya lainnya seperti:

- Melaksanakan koordinasi dalam satu kegiatan yang sama
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM anggota yang masuk ke dalam Pokja melalui pendidikan dan pelatihan atau workshop online

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sepanjang Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan tingkat efektivitas yang optimal. Meskipun terdapat kebijakan self blocking/automatic adjustment anggaran, seluruh kegiatan strategis dan target kinerja tetap dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan rencana. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.



B. 1.2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik

Latar Belakang

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Melalui RB Tematik, kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik

Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan RB pada periode transisi tahun 2025, Tema RB Tematik pada periode 2025 – 2029 meliputi :

1. RB Pengentasan Kemiskinan

Tema RB ini diarahkan pada perbaikan tata Kelola dengan berfokus pada kolaborasi lintas instansi dalam penyelesaian akar masalah pengelolaan program kemiskinan, agar pemanfaatan anggaran kemiskinan dapat memberikan dampak yang optimal dalam menurunkan angka kemiskinan.

2. RB Peningkatan Investasi

Tema RB ini diarahkan untuk memperbaiki tata kelola sebagai dukungan terhadap kemudahan investasi. Upaya yang dilakukan mencakup penyederhanaan proses bisnis dan regulasi, percepatan proses perizinan, peningkatan koordinasi antar instansi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan public untuk mendorong peningkatan realisasi investasi

3. RB Mendorong Hilirisasi

Tema RB ini diarahkan pada penguatan tata kelola dan kolaborasi antar-lembaga dan daerah dalam mendukung transformasi ekonomi dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dari produk dalam negeri.

4. RB Mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan

Tema RB ini diarahkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan percepatan peningkatan akses dan mutu layanan Kesehatan baik primer maupun lanjutan. Sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang merata, aman, dan bermutu kepada setiap Masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

5. RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Tema RB ini diarahkan untuk mendukung prioritas actual Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan dan mengurangi tingkat kerawanan pangan di daerah. Birokrasi diarahkan untuk melaksanakan tata kelola dalam Upaya mewujudkan transformasi pengelolaan pertanian dari tradisional menjadi pertanian modern dengan mendorong peningkatan produksi pangan

6. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan

Pada tema RB ini diarahkan untuk melaksanakan tata kelola dalam mewujudkan transformasi Pendidikan yang berkualitas dan bermutu

Tujuan dari indikator kinerja utama ini, untuk menggambarkan tingkat keterlibatan Kemenko Perekonomian dalam penyelesaian isu-isu strategis nasional yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat.

Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tematik

Kemenko Perekonomian telah menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2025 berdasarkan *guidence Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2025–2029. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian Tahun 2025.

Pada tahun 2025, terjadi perubahan Tema pada komponen di RB Tematik. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut :

No	Tema Lama	No	Tema Baru
1	RB Peningkatan Investasi	1	RB Pengentasan Kemiskinan
2	RB Pengentasan Kemiskinan	2	RB Peningkatan Investasi
3	RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	3	RB Mendorong Hilirisasi
4	RB Pengendalian Inflasi	4	RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
5	RB Peningkatan Produk dalam Negeri	5	RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan
		6	RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan

Tabel 3.5 Perubahan Tema Pada Komponen di RB Tematik

Tahun 2025 merupakan masa transisi dari pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 menuju *Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045*, serta dari *Roadmap* Reformasi Birokrasi tahun 2020–2024 menuju *Roadmap* Reformasi Birokrasi tahun 2025–2029, maka diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2025.

Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik 2025 di lingkungan Kemenko Perekonomian dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

- 4 (empat) tema RB Tematik yang baru, ***hanya dinilai dari kualitas Rencana Aksi (renaksi) yang telah disusun dan kualitas sasaran keberhasilan RB***. Tema itu meliputi :
 - a. RB Mendorong Hilirisasi,
 - b. RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional,
 - c. RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, dan
 - d. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan.
- Sedangkan, 2 (dua) tema RB Tematik yang lama yaitu Tema RB Peningkatan Investasi dan Tema RB Pengentasan Kemiskinan ***menggunakan nilai pada tahun sebelumnya (TA. 2024)***.

Hasil nilai Kedua akan digabung untuk mendapatkan hasil akhir nilai RB Tematik Tahun 2025. Tim Penilai Nasional (TPN) akan melakukan reviu terhadap Rencana Aksi dan Laporan Monev yang disusun oleh K/L dan Pemda pada Tema RB Tematik yang baru sebatas bertujuan untuk memberikan saran dan masukan dalam rangka peningkatan kualitas Rencana Aksi di tahun berikutnya. Hasil reviu atas 4 (empat) tema RB Tematik Baru tidak mempengaruhi penilaian akhir indeks RB tahun 2025.

Indikator atau kriteria penilaian Rencana Aksi Tematik oleh Kemenpan RB pada 4 (empat) tema RB Tematik baru :

Kualitas Sasaran Keberhasilan RB		
1	Kesesuaian Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	Sasaran telah berorientasi hasil atau outcome

2	Kesesuaian Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	- Indikator keberhasilan RB Tematik telah sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan/atau mandat khusus dalam tematik, serta secara logis dapat mendukung tercapainya dampak tematik (K/L) - Indikator keberhasilan RB Tematik telah sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional
3	Perumusan indikator telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup	Indikator yang dirumuskan telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup untuk mengukur keberhasilan sasaran RB Tematik.
Kualitas Rencana Aksi		
1	Kesesuaian Rencana Aksi dengan Indikator Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	Rencana aksi yang disusun secara logis dapat mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi pemerintah (tergambar dalam logframe/pohon kinerja)
2	Kualitas strategi/upaya yang terdapat dalam Rencana Aksi	Rencana aksi telah memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
3	Rencana Aksi memuat kolaborasi nyata	Rencana aksi memuat bentuk kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan

Tabel 3.5 Indikator Penilaian Rencana Aksi Tematik Kemenpan RB

TABEL 3.6 IKU Nilai RB Tematik 2025				
No	Reformasi Birokrasi	2023	2024	2025
A.	Target	-	-	6,76
B.	Realisasi/Proyeksi Realisasi	7,7	6,76	6,76*
C.	Realisasi RB Nasional tingkat K/L (General dan Tematik)	76,81	82,98	82,98*
Persentase Nilai Capaian		100%	100%	100%*

Ket: * nilai proyeksi

Pada tahun 2025 ini merupakan masa transisi Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020–2024 menuju Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2025–2029, dimana Tema RB Tematik yang baru komponen - komponen penilaiannya masih dirumuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Berdasarkan tabel capaian nilai RB Tematik di atas realisasi nilai RB Tematik berhasil diraih sebesar 6,76 atau dengan capaian 100% dari target. Realisasi nilai tersebut menggunakan nilai proyeksi setelah masa sanggah, karena hingga laporan ini dibuat nilai resmi belum keluar dan hanya ada nilai sementara sebesar 7,74. Pada tahun 2023 dan 2024 belum terdapat target RB Tematik dikarenakan pada tahun tersebut Indikator Kinerja Utama RB masih menjadi satu antara RB General dan RB Tematik. Nilai RB Tematik tahun 2023 hingga 2025 mengalami penurunan akibat terjadi perubahan tema serta terbatasnya keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan pada tema RB Tematik.

Pada tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki rencana aksi RB Tematik sebanyak 60. Terdapat 45 rencana aksi yang terlaksana; 5 rencana aksi yang tertunda dan tergeser; dan 10 rencana aksi yang tidak terlaksana pada tahun 2025.

Kegiatan yang dapat Menunjang Capaian Target

Pelaksanaan RB Tematik akan dievaluasi setiap tahunnya yang kemudian akan menghasilkan Nilai RB Tematik. Arah perbaikan nilai RB Tematik dilaksanakan dengan mengacu pada hasil penilaian dan rekomendasi pada tahun sebelumnya. Sebagai upaya perbaikan Reformasi Birokrasi Tematik, sepanjang tahun 2025 Kemenko Bidang Perekonomian telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- Melaksanakan rivi u hasil evaluasi RB Tematik tahun 2024;
- Menyusun Rencana Aksi RB tahun 2025 yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025;
- Pembentukan tim monitoring dan evaluasi RB;
- Penentuan platform/tools yang akan digunakan dalam melaksanakan RB Tematik;
- Melakukan pengukuran dan pelaporan terhadap implementasi rencana aksi RB Tematik secara periodik;
- Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi RB Tematik secara periodik;
- Penyusunan rekomendasi atau umpan balik atas implementasi rencana aksi RB Tematik yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja.

Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat

Adapun faktor-faktor pendukung dalam upaya pencapaian target kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Tematik tahun 2025 antara lain :

1. Penyusunan dokumen rencana kerja berupa Rencana Aksi RB Tematik yang telah mendetail hingga pada rincian kerja yang harus dilaksanakan oleh unit kerja menjadi pedoman yang ideal sehingga pelaksanaan RB tahun 2025 dapat lebih terarah dan tepat waktu.
2. Keterlibatan unit kerja baik di sekretariat hingga unit ke deputian yang masif dalam melaksanakan rencana aksi serta untuk mendorong tercapainya kegiatan-kegiatan RB yang telah direncanakan pada rencana aksi.
3. Sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara triwulanan dapat membantu Tim RB Pusat untuk melakukan pemantauan pada rincian kegiatan apa yang belum tercapai dan terkendala sehingga dapat menjadi bahan perbaikan pelaksanaan RB supaya lebih tepat dan solutif.

4. Keterlibatan pimpinan secara aktif pada saat menghadiri agenda evaluasi RB bersama tim evaluator Kementerian PANRB.
5. Sistem database berupa bukti pelaksanaan RB yang telah terintegrasi baik baik ditingkat Kementerian maupun tingkat unit.

Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala pencapaian target kinerja RB Tematik tahun 2025 antara lain:

1. Kebijakan pelaksanaan RB Tematik masih memiliki pola yang dinamis. Dengan demikian, penyusunan kebijakan internal pelaksanaan RB perlu disesuaikan dengan cepat.
2. Cakupan pelaksanaan RB Tematik melibatkan beberapa unit kerja yang ada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga penyusunan rencana aksi memerlukan waktu yang lebih panjang.
3. Terdapat pergeseran jadwal pada pelaksanaan beberapa program yang tertuang pada rencana Aksi RB tematik.
4. Perubahan aspek penilaian pada beberapa indikator RB Tematik, yang berdampak pada kebutuhan penyesuaian dokumen dan bukti dukung.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan pencapaian target Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025, telah dilakukan implementasi digitalisasi pelaporan dan pengumpulan rencana aksi RB melalui aplikasi Simersi secara berkala guna memastikan bahwa bukti dukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkumpul di satu bank data serta sebagai media monitoring. Selain itu, terdapat beberapa upaya efisiensi penggunaan sumber daya lainnya seperti:

- Melaksanakan koordinasi dalam satu kegiatan yang sama
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM anggota yang masuk ke dalam Pokja melalui pendidikan dan pelatihan atau workshop online

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sepanjang Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan tingkat efektivitas yang optimal. Meskipun terdapat kebijakan self blocking/automatic adjustment anggaran, seluruh kegiatan strategis dan target kinerja tetap dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan rencana. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.



B.2 CAPAIAN SASARAN PROGRAM TERWUJUDNYA DUKUNGAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN YANG BERKUALITAS

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran untuk menjalankan penugasan khusus yang bersifat lintas unit. Sasaran strategis ini menegaskan peran khusus Sekretariat yang mengemban *special mission* terhadap isu-isu strategis di bidang perekonomian. Dukungan pengambilan kebijakan meliputi pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian isu-isu strategis dibidang perekonomian terutama yang bersifat *crosscutting*, dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

TABEL 3.7 SP Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Kinerja	NSS
Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	2.1. Tingkat Input Material Sirkular	9,2%	9,2%*	100%	100%
	2.2. Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan	Laki-laki 16,891; Perempuan 9,920	Laki-laki 16.891*; Perempuan 9.920*	100%	
	% NSS				Memenuhi ekspektasi

Ket: *nilai proyeksi

Berdasarkan tabel di atas, Sasaran “Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas” terdiri atas dua indikator yaitu “Tingkat Input Material Sirkular” dan “Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan”. Berdasarkan hasil perhitungan Nilai Sasaran Strategis diperoleh hasil bahwa sasaran strategis “Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas” memperoleh nilai sebesar 100%.



B. 2.1. Tingkat Input Material Sirkular

Latar Belakang

PP Ekosistem Ekonomi Sirkular dengan indikator Tingkat Input Material Sirkular yang diampu oleh Kemenko Perekonomian mendukung Prioritas Nasional 2 Sasaran 06 yaitu Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau dalam RPJMN 2025-2029. Kementerian PPN/BAPPENAS telah menyusun Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN-ES) Indonesia 2025-2045 sebagai panduan implementasi PP ini. Dalam RAN-ES tersebut dijelaskan bahwa

Ekonomi Sirkular merupakan model ekonomi yang menerapkan pendekatan sistemik untuk meminimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai. Berdasarkan RPJMN 2025 - 2029, proyek prioritas yang menjadi kawalan Kementerian Perekonomian dalam menkoordinasikan kebijakan pada sektor Material Sirkular adalah :

1. Pengembangan kebijakan, teknologi dan fasilitasi pengelolaan sampah dengan prinsip sirkular;
2. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Nikel;
3. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Tembaga;
4. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Bauksit;
5. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Timah;
6. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Kimia.

Ruang Lingkup Kebijakan Penerapan ekonomi sirkular di Indonesia diarahkan pada 3 (tiga) kebijakan utama, yaitu (a) pengurangan penggunaan sumber daya, (b) perpanjangan daya guna produk dan material, dan (c) peningkatan daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi. Arah kebijakan ekonomi sirkular tersebut menjadi acuan dalam dalam perancangan strategi transisi serta menentukan aksi dan implementasi.

Indikator Tingkat Input Material Sirkular merupakan indikator dari kebijakan utama (1) pengurangan penggunaan sumber daya. Indikator tersebut mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam produksi barang atau jasa. Baseline indikator ini di tahun 2024 sebesar 9%, dengan target tahun 2025 sebesar 9,2% dan tahun 2029 mencapai 10%.

Capaian Tingkat Input Material Sirkular

TABEL 3.8 IKU Tingkat Input Material Sirkular 2025		
No	Reformasi Birokrasi	2025
A.	Target	9,2
B.	Realisasi/Proyeksi Realisasi	9,2*
Persentase Nilai Capaian		100%*

Ket: *nilai proyeksi

Hingga laporan ini dibuat, Nilai Tingkat Input Material Sirkular tahun 2025 belum tersedia. Namun, berdasarkan tabel capaian Tingkat Input Material Sirkular di atas dengan menggunakan proyeksi realisasi Tingkat Input Material Sirkular, capaian Tingkat Input Material Sirkular berhasil diraih sebesar 100% dari target. Pada tahun sebelumnya belum terdapat target dan capaian Tingkat Input Material Sirkular dikarenakan indikator Tingkat Input Material Sirkular merupakan indikator baru di tahun 2025.

Kegiatan yang dapat Menunjang Capaian Target

Arah kebijakan ekonomi sirkular berfokus pada transisi dari model “ambil–buat–buang” (linear) menjadi “pakai ulang–daur ulang–hemat sumber daya” (sirkular). Dengan tujuan efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan keberlanjutan.

Peran Kemenko Perekonomian dalam ekonomi sirkular dapat diimplementasikan melalui sinkronisasi dan koordinasi kebijakan untuk deregulasi kemudahan untuk industri dalam melakukan daur ulang, mengkoordinasikan kebijakan yang dapat mengubah paradigma produsen dalam mendesain produk, mempertimbangkan seluruh siklus hidup suatu barang produksi (Extended Producer Responsibility), memastikan keberlanjutan kebijakan atau rencana kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi sirkular, menciptakan ekosistem sirkular melalui mekanisme insentif dan disinsentif, dan mendorong kerja sama dengan sektor publik dan swasta untuk dukungan pembiayaan maupun keahlian.

Selama tahun 2025, dalam pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Tingkat Input Material Sirkular, disampaikan sebagai berikut:

- Mengawal indikator RPJMN 2025-2029 yang diampu oleh Kemenko Bidang Perekonomian, salah satunya terkait Tingkat Input Material Sirkular dan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam pengukuran indikator ekonomi sirkular;
- Menyusun perencanaan kerja dan rencana aksi serta analisis mendalam terhadap sektor dan isu yang dikawal oleh Kemenko Perekonomian;
- Mendata kebijakan dan regulasi serta stakeholder yang terkait dengan Tingkat Input Material Sirkular;
- Menghadiri Pembahasan RaPerpres Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia dengan Kementerian PPN/Bappenas;
- Menghadiri Rapat Perkembangan Program dan Kebijakan Strategis terkait Ekonomi Hijau dan Ekonomi Sirkular di Lingkungan Kemenko Perekonomian;
- Menghadiri Rapat Kick-Off Page Indonesia Fase 2 dan Kick Off Meeting Program Prioritas Pekerjaan Hijau;
- Menghadiri pembukaan acara International Conference on Circular Economy and Sustainability (ICCES);
- Koordinasi dengan Asia Zero Emission Community (AZEC) terkait progress Proyek TPPAS Regional Legok Nangka, yang dapat dipertimbangkan menjadi salah satu program pengarusutamaan ekonomi sirkular di Indonesia;
- Menghadiri diseminasi awal kajian Supply Demand dan Tata Kelola Bahan Baku Industri Daur Ulang Plastik di Indonesia dengan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI);

- Pemilihan Rincian Output unit kerja dan rapat perkembangan program kebijakan strategis di Kemenko Perekonomian yang terkait dengan Ekonomi Sirkular dan Ekonomi Hijau;
- Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian terkait Pemetaan dan Urgensi dalam Kelembagaan dalam Penerapan Ekonomi Sirkular di Sektor Industri dan Perumusan Tata Kelola dan Instrumen Ekonomi Sirkular di Sektor Industri;
- Menghadiri Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Sirkular Sektor Industri dan FGD Tindak Lanjut dari Dampak Rencana Penerapannya;
- Menghadiri Audiensi Pemangku Kepentingan Pemerintah terkait *Extended Producer Responsibility* (EPR) dan menghadiri Diseminasi Hasil Kajian Akademis *Extended Producer Responsibility* (EPR) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
- Monitoring Pelaksanaan Benchmarking Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular di Kota Yogyakarta.

Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat

Adapun faktor-faktor pendukung dalam upaya pencapaian target kinerja Tingkat Input Material Sirkular tahun 2025 antara lain :

1. Terdapat arah kebijakan yang jelas dalam mendukung Tingkat Input Material Sirkular dan adanya koordinasi kebijakan dan regulasi yang mendorong ekonomi sirkular;
2. Adanya kewajiban produsen menyusun roadmap pengurangan sampah melalui skema *Extended Producer Responsibility* (EPR);
3. Banyaknya pelaku usaha yang aware meningkatkan Tingkat Input Material Sirkular karena sudah menjadi standar global dan pelaporan ESG;
4. Untuk bahan daur ulang tertentu, pasokan lokal sudah ada dan ekonomis;
5. Peran sektor informal menjadi keunggulan, dengan adanya bank sampah dan pemulung sehingga biaya pengumpulan relatif rendah.

Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala pencapaian target kinerja Tingkat Input Material Sirkular tahun 2025 antara lain:

1. Masih lemahnya sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Pemilahan di sumber masih rendah, 60% sampah masih ke TPA, dan tingkat kontaminasi tinggi; sehingga volume dan kualitas material sirkular terbatas;
2. Belum adanya kualitas dan standar material daur ulang yang kuat;
3. Banyak produk di Indonesia yang tidak dirancang untuk *reuse* dan sulit didaur ulang;
4. Kapasitas teknologi dan investasi terbatas, secara nasional belum mampu menyerap semua limbah menjadi input produksi;

5. Penegakan regulasi yang lemah. EPR belum ditegakkan secara ketat dan tidak ada sanksi yang kuat.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan pencapaian target Tingkat Input Material Sirkular tahun 2025, telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting;
2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM dalam memahami hal-hal yang menjadi isu utama;
3. Melaksanakan dialog kinerja bersama;
4. Penggunaan penyimpanan dokumen data capaian berbasis Cloud, seperti Google Drive dan One Drive.

Pelaksanaan pencapaian IKU Tingkat Input Material Sirkular sepanjang Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan tingkat efektivitas yang optimal. Meskipun terdapat kebijakan self blocking/automatic adjustment anggaran, seluruh kegiatan strategis dan target kinerja tetap dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan rencana. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil.



B. 2.2. Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan

Latar Belakang

Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat serta kesenjangan ekonomi berbasis gender. Perbedaan pola dan tingkat pengeluaran per kapita antara laki-laki dan perempuan mencerminkan akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan ekonomi, serta efektivitas kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pada Program Nasional (PN) 4 terdapat tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait Indikator 6 yaitu Pengeluaran Per Kapita Laki-Laki dan Perempuan, dengan beberapa kegiatan pemberdayaan perempuan seperti:

1. Kementerian Perdagangan (Kemendag) memang memiliki program untuk meningkatkan akses pasar bagi perempuan pelaku usaha, dsb;
2. Kementerian UKM melaksanakan program Pelatihan Kewirausahaan Digital untuk perempuan, Seed 4 women (peningkatan Inklusi keuangan perempuan digital), dsb;
3. Kementerian Ketenagakerjaan melakukan program pelatihan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, dukungan kewirausahaan, dan perlindungan hak-hak pekerja perempuan, dsb;
4. Kementerian Perindustrian melakukan program peningkatan peran perempuan dalam pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), dsb.

Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian tersebut dikategorikan efektif dan efisien apabila seluruh tahapan dilalui secara terstruktur dan terintegrasi. Penilaian dilakukan melalui pembobotan yang proporsional dalam 3 tahapan dengan bobot masing-masing tahapan sebesar 33,3%. Penentuan bobot tersebut didasarkan pada penugasan strategis Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, yaitu dalam pelaksanaan analisis dan harmonisasi kebijakan, pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran pembangunan nasional, serta manajemen kinerja dan kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator.

Capaian Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan

TABEL 3.9 <i>IKU Pengeluaran Per kapita Laki-laki dan Perempuan</i>		
No	Pengeluaran Per kapita Laki-laki dan Perempuan	2025
A.	Target	Laki-laki 16.891 Perempuan 9.920
B.	Realisasi/Proyeksi Realisasi	Laki-laki 16.891** Perempuan 9.920**
Persentase Nilai Capaian		100%

Hingga laporan ini disusun, nilai Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan tahun 2025 belum tersedia karena data terbaru yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) baru akan dirilis pada bulan Maret 2026. Namun, berdasarkan tabel capaian Pengeluaran Per kapita Laki-laki dan Perempuan di atas dengan menggunakan proyeksi realisasi Pengeluaran Per kapita Laki-laki dan Perempuan, capaian Pengeluaran Per kapita Laki-laki dan Perempuan berhasil diraih sebesar 100% dari target. Selain itu, indikator kinerja utama Persentase Penyelesaian Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan merupakan indikator baru yang belum diukur pada tahun sebelumnya, sehingga belum tersedia data pembandingan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam rangka identifikasi, sinergi, dan kolaborasi berbagai program kerja dan kebijakan eksisting di pemerintah daerah yang mendukung peran perempuan dalam perekonomian dan juga upaya memperkuat implementasi strategi pengarusutamaan gender (PUG), telah dilaksanakan identifikasi dan koordinasi untuk menggali praktik-praktik baik dan pembelajaran pada pemerintah daerah yang telah berhasil menerapkan PUG secara efektif. Komponen utama program PUG di daerah yang ditinjau terkait kelembagaan PUG, penyusunan data terpilah, perencanaan dan penganggaran responsif gender, peningkatan kapasitas SDM, dan monitoring dan evaluasi. Pemilihan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan capaian konkret dan pengakuan nasional atas keberhasilan dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender secara sistemik dan berkelanjutan. Adapun di daerah yang telah meraih penghargaan tertinggi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023 kategori “Mentor”, yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemPPPA). Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi daerah dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender, serta menjadi bukti nyata keberhasilan mereka dalam menciptakan ekosistem kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

Guna mempercepat proses internalisasi perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) bagi K/L, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis bagi K/L Penggerak dan K/L Pengampu di 5 sektor Pembangunan. Kementerian Koordinator termasuk dalam K/L pengampu sektor ekonomi. Dalam mendukung PUG sektor ekonomi, terdapat 5 indikator yang dapat didorong antara lain: pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, proporsi penciptaan lapangan kerja formal, pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan, dan indeks

literasi keuangan. Bimbingan teknis tersebut diikuti oleh Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama dan unit kerja yang menangani terkait TPAK Perempuan, penyaluran KUR, keuangan inklusi, dan ekonomi digital. Dengan diadakannya bimbingan teknis dan sosialisasi diharapkan penyelenggaraan PUG di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat segera terlaksana dan dapat mengikuti penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya di tahun depan.

Kegiatan yang dapat Menunjang Capaian Target

Kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dalam mendukung terlaksananya Persentase Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan pada Tahun 2025 antara lain:

1. Menghadiri Rapat Pembahasan Target dan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029 yang diselenggarakan oleh Kemendukbangga/BKKBN pada 5 Juni 2025;
2. Menghadiri Advokasi Pengintegrasian Perspektif Gender yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA pada 19 Juni 2025;
3. Menghadiri *launching* Pokja *Care Economy* yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA pada 25 Juni 2025;
4. Rapat Audiensi Indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN pada 28 Juli 2025;
5. Mendata kebijakan dan regulasi serta *stakeholder* yang terkait dengan Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan;
6. Melaksanakan FGD Perhitungan Indikator Tematik RPJMN 2025-2029, salah satunya indikator Pengeluaran Perkapita;
7. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam kaitannya dengan perspektif gender dan Pokja *Care Economy*;
8. Melakukan indentifikasi, sinergi, dan kolaborasi berbagai program kerja dan kebijakan eksisting di kementerian/lembaga yang mendukung peran perempuan dalam perekonomian seperti KemenPPA, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Bank Indonesia, dan OJK;
9. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan di sektor informal dan mengurangi gap kesenjangan gender dalam penghasilan dan kesempatan kerja;
10. Melakukan koordinasi dengan KemenPPPA terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kemenko Perekonomian, khususnya terkait mekanisme *tagging* Anggaran Responsif Gender (ARG) apda rincian output (RO) potensial;
11. *Benchmarking* program pembangunan responsif gender pada pemerintah daerah dalam implementasi program penguatan partisipasi perempuan dalam perekonomian untuk mendukung pencapaian indikator pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Kota Surabaya, dan Kota Semarang;
12. Menghadiri Advokasi Ekonomi Perawatan untuk Peningkatan TPAK Perempuan pada 24 Oktober 2025;
13. Menghadiri Diseminasi DNTG dan Inovasi Layanan Inklusi Keuangan Perempuan pada 31 Oktober 2025;
14. Menghadiri Peluncuran Buku Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029 pada 19 November 2025;

Analisis Faktor - Faktor Pendukung dan Penghambat

Tercapainya target Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor yang mendukung upaya pencapaian kinerja ini diantaranya adalah:

1. Berkolaborasi dengan unit kerja dalam mengidentifikasi program kerja yang nantinya akan berkaitan dengan Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan;
2. Penguatan basis kebijakan melalui pemetaan regulasi dan pemangku kepentingan, yang mendukung penyusunan strategi pengurangan kesenjangan pengeluaran per kapita berbasis gender;
3. Berkoordinasi dengan BPS dalam pembahasan penghitungan target indikator Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan;

Pada 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Indikator terkait Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan relatif masih baru di Biro MKKS, sehingga dalam identifikasi isu/permasalahan masih terbatas;
2. Adanya perubahan SOTK dan reorganisasi unit kerja sehingga terdapat perubahan dalam tugas fungsi dan kewenangan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Melaksanakan koordinasi dan rapat beberapa tema rapat dalam 1 kesempatan yang sama;
2. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting;
3. Pengumpulan dan sharing data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai.



B.3 CAPAIAN SASARAN PROGRAM TERWUJUDNYA KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS LINTAS SEKTORAL YANG EFEKTIF

Selain dukungan manajemen tata kelola, Sekretariat bertugas untuk memberikan dukungan pengambilan kebijakan pimpinan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan lintas sektor. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan yang dikeluarkan masing-masing unit kerja tidak saling bertentangan dan berjalan kondusif serta kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil perhitungan Nilai Sasaran Strategis diperoleh hasil bahwa sasaran strategis Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efektif memperoleh nilai sebesar 100%. Pencapaian ini juga menandakan bahwa Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memanfaatkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sebagai pelaksanaan special mission di Sekretariat ataupun kegiatan yang bersifat lintas sektoral.

TABEL 3.10 Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Kinerja	NSS
Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	3.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%
% NSS					Memenuhi ekspektasi



B.3.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan

Latar Belakang

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan tugas dan fungsi utama melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan baik untuk Kementerian/Lembaga di bawah koordinasinya maupun kebijakan strategis yang ditugaskan oleh Presiden. Oleh karena itu, unit kerja dituntut untuk mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan, intervensi kebijakan eksisting, maupun pelaksanaan dan intervensi program pemerintah baik yang dibawah tanggungjawab langsung maupun yang dibawah Kementerian/Lembaga teknis. Sekretariat Kementerian selaku unit yang mengampu misi khusus selaku unit decision support, Sekretariat memproduksi berbagai kajian yang diharapkan mampu membantu Menteri dan masing-masing unit kerja dalam pengambilan keputusan.

Adapun rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang diampu oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025 adalah :

1. Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi
Kegiatan ini mencerminkan peran dari Kemenko Perekonomian dalam memastikan kebijakan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara tepat waktu, terintegritas, dan berdampak. Melalui koordinasi ini diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak terjadi duplikasi kebijakan, stagnasi pelaksanaan, atau konflik kepentingan antar Kementerian/Lembaga
2. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja
Sebagai amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, Sekretariat Kemenko Perekonomian berperan dalam mengkoordinasikan kebijakan lintas sektoral yang mendukung penciptaan iklim usaha yang sehat, investasi yang kompetitif dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
3. Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi
Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mencerminkan keadilan dan distribusi yang merata antardaerah, antarwilayah, serta kelompok masyarakat.

Capaian Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan

TABEL 3.11 PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN LINTAS SEKTORAL YANG DIMANFAATKAN					
No	Nilai Survei Penilaian Integritas	2021	2022	2024	2025
A.	Target	75%	75%	80%	100%
B.	Realisasi/Proyeksi Realisasi	75%	75%	80%	100%
Persentase Nilai Capaian		100%	100%	100%	100%

Nilai capaian Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang dimanfaatkan telah terealisasi sebesar 100% dari target. Perolehan nilai realisasi ini menggambarkan bahwa rekomendasi kebijakan dalam bentuk disposisi telah dimanfaatkan dalam penyusunan bahan koordinasi internal, lintas sektor, maupun nasional, penggunaan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, atau penggunaan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan.

Kegiatan yang Menunjang Capaian Target Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang dimanfaatkan

Kebijakan lintas sektor yang aktivitasnya telah dilaksanakan hingga akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja

Dalam rangka memberikan kemudahan berusaha dan mendukung peningkatan investasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja), perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian beberapa kebijakan dalam Peraturan Perundang-undangan turunannya dengan kondisi saat ini, meliputi:

- peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja
- kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMKM; dan
- peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan pendampingan atas penyusunan revisi peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, diantaranya:

- RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 jo. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
- RPerpres tentang Penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan Secara Hukum (Fiktif Positif).

Disamping itu Sekretariat masih terus melakukan pendampingan terhadap gugatan *Judicial Review* baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Pada tahun 2025 Sekretariat menangani 5 gugatan di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Gugatan yang masih berproses di MK yaitu :

- 100/PUU-XXIII/2025: Uji Materiil UU No. 6/2023 (klaster Lingkungan Hidup)
- 112/PUU-XXIII/2025: Uji Materiil UU No. 6/2023 (klaster PSN)
- 168/PUU-XXIII/2025: Uji Materiil UU No. 6/2023 (klaster Pertanian, Kelautan-Perikanan, Pertanahan, Sumber Daya Air)
- 203/PUU-XXIII/2025: Uji Materiil UU No. 6/2023 (Klaster Kehutanan)

- 213/PUU-XXIII/2025: Uji Materiil UU No. 6/2023 (Klaster Pertanian)

Adapun gugatan Judicial Review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Turunannya dapat dilakukan selama Peraturan Perundang-undangan tersebut berlaku oleh para pihak yang merasa berkepentingan. *Judicial Review* tidak mempunyai batasan waktu sehingga ke depannya dapat bertambah jumlah gugatan yang dilakukan pendampingan.

2. Ekonomi Syariah

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2025 – 2029 menargetkan penguatan rantai nilai halal dan platform digital. Untuk itu, dibutuhkan sinergitas dan koordinasi antar sektor seperti BPJPH, Kementerian Perindustrian dan KNEKS. Terkait dengan digitalisasi, saat ini mulai berkembang platform sertifikasi halal online dan marketplace halal. Akan tetapi, masih memerlukan regulasi yang mendukung keamanan siber dan kepatuhan syariah. Kolaborasi lintas sektor dan kerja sama internasional, seperti dengan Islamic Development Bank (IsDB) diperlukan untuk membangun ekosistem halal yang kokoh.

Pencapaian proses penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan Ekonomi Syariah hingga triwulan IV tahun 2025, disampaikan sebagai berikut:

- Melaksanakan kolaborasi antara BPJPH dengan Kementerian Agama, dengan pemisahan umum di Kementerian Agama dan peraturan Khusus di BPJPH.
- Koordinasi pembahasan rancangan Per-BPJPH tentang Tata Niaga Impor Produk Halal sebagai dasar penyusunan Surat Kesesuaian Kehalalan (SKK) yang perlu ditindaklanjuti lebih detail kembali dalam ketentuan regulasi kehalalan produk impor yang masuk ke Indonesia.
- Monitoring implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 sebagai tindak lanjut kejelasan wewenang tugas fungsi ekonomi syariah yang di-lead oleh KNEKS dan OJK untuk dikoordinasikan isu dan program kerja dengan kementerian/lembaga terkait.
- Melakukan pemetaan awal dalam deep analysis terkait dengan industri halal
- Mensinkronisasi perumusan SKB MEKSI 2025-2029 yang akan digunakan sebagai dasar hukum kerja bersama kementerian/lembaga terkait implementasi masterplan ekonomi syariah di Indonesia.
- Mengkoordinasikan dokumen MEKSI 2025-2029 kepada KNEKS sebagai upaya penyempurnaan dokumen masterplan tersebut.
- Koordinasi acara Seminar *the Indonesian Association of Islamic Economists* (IAEI).
- Koordinasi Arah Kebijakan Penguatan Ekonomi Islam di Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian dalam acara Sarasehan Ekonom Islam Indonesia
- Monitoring implementasi *launching State of the Global Islamic Economy* (SGIE) report 2024/2025 sebagai laporan tahunan yang mengukur perkembangan dan potensi ekonomi syariah global di berbagai sektor yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L terkait.
- Mengawal pembahasan payung hukum Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) melalui rencana penyusunan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

- Koordinasi Tindak Lanjut Pertemuan Pertama Dewan Koordinasi Tertinggi RI – Arab Saudi saat Kunjungan Presiden RI sebagai pemrakarsa yakni Kementerian Luar Negeri yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral melalui inisiatif strategis di berbagai bidang. Rapat ini membahas struktur organisasi DKT, tugas dan fungsi setiap level, inisiatif yang diusulkan, mekanisme kerja, serta tindakan lanjutan menuju pertemuan DKT berikutnya pada tahun 2027 di Indonesia.
- Koordinasi pembahasan Pleno Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Jalan Pengembangan Industri Halal Tahun 2025-2029.
- Memonitoring rapat koordinasi Isu Kehalalan Food Tray pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Menyiapkan bahan paparan rangkuman Laporan SGIE report 2024/2025 untuk Bapak Sekretaris Kementerian sebagai update ekonomi islam global terkini.
- Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Inisiatif Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah pada acara Bank Indonesia (BI).
- Menyusun bahan paparan summary laporan kinerja ekonomi dan keuangan syariah triwulan III tahun 2025 untuk Menko Perekonomian.
- Sosialisasi pada FGD Perkembangan Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal pada 16 Desember 2025.

3. Indonesia National Single Window (INSW)

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window (INSW) dan untuk memperkuat kolaborasi antar Kementerian/Lembaga yang terintegrasi dalam Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Semester 1 Tahun 2025 oleh LNSW dan bekerja sama dengan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian c.q. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama. Rapat koordinasi tersebut merupakan Rapat Tingkat Eselon I dan dipimpin oleh Bapak Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Untuk tahun 2025, isu yang dapat diselesaikan pada semester I antara lain penguatan manajemen risiko melalui Indonesia *Single Risk Management* (ISRM), penyesuaian kebijakan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, layanan perizinan dalam satu aplikasi/*Single Submission*, serta rencana perubahan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang INSW. Selanjutnya, lima usulan lima isu strategis untuk dapat dicapai pada 2026. Kegiatan strategis tersebut yaitu penyesuaian regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, integrasi layanan e-SKA, perluasan implementasi komoditas SIMBARA, migrasi sistem Indonesia *Single Risk Management* (ISRM) serta mekanisme pengawasan *Strategic Trade Management* (STM).

Selama tahun 2025, dalam pencapaian proses penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan INSW, disampaikan sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan pembahasan Unit Layanan Single Window (ULSW) Kementerian Pertanian
- Telah dilaksanakan pembahasan capaian dan evaluasi isu strategis tahun 2024 dan usulan isu strategis tahun 2025. Selain itu, juga dilakukan pembahasan terkait dengan ketentuan pasal 19 Perpres No 44 Tahun 2018.

- Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW Tingkat Eselon I yang dilaksanakan pada 2 Juli 2025
- Rapat Pembahasan Kode Simpul Transportasi Nasional dan Kode Pelabuhan Perikanan atas tindak lanjut penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kode Simpul Transportasi Nasional.
- Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Courtesy Visit dan Technical Workshop STM terkait dengan identifikasi HS code untuk barang-barang dual use item, konsep pola pengawasan dan perizinan, dan pembahasan terkait kesisteman pada 29 Juli 2025.
- Sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Dewan Pengarah, telah dilaksanakan Rapat Teknis Unit Layanan Single Window (ULSW) pada 11 Agustus 2025.
- Telah dilaksanakan penyusunan rancangan Kepmenko tentang perubahan atau penambahan anggota LNSW karena adanya perubahan nomenklatur kementerian/lembaga yang terkait dengan ekspor, impor, dan logistik.

Analisis Faktor - Faktor Pendukung dan Penghambat

Tercapainya target Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor yang mendukung upaya pencapaian kinerja ini diantaranya adalah:

- Mengawal kolaborasi antara BPJPH dengan Kementerian Agama, dengan pemisahan umum di Kementerian Agama dan Peraturan khusus di BPJPH;
- Mengawal Pembahasan rangkangan Per-BPJPH tentang Tata Niaga Impor Produk Halal Sebagai dasar penyusunan Surat Kesesuaian Kehalalan (SKK) yang perlu ditindaklanjuti lebih detail kembali dalam ketentuan regulasi kehalalalan produk impor yang masuk ke Indonesia;
- Monitoring Implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 sebagai tindak lanjut kejelasan wewenang tugas fungsi ekonomi syariah yang di-lead oleh KNEKS dan OJK untuk dikoordinasikan isu dan program kerja dengan kementerian/lembaga terkait;
- Melakukan pemetaan awal dalam *deep analysis* terkait dengan industri halal
- Mengawal perumusan SKN MEKSI 2025-2029 yang akan digunakan sebagai dasar hukum kerja bersama kementerian/lembaga terkait implementasi *masterplan* ekonomi syariah di Indonesia.
- Memberikan tanggapan/masukan atas dokumen MEKSI 2025-2029 kepada KNEKS sebagai upaya penyempurnaan dokumen *masterplan* tersebut;
- Koordinasi pembahasan Pleno Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Jalan Pengembangan Industri Halal Tahun 2025-2029;
- Telah dilaksanakan pembahasan Unit Layanan Single Window (ULSW) Kementerian Pertanian;
- Telah dilaksanakan rapat koordinasi Dewan Pengarah INSW Tingkat Eselon I yang dilaksanakan pada 2 Juli 2025;
- Sebagai tindak lanjut hasil *Courtesy Visit* dan *Technical Workshop* STM terkait dengan identifikasi HS code untuk barang-barang *dual use item*, konsep pola pengawasan dan perizinan, dan pembahasan terkait kesisteman pada 29 Juli 2025;
- Sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Dewan Pengarah, telah dilaksanakan Rapat Teknis Unit Layanan Single Window (ULSW) pada 11 Agustus 2025;
- Menghadiri pembahasan Survei Studi Nasional UNESCAP-IsDB pada 23 Oktober 2025.

- Menyusun bahan paparan Brief Sheet Ekonomi Syariah untuk Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi pada 20 November 2025.
- Menyusun bahan paparan membangun ekosistem ekonomi islam menuju Indonesia pusat ekonomi islam dunia untuk Menko Perekonomian pada tanggal 24 November 2025.

Pada 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:

- Belum diimplementasikannya secara maksimal regulasi PP no 42 Tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal.
- Adanya perubahan tugas dan fungsi unit kerja di setiap kementerian/lembaga karena adanya perubahan SOTK.
- Perbedaan kapasitas dan kesiapan pelaksanaan program antar K/L dan pemerintah daerah, yang memengaruhi kecepatan dan kualitas implementasi di lapangan.
- Penyusunan peraturan perundang-undangan mencakup multi sektor dan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga terkait, sehingga dibutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan sektor agar selaras dan tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemanfaatan rekomendasi kebijakan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2025 telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, baik sumber daya anggaran, kelembagaan, maupun sumber daya manusia. Rekomendasi kebijakan tersebut menjadi acuan bersama kementerian/lembaga dalam menyelaraskan program, menghindari tumpang tindih kegiatan, serta mengoptimalkan pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Melaksanakan koordinasi dan rapat beberapa tema rapat dalam 1 kesempatan yang sama
2. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
3. Pengumpulan dan sharing data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai.



B.4 CAPAIAN SASARAN PROGRAM PERSENTASE PENYELESAIAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Salah satu instrumen penting dalam memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang berkualitas adalah ketersediaan dan ketuntasan dokumen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

TABEL 3.12 SP 3. Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif							
Sasaran Strategis			Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Kinerja	NSS
Terwujudnya Pemerintahan dengan Standar Nasional	Tata yang	Kelola Sesuia	4.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	100%	100%	100%	100%
% NSS				Memenuhi ekspektasi			

Berdasarkan tabel di atas, Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Sesuai dengan Standar Nasional” terdiri atas satu indikator yaitu “Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan”. Berdasarkan hasil perhitungan Nilai Sasaran Program diperoleh hasil bahwa sasaran program “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Sesuai dengan Standar Nasional” memperoleh nilai sebesar 100%.



B.4.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Latar Belakang

Persentase penyelesaian dokumen penyelenggaraan tata kelola pemerintah merupakan ukuran yang menggambarkan capaian atas penyelesaian dokumen penyelenggaraan tata kelola di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penyelesaian Dokumen Tata kelola merupakan hasil dari proses bisnis sekretariat yang berfokus pada empat bidang utama yakni perencanaan, hukum dan organisasi, umum dan sumber daya manusia dan komunikasi, layanan informasi dan persidangan. Seluruh Dokumen Tata Kelola yang dihasilkan harus mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh instansi pembina. Adapun kriteria yang menunjukkan bahwa dokumen yang dihasilkan telah sesuai dengan standar apabila (1) Format dan Substansi telah sesuai dengan acuan yang digunakan, (2) Dokumen dihasilkan tepat waktu, (3) Dokumen yang mendapatkan sedikit perbaikan dari instansi pembina.

Capaian Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

TABEL 3.13 <i>Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan</i>		
No	Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	2025
A.	Target	100%
B.	Realisasi/Proyeksi Realisasi	100%
Persentase Nilai Capaian		100%

Persentase penyelesaian dokumen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan merupakan kegiatan di level outcome dari agregat kegiatan di level output pada internal business proses di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Biro Komunikasi Layanan dan Informasi dan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama. Berdasarkan tabel di atas, capaian Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan berhasil diraih sebesar 100% dari target.

Kegiatan yang Menunjang Capaian Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Kegiatan yang menunjang capaian target Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pada Tahun 2025 diantaranya:

1. Aspek Manajemen dan Kerja Sama :

- Melakukan Sinkronisasi Renja dan RKA K/L TW IV;
- Melakukan pemutakhiran atas penyusunan Renja 2025;
- Finalisasi RKA-K/L dan Renja TA 2026;
- Penyelenggaraan Rapat Harmonisasi dan Penetapan Rancangan Renstra K/L 2025-2029;
- Pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2025 di lingkup Sekretariat untuk melihat hasil dan kualitas kinerja yang telah dihasilkan pada 2025;
- Penyusunan laporan kinerja triwulan IV tahun 2025;
- Penyusunan laporan kinerja tahun 2025;
- Penyusunan dan permintaan draft Perjanjian Kinerja tahun 2026;
- Melakukan review atas dokumen Rencana Strategis yang telah di susun;
- Mengkoordinasikan penyusunan profil risiko dan petunjuk teknis MRPN LS Topik Pariwisata;
- Melakukan revisi DIPA dengan tujuan pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan strategis dan/atau prioritas pada Triwulan IV TA. 2025;
- Revisi Pemutakhiran POK TA 2025;
- Melakukan pembahasan rincian output baru dan rincian output yang mendukung PN pada tahun 2026;
- Melakukan sosialisasi atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029;
- Koordinasi dengan Mitra Kerja di Bappenas terkait RKP 2026 dan Prioritas Pembangunan Nasional;
- Pelaksanaan Kickoff Meeting evaluasi AKIP Kementerian 2025;
- Pemberitahuan unit kerja melalui ND permintaan penyusunan laporan kinerja triwulan I, II, III dan IV;

- Melaksanakan reviu atas laporan kinerja yang telah disampaikan oleh unit – unit kerja, agar sesuai dengan pedoman teknis pelaporan kinerja;
- Pelaksanaan koordinasi yang baik antara Sekretariat dengan unit-unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian;
- Pelaksanaan penyusunan matriks tindaklanjut atas penyusunan indikator kinerja tahun 2025;
- Meningkatkan ukuran ruang penyimpanan atas dokumen data dukung pelaksanaan kinerja yang terselesaikan;
- Menyusun draft konsep kinerja dan mensosialisasikan kepada PIC unit kerja agar dapat meningkatkan pemahaman dalam menyusun kinerja;
- Menyusun Nota Dinas permintaan penyusunan laporan kinerja TW IV;
- Melaksanakan koordinasi eksternal dengan Kementerian/Lembaga terkait harmonisasi dan koordinasi isu-isu terkait;
- Melaksanakan rapat pimpinan dalam mengevaluasi kinerja tahun 2025 dan menerapkan program penting arahan presiden langsung yang akan dibawa pada Kinerja 2026;
- Melaksanakan sosialisasi dan permintaan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025;
- Melaksanakan rapat bersama dengan seluruh unit kerja untuk penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2026;
- Telah dilakukan pengumpulan data melalui benchmarking dengan peraturan Standar Kebijakan pada Kementerian/Lembaga lain yang sudah terimplementasi dengan baik dan melakukan identifikasi keluaran kebijakan yang sudah diimplementasikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Telah dilakukan penyelarasan pedoman standar keluaran kebijakan dengan pokok-pokok untuk menunjang pencapaian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Indeks Kualitas Kebijakan;
- Telah dilakukan penyelarasan keterkaitan Pedoman SKK dengan peraturan perundang-undangan terkait sebagai dasar penyusunan;
- Telah dilakukan pembahasan draft/rancangan standar keluaran kebijakan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Telah dilakukan konsultasi internal dan eksternal untuk memperkaya substansi pedoman, menerapkan nilai partisipatif pemangku kepentingan dan akuntabilitas proses;

2. Aspek Umum dan Sumber Daya Manusia.

- Pemberian konsultasi baik secara formal maupun informal melalui *direct* ataupun media telekomunikasi;
- Penyelesaian masalah terkait layanan SDM dengan cara mengedepankan ketentuan hukum dan prinsip keadilan;
- Rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan akuntansi keuangan;
- Melaksanakan rekonsiliasi internal dengan UAKPB;
- Rekonsiliasi dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan;
- Pelaksanaan kegiatan pemberkasan arsip pada aplikasi SRIKANDI dilakukan rutin selama 1 tahun pada seluruh unit pengolah di lingkungan Kemenko Perekonomian;
- Monitoring dan evaluasi implementasi SRIKANDI dilakukan dengan memberikan edaran kepada seluruh pegawai agar aktif menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam kegiatan persuratan;

- Pendampingan dan coaching klinik pencatatan non e-tendering, non e-purchasing, dan SIRUP;
- Pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM pengelola PBJ dengan kegiatan pengangkatan CPNS JF PBJ Ahli Pertama dijadwalkan pada triwulan II TA 2026;

3. Aspek Hukum dan Organisasi:

- Penyelesaian permohonan penyusunan rancangan perundang-undangan sebanyak 290 permohonan yang terdiri dari 131 Peraturan perundang -undangan yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian dan 159 Peraturan Perundang-undangan tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Melaksanakan bantuan hukum atau advokasi hukum sebanyak 12 permohonan;
- Penetapan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam bentuk Sesmenko No. 33/2025;
- Analisis evaluasi struktur organisasi yang baru;
- Evaluasi kebutuhan pegawai dan jabatan;
- Penyusunan konsep standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi dan administrasi;
- Melaksanakan sejumlah diskusi terkait kebijakan tenaga pendukung tahun 2026;
- Memberikan reviu atas usulan dari unit kerja terkait uraian tugas jasa lainnya;
- Melakukan pendampingan penyesuaian formasi/kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
- Melakukan pengembangan dan pembahasan bersama dengan perwakilan dari seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian terkait konsep SOP Koordinasi Data/Informasi Tata Kelola di lingkungan Deputi atas inisiatif unit kerja serta atas permintaan Sekretariat Kementerian/Inspektorat;
- Melakukan asistensi pengembangan dan penyusunan konsep SOP yang dibutuhkan dalam membentuk Standar Pelayanan di lingkungan Kemenko Perekonomian;
- Melakukan asistensi penyusunan, pembahasan dan finalisasi konsep SOP Layanan Kesehatan;
- Melakukan pengembangan peta proses bisnis melalui SIA SPBE;
- Pemenuhan bukti dukung rencana aksi RB General dan Tematik, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tersebut dari triwulan I sampai dengan IV;

4. Aspek Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan:

- Melaksanakan fasilitasi penyusunan naskah Menteri sesuai dengan permintaan kegiatan hingga TW IV ini telah difasilitasi 191 dokumen dalam 3 paket dokumen. Seluruhnya selesai paling lambat 1 jam sebelum pelaksanaan;
- Menyediakan naskah kepada Menteri Kemenko Perekonomian yang di sampaikan tepat waktu minimal 1 jam sebelum kegiatan berlangsung;
- Monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun dokumen strategi komunikasi;
- Penyusunan dokumen strategi komunikasi Kemenko Perekonomian;
- Melalui mekanisme PPID telah dilaksanakan : (1) Pemenuhan permohonan informasi publikasi; (2) Penyediaan layanan pengajuan keberatan atas informasi public; dan (3) Penyediaan layanan pengajuan sengketa atas informasi publik;

Analisis Faktor - Faktor Pendukung dan Penghambat

Capaian Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan pada Tahun 2025 didukung oleh serangkaian upaya terencana dan terkoordinasi yang dilaksanakan secara konsisten melalui penguatan proses bisnis, peningkatan kualitas koordinasi, serta optimalisasi sumber daya di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diantaranya:

- **Proses bisnis sekretariat yang terstruktur dan terintegrasi**, mencakup bidang perencanaan, hukum dan organisasi, umum dan SDM, serta komunikasi dan layanan informasi, sehingga penyusunan dokumen tata kelola dapat dilakukan secara sistematis.
- **Penguatan koordinasi internal dan eksternal**, baik antarunit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian maupun dengan K/L mitra seperti Bappenas, yang memastikan keselarasan dokumen dengan prioritas pembangunan nasional.
- **Pelaksanaan evaluasi dan reviu kinerja secara berkala**, termasuk evaluasi AKIP, reviu laporan kinerja, serta penyusunan matriks tindak lanjut indikator kinerja, yang meningkatkan kualitas dan ketepatan dokumen tata kelola.
- **Dukungan regulasi dan kebijakan internal yang memadai**, melalui penyusunan dan penyelarasan Renstra, Perjanjian Kinerja, SOP, serta standar keluaran kebijakan yang menjadi acuan penyusunan dokumen.
- **Peningkatan kapasitas dan pendampingan SDM**, melalui konsultasi teknis, coaching clinic, serta persiapan sertifikasi jabatan fungsional yang mendukung ketepatan dan kualitas penyusunan dokumen.
- **Pemanfaatan sistem pendukung tata kelola**, seperti SRIKANDI dan SIA SPBE, yang membantu ketertiban arsip, kelengkapan data dukung, serta transparansi proses administrasi.

Adapun hambatan dalam pencapaian Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan pada Tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memengaruhi ketepatan waktu dan kualitas penyusunan dokumen, yaitu sebagai berikut:

- Proses Harmonisasi pembahasan rancangan peraturan yang panjang dan berdampak pada waktu penyelesaian dokumen tata kelola.
- Kebijakan RO khusus direktif presiden yang perlu ditambahkan pada Renja dan DIPA 2026 pasca penetapan DIPA awal 2026.
- Surat Menteri Keuangan nomor S-666/MK.03/2025 tanggal 21 Oktober 2025, mempercepat batas waktu revisi kewenangan Kementerian Keuangan dan Pemutakhiran POK 2025 yang semula di tanggal 23 menjadi 12 Desember 2025.
- Koordinasi lintas unit membutuhkan waktu lebih lama dari rencana.
- Masih minimnya SDM PBJ yang menghambat penyelesaian dokumen pengadaan barang dan jasa.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan penyusunan dan penyelesaian dokumen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan pada Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, waktu, maupun sarana pendukung. Efisiensi tersebut tercermin dari kemampuan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengelola volume pekerjaan yang tinggi dan

kompleksitas dokumen lintas bidang melalui penguatan proses bisnis yang terintegrasi diantaranya:

1. Koordinasi dan harmonisasi dilakukan secara terpadu, baik internal maupun eksternal, sehingga proses pengambilan keputusan dan penyelesaian dokumen dapat dipercepat meskipun terdapat dinamika kebijakan.
2. Melaksanakan rapat koordinasi beberapa unit kerja dalam 1 kesempatan yang sama.
3. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan atau *workshop*.



B.5 CAPAIAN SASARAN PROGRAM TERWUJUDNYA LAYANAN PRIMA YANG BERKUALITAS

Pelayanan prima dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan dalam memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan dengan baik dan terukur sehingga dapat memenuhi ekspektasi pelanggan.

TABEL 3.14 SP Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas					
Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Kinerja	NSS
Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas	5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	3 dari 4	3,54	118%	118%
% NSS					Memenuhi ekspektasi

Pelayanan yang prima bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada unit kerja lainnya sebagai pelanggan dan sebagai dasar acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan. Salah satu ukuran keberhasilan dalam menyajikan pelayanan prima sangat tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan atau dalam hal ini adalah unit kerja ke deputian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Indikator ini diukur melalui pelaksanaan survei layanan kepada unit kerja lain. Setelah dilakukan survei layanan Sekretariat kepada unit kerja lain, maka akan diperoleh nilai rata-rata realisasinya dengan poin 3,56 yang mengindikasikan bahwa indeks kepuasan layanan Sekretariat. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mampu mewujudkan pelayanan prima dan sasaran strategis yang diharapkan telah berhasil diwujudkan.



B. 5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat

Latar Belakang

Salah satu Indikator Kinerja Utama Sekretariat adalah Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat yang diukur melalui Survei Kepuasan Layanan Sekretariat dengan responden para pejabat atau pegawai pada unit kerja lainnya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Layanan Sekretariat adalah layanan yang diberikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian kepada Kedeputan terkait pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sekretariat Kemenko Perekonomian juga menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam:

- Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perekonomian
- Pembinaan dan pemberian dukungan administratif meliputi ketatausahaan, SDM, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, humas, arsip
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- Pengelolaan data dan informasi
- Pelaksanaan fungsi lainnya

Indikator kepuasan layanan Sekretariat mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan manajemen yang diberikan oleh Sekretariat kepada Kedeputan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Kemenko Perekonomian. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu :

- Aspek Ketanggapan dalam layanan (Responsiveness);
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan
- Aspek Keandalan dalam layanan (Reability);
Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan
- Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (Tangible);
Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan
- Aspek Kepastian dalam Layanan (Assurance);
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman
- Aspek Sikap dalam Layanan (Emphaty)

Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

- Sangat Tidak Puas
- Tidak Puas
- Puas
- Sangat Puas.

Capaian Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat

TABEL 3.15 IKU Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat 2025

No	Nilai Indeks Kepuasan	2022	2023	2024	2025
A.	Target	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
B.	Realisasi/Proyeksi Realisasi	4 dari 4	4 dari 4	4 dari 4	4 dari 4
Capaian Kategori Kepuasan		120%	120%	120%	120%

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian pada Tahun 2025 adalah 4 dari 4 atau Sangat Puas. Realisasi Kinerja Kepuasan Layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan sebesar 3 dari 4 atau kategori PUAS. Capaian kinerja di tahun 2025 yaitu 120% atau melebihi ekspektasi yang diharapkan.

Pelaksanaan survey layanan Sekretariat dilakukan secara online melalui tautan <https://bit.ly/LayananSekre2025> yang disebarkan kepada unit kerja kedeputan. Pengukuran survei bertujuan untuk mengukur realisasi layanan Sekretariat yang diukur melalui 5 (lima) aspek, yaitu Responsiveness, Emphaty, Reability, Tangible, dan Assurance. Indeks kepuasan layanan Sekretariat diperoleh dari total seluruh nilai layanan yang meliputi : (1) Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, (2) Layanan Hukum dan Organisasi, (3) Layanan Komunikasi, Layanan informasi dan persidangan, dan (4) Layanan Umum dan Sumber Daya Manusia.

Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian Semester I Tahun 2025 adalah 4 dari 4 atau Sangat Puas. Pada semester II, indeks kepuasan layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian adalah 4 dari 4 atau Sangat Puas. Nilai layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian tahun 2025 merupakan agregat dari nilai di Semester I dan II, sehingga nilai layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian tahun 2025 adalah 4 dari 4 atau Sangat PUAS.

Kegiatan yang dapat Menunjang Capaian Target

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat diperoleh dari total seluruh nilai indeks Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Layanan Biro Hukum & Organisasi, Layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, dan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan yaitu mengevaluasi tingkat kepuasan dari layanan yang diberikan kepada seluruh unit-unit kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Perekonomian dalam mendukung kemajuan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan unit kerja sehingga Nilai Indeks ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas layanan Sekretariat dimasa depan pada area Responsive, Reability, Tangible, Assurance, dan Emphaty. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang perekonomian telah melakukan beberapa hal yang dianggap dapat membantu pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan, yakni :

1. Pelaksanaan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai;
Salah satu tujuannya yaitu guna meningkatkan kualitas sumber daya aparatur untuk meningkatkan kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan, peningkatan pendidikan formal dan meningkatkan keterampilan teknik dan fungsional aparatur pemerintah.
2. Penguatan layanan hukum;
Persentase penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pelaksanaan Advokasi Hukum, serta Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Menyusun analisis dan kajian terhadap kebijakan di bidang perekonomian;
Tujuannya yaitu memberikan informasi yang bersifat deskriptif, evaluatif, atau preskriptif pada suatu masalah publik. Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kualitas kebijakan publiknya.
4. Memanfaatkan aplikasi/sistem berbasis web yang telah dikelola Kemenko Perekonomian dengan optimal, guna kemudahan bekerja yang saat ini lebih banyak menggunakan teknologi informasi yang dapat diakses dengan cepat dan dimana saja.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pengisian capaian output melalui aplikasi E-Monev dan SMART DJA setiap bulan yang dilakukan di awal bulan berikutnya. Dengan melakukan monitoring setiap bulan, maka jika terdapat permasalahan diawal, dapat dipecahkan bersama-sama.
6. Melakukan mentoring dengan pihak Kemenpan RB atas catatan hasil evaluasi SAKIP 2024 yang dijadikan sebagai pedoman perbaikan di tahun 2025.
Untuk menghasilkan SAKIP yang semakin baik setiap tahunnya, maka kami melakukan mentoring dengan pihak Kemenpan RB secara berkala dengan meminta masukan dan arahan dalam penyusunan dokumen terkait kinerja dan SAKIP.
7. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan audit dengan Auditor BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2024.
8. Rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Pembahasan atas konsep laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan TA 2024 menyusun tanggapan serta laporan keuangan audit TA 2024.
9. Dukungan pelaksanaan kegiatan Kemenko Perekonomian;
Bagian Rumah Tangga turut serta dalam dukungan sarana dan prasarana seperti alat zoom, mic dan speaker, TV, dukungan teknisi di lapangan untuk persiapan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan kantor Kemenko Perekonomian atau di luar kantor.
10. Persiapan proses pengadaan yang akan dilaksanakan di TA 2023;
Proses pengadaan untuk mendukung pelayanan kerumahtanggaan telah terlaksana.
11. Pengelolaan Arsip
Dalam hal optimalisasi pengelolaan arsip Kemenko Bidang Perekonomian, asistensi/pendampingan dilakukan kepada seluruh central file/unit pengolah di Kemenko Bidang Perekonomian.

12. Implementasi SRIKANDI

Dalam hal implementasi aplikasi SRIKANDI, percepatan implementasi dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

13. Koordinasi Pelaksanaan Penyiapan Perencanaan, Penyiapan Undangan dan Konfirmasi serta Bahan Rapat Koordinasi Menteri, Rapat Kelompok Kerja dan Forum Koordinasi serta Rapat Pimpinan Kemenko Bidang Perekonomian
14. Pelaksanaan koordinasi Penataan, Rekaman, Kompilasi, Distribusi Bahan dan Daftar Hadir, Penyusunan Transkripsi, Notulensi/ Risalah, Rapat Koordinasi Menteri, Rapat Kelompok Kerja dan Forum Koordinasi serta Rapat Pimpinan Kemenko Bidang Perekonomian yang baik

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat kepuasan Layanan Sekretariat

Tercapainya target Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor yang mendukung upaya pencapaian kinerja ini diantaranya adalah:

1. Zoom meeting mampu mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekretariat.
2. Perhatian segenap pimpinan dan pejabat di lingkungan Sekretariat untuk senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada unit kerja baik layanan manajemen kinerja dan kerja sama; layanan hukum dan organisasi; layanan umum dan sumber daya manusia; maupun layanan komunikasi, informasi, dan persidangan.
3. Ketanggapan dalam pelayanan dan kesesuaian informasi yang diberikan oleh setiap pegawai di lingkungan Sekretariat mampu mendorong peningkatan kepuasan layanan yang diberikan.

Pada Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:

- 1) Keterbatasan jumlah SDM pada waktu tertentu, dan tingkat pemahaman SDM terhadap kebijakan atau regulasi yang belum merata;
- 2) Keterbatasan kapasitas infrastruktur sarana dan prasarana layanan;
- 3) Terdapat perubahan atas beberapa kebijakan yang ditetapkan, sehingga diperlukannya penyesuaian program kerja yang telah ditetapkan;

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan pencapaian target Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat tahun 2025, telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Penggunaan aplikasi via Zoom untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam forum rapat sehingga memberikan ruang kepada seluruh peserta rapat untuk dapat mengikuti acara yang telah direncanakan;
2. Penggunaan aplikasi penyimpanan berbasis Cloud, seperti Gdrive;
3. Penggunaan aplikasi dalam pelaporan dan pengukuran laporan kinerja;
4. Koordinasi antar layanan untuk meningkatkan keahaman dan keselarasan dalam menyelesaikan laporan.

Pelaksanaan pencapaian IKU Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat sepanjang Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan tingkat efektivitas yang optimal. Meskipun terdapat kebijakan self blocking/automatic adjustment anggaran, seluruh kegiatan strategis dan target kinerja tetap dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan rencana. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil.



B.6 CAPAIAN SASARAN PROGRAM TERWUJUDNYA TATA KELOLA SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN YANG BAIK

TABEL 3.16 SP Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Kinerja	NSS
Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	6.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat	85%	103%	120%	120%
% NSS					Memenuhi ekspektasi

Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang baik merupakan sasaran strategis pada level Sekretariat (Eselon I). Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan probis yang berfokus pada Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian yang efektif di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik. Sasaran strategis ini, untuk bertujuan memastikan bahwa Unit Sekretariat Kementerian telah menerapkan prinsip dari Good Governance yang efektif, transparan dan akuntabel dalam setiap proses kerja.



B. 6.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan persentase keterlaksanaan rencana aksi yang sudah ditetapkan dan tercermin pada pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat. Adapun penilaian indikator ini merupakan agregat dari nilai persentase pelaksanaan RB di level Eselon (Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum dan Organisasi, dan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, dan Unit Inspektorat).

Capaian Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat

TABEL 3. 17 *IKU Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat 2025*

No	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat	2025
A.	Target	85%
B.	Realisasi/Proyeksi Realisasi	103%
Persentase Nilai Capaian		120%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat telah tercapai dan melebihi target yaitu sebesar 103%, sehingga capaiannya adalah sebesar 120%. Pada tahun sebelumnya belum terdapat target dan capaian Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat dikarenakan indikator Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat merupakan indikator baru di tahun 2025.

Kegiatan yang dapat Menunjang Capaian Target

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat dihitung berdasarkan jumlah agregat dari persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik di level Eselon II di lingkungan Sekretariat (Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama; Biro Hukum dan Organisasi; Biro Umum dan Sumber Daya Manusia; dan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, dan Unit Inspektorat). Selama tahun 2025, dalam pencapaian Persentase Pelaksanaan RB Sekretariat, disampaikan sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja beserta lampiran Rencana Aksi dan Manual IKU;
2. Melakukan penyusunan narasi kinerja secara berkala;
3. Menyusun rencana kerja;
4. Optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI;
5. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran;
6. Monitoring dan evaluasi pencatatan SIRUP;
7. Penyusunan laporan capaian rencana aksi output prioritas nasional;
8. Penyusunan bahan materi rapat evaluasi dan perencanaan program tingkat pimpinan;
9. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan;
10. Pemanfaatan aplikasi e-Kinerja BKN yang sudah digunakan untuk pengelolaan kinerja di Kemenko Perekonomian;
11. Tersusunnya kertas kerja penilaian mandiri SPIP;
12. Pelaksanaan rapat penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) RB;
13. Penyusunan LHEI RB;
14. Menyusun matriks tindak lanjut rekomendasi BPK;
15. Penyusunan matriks manajemen risiko;

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat

Tercapainya target Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor yang mendukung upaya pencapaian kinerja ini diantaranya adalah:

1. Melakukan penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat.
2. Perhatian segenap pimpinan dan pejabat di lingkungan Sekretariat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat.
3. Melakukan pengukuran dan pelaporan rencana aksi di Lingkungan Sekretariat secara periodik melalui sistem Simersi.

Pada Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:

- 1) Diperlukan peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan rencana aksi;
- 2) Diperlukan optimalisasi penggunaan SRIKANDI di unit kerja Sekretariat;
- 3) Diperlukan adaptasi kebijakan PKO;

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat tahun 2025, telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Penggunaan aplikasi via Zoom untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam forum rapat sehingga memberikan ruang kepada seluruh peserta rapat untuk dapat mengikuti acara yang telah direncanakan;
2. Penggunaan aplikasi penyimpanan berbasis Cloud, seperti Gdrive;
3. Penggunaan aplikasi dalam pelaporan dan pengukuran RB;
4. Koordinasi antar layanan untuk meningkatkan pemahaman dan keselarasan dalam menyelesaikan laporan.

Pelaksanaan pencapaian IKU Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat sepanjang Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan tingkat efektivitas yang optimal. Meskipun terdapat kebijakan self bloking/automatic adjustment anggaran, seluruh kegiatan strategis dan target kinerja tetap dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan rencana. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

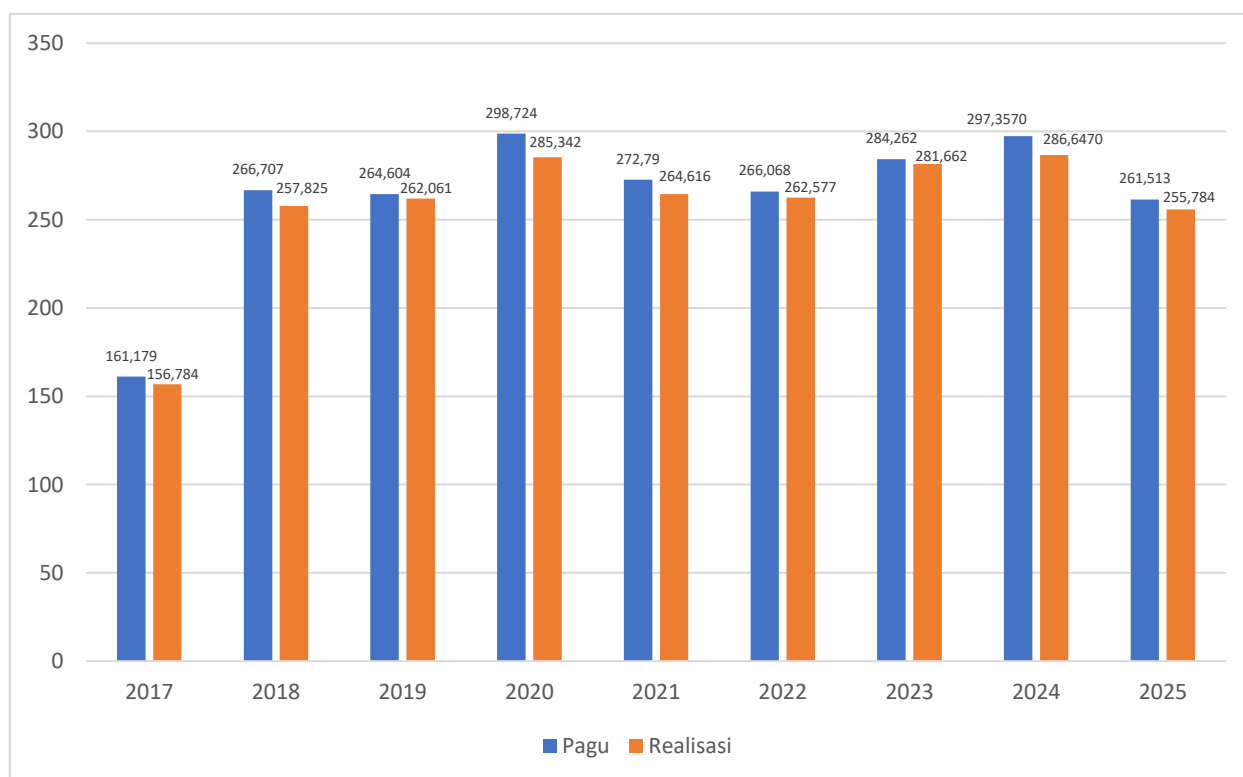
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kinerja Keuangan

Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami pemblokiran pada Tahun 2025 dari Rp 307,250,391,000,- menjadi Rp 261,513,294,000,-. Sehingga, total pagu yang dikelola oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada Tahun 2024 yang sebesar Rp. 297,356,971,000,-. Realisasi Belanja Sekretariat pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp.255,783,510,808,- atau mencapai 97,81% dari alokasi anggaran. Tingkat penyerapan anggaran tahun ini lebih tinggi dari pada tahun lalu yang hanya sebesar 96,40%.

GRAFIK 3.2 RINCIAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA



Realisasi Anggaran dan Capaian per Kegiatan Tahun 2025

Pemetaan rincian realisasi anggaran yang mendukung capaian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2025, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.18 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA (OUTPUT) KEGIATAN

Sasaran Program	Nama Kegiatan	Pagu Setelah Blokir (Rp.)	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Capaian Kinerja
2. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Rp. 12.926.769.000	Rp. 12.480.223.237	96,55%	102,64%
3. Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas	Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi	Rp. 1.897.237.000	Rp. 1.895.983.472	99,93%	100,72%
4. Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai	Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan	Rp. 5.561.883.000	Rp. 5.555.543.490	99,89%	103,67%
	Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Umum	Rp. 217.491.618.000	Rp. 213.790.422.725	98,30%	108,30%
	Pengawasan Inspektorat	Rp. 891.453.000	Rp. 884.257.393	99,19%	104,40%
Pelaksanaan Harmonisasi Kebijakan	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian (Staff Ahli)	Rp. 1.696.774.000	Rp. 1.638.153.403	96,55%	100%
	Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (PKE)	Rp. 11.474.225.000	Rp. 10.095.256.240	87,98%	100%
	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	Rp. 2.343.854.000	Rp. 2.341.505.748	99,90%	100%
	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	Rp. 7.229.481.000	Rp. 7.102.165.100	98,24%	100%
Total		Rp. 261.513.294.000	Rp. 255.783.510.808	97,81%	

Sumber: Pagu dan Realisasi Anggaran per (Output) Kegiatan Tahun 2025

Penggunaan anggaran ini direalisasikan dengan beberapa belanja barang dan jasa seperti koordinasi kegiatan atau kebijakan yang membutuhkan tempat yang cukup luas dengan sewa

meeting room, pemenuhan fasilitas kantor untuk menunjang kinerja yang lebih efektif dan efisien, upah pegawai dan narasumber, sewa jasa pihak ketiga untuk peningkatan fungsi sistem informasi yang memudahkan kerja.

Adapun realisasi anggaran dari setiap kegiatan-kegiatan diatas dapat diturunkan dalam beberapa penjelasan tabel berikut:

Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi

TABEL 3.19 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM & ORGANISASI

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025	Realisasi 2025 (Bruto)
<i>Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Hukum dan Organisasi</i>		1,897,237,000	1,896,523,472
<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	3 Layanan	1,406,566,000	1,405,980,248
Layanan Hukum I	1 Layanan	503,446,000	503,194,074
Layanan Hukum II	1 Layanan	433,975,000	433,653,001
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	469,145,000	469,133,173
<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	1 Dokumen	490,671,000	490,543,224
Layanan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	490,671,000	490,543,224

Peningkatan Pelayanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

TABEL 3.20 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PENINGKATAN PELAYANAN MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025	Realisasi 2025 (Bruto)
<i>Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama</i>		12,926,769,000	12,480,223,237
<i>Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan</i>	4 Rekomendasi Kebijakan	546,060,000	506,886,484
Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Perekonomian	4 Rekomendasi Kebijakan	546,060,000	506,886,484
<i>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2 Unit	8,561,085,000	8,358,723,530
Layanan Sarana Sistem Informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2 Unit	8,561,085,000	8,358,723,530
<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	1 Layanan	1,630,000,000	1,567,377,567
Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1,630,000,000	1,567,377,567
<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	15 Dokumen	2,189,624,000	2,047,235,656
Layanan Fasilitasi Penguatan Kinerja	6 Dokumen	962,640,000	955,489,607

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025	Realisasi 2025 (Bruto)
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9 Dokumen	1,226,984,000	1,091,746,049

Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan

TABEL 3.21 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PENINGKATAN PELAYANAN KOMUNIKASI, INFORMASI, & PERSIDANGAN

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025	Realisasi 2025 (Bruto)
<i>Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan</i>		5,561,883,000	5,555,543,490
<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	2 Layanan	310,644,000	309,610,711
Layanan Kegiatan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1 Layanan	207,687,000	207,491,261
Layanan Penyiapan Naskah Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1 Layanan	102,957,000	102,119,450
Komunikasi Publik	2 Layanan	5,251,239,000	5,245,932,779
Layanan Manajemen Strategi dan Publikasi	1 Layanan	3,747,365,000	3,745,816,549
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	1,503,874,000	1,500,116,230

Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Umum

TABEL 3.22 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PENINGKATAN PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025	Realisasi 2025 (Bruto)
<i>Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia</i>		217,491,618,000	213,844,251,320
<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	4 Layanan	210,702,256,000	207,110,720,484
Layanan Protokoler	1 Layanan	1,199,931,000	628,605,145
Layanan Umum	1 Layanan	2.367.760.000	1,184,976,950
Layanan Perkantoran	2 Layanan	208,871,522,000	205,297,138,389
<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>	37 Paket	4,784,980,000	4,775,971,500
Layanan Sarana Internal	37 Paket	4,784,980,000	4,775,971,500
<i>Layanan Manajemen SDM Internal</i>	750 Orang	1,636,546,000	1,598,672,734
Layanan Manajemen SDM	750 Orang	1,636,546,000	1,598,672,734
<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	1 Dokumen	367,836,000	358,886,602
Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	367,836,000	358,886,602

Pengawasan Inspektorat

TABEL 3.23 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PENGAWASAN INSPEKTORAT

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025	Realisasi 2025 (Bruto)
<i>Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai</i>		891,453,000	884,257,393
<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	10 Dokumen	891,453,000	884,257,393
Layanan Audit Internal	10 Dokumen	891,453,000	884,257,393

Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian

TABEL 3.24 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PENELAAHAN KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025	Realisasi 2025 (Bruto)
<i>Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis yang Berkualitas</i>		1,696,774,000	1,638,220,403
<i>Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan</i>	5 Rekomendasi Kebijakan	1,696,774,000	1,638,220,403
Rekomendasi Kebijakan atas isu-isu strategis di bidang Regulasi, Penegak Hukum, dan Ketahanan Ekonomi	2 Rekomendasi Kebijakan	295,772,000	248,880,046
Rekomendasi Kebijakan atas isu-isu strategis di bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam	2 Rekomendasi Kebijakan	558,351,000	555,589,223
Rekomendasi Kebijakan atas isu-isu strategis di bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia	2 Rekomendasi Kebijakan	24,380,000	24,246,000
Rekomendasi Kebijakan atas isu-isu strategis di bidang Pembangunan Daerah	2 Rekomendasi Kebijakan	510,291,000	503,616,807
Rekomendasi Kebijakan atas isu-isu strategis di bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi	2 Rekomendasi Kebijakan	307,980,000	305,888,327

Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi

TABEL 3.25 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025	Realisasi 2025 (Bruto)
<i>Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas</i>		7,229,481,000	7,102,165,100

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025	Realisasi 2025 (Bruto)
<i>Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan</i>	4 Rekomendasi Kebijakan	7,229,481,000	7,102,165,100
Rekomendasi Implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	2 Rekomendasi Kebijakan	7,024,186,000	6,925,010,034
Rekomendasi Kebijakan Percepatan Implementasi Jaminan Produk Halal	2 Rekomendasi Kebijakan	205,295,000	177,155,066

Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi

TABEL 3.26 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PERCEPATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025	Realisasi 2025 (Bruto)
<i>Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas</i>		11,474,225,000	10,120,268,265
<i>Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan</i>	4 Rekomendasi Kebijakan	11,474,225,000	10,120,268,265
Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Efektifitas Kebijakan Ekonomi	2 Rekomendasi Kebijakan	4,690,950,000	4,341,470,048
Rekomendasi Kebijakan Penguatan Hubungan Diplomasi Strategis	2 Rekomendasi Kebijakan	6,783,275,000	5,778,798,217

Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja

TABEL 3.27 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN KEBIJAKAN CIPTA KERJA

Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025	Realisasi 2025 (Bruto)
<i>Terwujudnya Dukungan Koordinasi Cipta Kerja yang Efektif</i>		2,343,854,000	2,343,643,248
<i>Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM</i>	2 Rekomendasi Kebijakan	2,343,854,000	2,343,643,248
Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	2 Rekomendasi Kebijakan	2,343,854,000	2,343,643,248

Dari realisasi pelaksanaan anggaran pada Tahun 2025 data per 31 Desember 2025 tersebut, menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran berbanding lurus dengan Capaian Kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran tahun 2025 sudah cukup efektif dan mendukung pencapaian kinerja.

Keselarasan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memiliki keselarasan yang kuat antara anggaran dan kinerja, sehingga pada tabel di bawah ini dapat terlihat realisasi anggaran selaras dengan capaian kinerja.

Tabel 3.28 Tabel realisasi dan capaian kinerja

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja				
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
SS.6	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas								
IKS.6.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian								
	SP.33	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing							
	IKP.33.1	Nilai Reformasi Birokrasi General							
	SK	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Memadai							
	IKK	Tingkat Maturitas SPIP	891,453,000	884,257,393	99.19%	3,58	3,886	108,55%	
	IKK	Tindak lanjut Rekomendasi BPK				75%	85,78%	114,37%	
	IKK	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas				0,50	N/A	N/A	
	IKK	Opini BPK				WTP	WTP	100%	
	IKK	Survey Penilaian Integritas (SPI)				82	81,77	99,72%	
	IKK	Tingkat Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)				3	N/A	N/A	
	IKK	Nilai Kapabilitas APIP (IACM)				3,27	3,28	100,31%	
		RO REVISI Layanan Audit Internal							
		SK	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama						
		IKK	Nilai AKIP	12,926,769,000	12,480,223,237	96.55%	73,5	73,5*	100
		IKK	Indeks Kualitas Kebijakan				95%	95%	100%
		IKK	Indeks SPBE				3,9	4,00	102,56%
IKK		Indeks Perencanaan	97%				97%*	100%	
IKK		Capaian Prioritas Nasional	100%				100%	100%	
IKK		Capaian Indikator Kinerja Utama	100%				100%	100%	
IKK		Nilai Kinerja Anggaran	>90				>90*	100%	
		RO Revisi Layanan Data dan Informasi							
		RO Revisi Layanan Fasilitas Penguatan Kinerja							
		RO Revisi Layanan Perencanaan dan Penganggaran							
		RO Revisi Layanan Sarana Sistem Informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian							
		RO Revisi Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Perekonomian							
	SK	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Hukum dan Organisasi							



Uraian		Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	IKK Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	1,897,237,000	1,895,983,472	99.93%	100%	100%	100%
	IKK Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi				100%	100%*	100%
	IKK Tingkat Capaian Sistem Kerja				5	5 dari skala 5	100%
	IKK Indeks Reformasi Hukum				90	98,10	109%
	RO Revisi Layanan Hukum Bidang Ekonomi Makro, Fiskal PNB, Pengembangan Usaha BUMN, ESDM, Hilirisasi Pertanian, Perniagaan, Industri, Investasi, Sekretariat Kementerian, dan Inspektorat						
	RO Revisi Layanan Hukum Bidang Ekonomi Digital, Fiskal Pajak, Ketenagakerjaan, Kerja Sama Ekonomi, Pariwisata, Pengembangan Kawasan Ekonomi, dan Proyek Strategis						
	RO Revisi Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal						
	RO Revisi Layanan Reformasi Birokrasi						
	SK	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia					
	IKK Indeks Penyelenggaraan Arsip	217,491,618,000	213,790,422,725	98.30%	90	98,42	109,4%
	IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)				Baik	Baik	100%
	IKK Indeks Pengelolaan Aset				100%	100%	100%
	IKK Indeks NSPK Manajemen ASN				Baik	Baik	100%
	IKK Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa				85	75,76	89,12%
	RO Revisi Layanan Umum						
	RO Revisi Layanan Protokoler						
	RO Revisi Layanan Perkantoran						
	RO Revisi Layanan Sarana Internal						
	RO Revisi Layanan Manajemen SDM						
	RO Revisi Layanan Manajemen Keuangan						
IKP.33.2	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik						
	SK	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan					
	IKK Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator di Bidang Perekonomian di Media Massa	5,561,883,000	5,555,543,490	99.89%	>70	81,28	116%
	IKK Persentase Penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi Tepat Waktu				90%	100%	100%
	RO Revisi Layanan Manajemen Strategi dan Publikasi						
	RO Revisi Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi						
	RO Revisi Layanan Kegiatan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian						



Uraian			Belanja			Capaian Kinerja			
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
		RO Revisi Layanan Penyediaan Naskah Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian							
SS.4	Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas								
IKS.4.1	Indeks Efektivitas sinkronisasi,koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian								
	SP.21	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif							
	IKP.21.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan							
		SK	Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif						
		IKK	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Ditindaklanjuti	11,474,225,000	10,095,256,240	87.98%	90%	90%	100%
		RO Revisi Rekomendasi koordinasi kebijakan percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi							
	SK	Terwujudnya Dukungan Koordinasi Cipta Kerja yang Efektif							
	IKK	Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut terkait Undang-Undang Cipta Kerja	2,343,854,000	2,341,505,748	99.90%	95%	95%	100%	
		RO Revisi Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja							
	SP.27	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis yang Berkualitas							
	IKP.27.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis di Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi yang diterima Menko Perekonomian	295,772,000	248,880,046	84.15%	100%	100%	100%	
		RO Revisi Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang regulasi,penegakan hukum dan ketahanan ekonomi							
	SP.28	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis yang Berkualitas							
	IKP.28.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis di Bidang Pembangunan Daerah yang diterima Menko Perekonomian	510,291,000	503,616,807	98.69%	100%	100%	100%	
		RO Revisi Rekomendasi kebijakan atas isu-isu strategis di bidang pembangunan daerah							
	SP.29	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis yang Berkualitas							
	IKP.29.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis di Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa yang Diterima Menko Perekonomian	558,351,000	555,589,223	99.51%	100%	100%	100%	
		RO Revisi Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Konektivitas, pengembangan jasa dan SDA							
	SP.30	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis yang Berkualitas							
	IKP.30.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis di	24,380,000	24,246,000	99.45%	100%	100%	100%	

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Bidang Tranformasi digital, kreativitas dan SDM yang Diterima Menko Perekonomian						
	RO Revisi Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Tranformasi digital, kreativitas dan SDM						
SP.31	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis yang Berkualitas						
IKP.31.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis di Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang diterima Menko Perekonomian	307,980,000	305,888,327	99.32%	100%	100%	100%
	RO Revisi Rekomendasi kebijakan atas isu-isu strategis di bidang produktivitas dan daya saing						
SS.1	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan						
IKS.1.4	Rasio PDB Industri Pengolahan						
SP.8	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas						
IKP.8.2	Pengeluaran Perkapita laki - laki dan Perempuan						
	SK	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas					
	IKK	Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki - Laki dan Perempuan	7,229,481,000	7,102,165,100	98.24%	70%	70%
	RO Revisi Rekomendasi Koordinasi kebijakan pemerataan ekonomi						

Ket: *Nilai Proyeksi

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat keselarasan antara anggaran dan capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan perspektif anggaran (Bappenas) Rincian Output dapat mendukung beberapa Indikator Kinerja, sehingga rincian belanja dan capaian kinerja dibuat berdasarkan Indikator Kinerjanya.

Efisiensi Penggunaan Anggaran

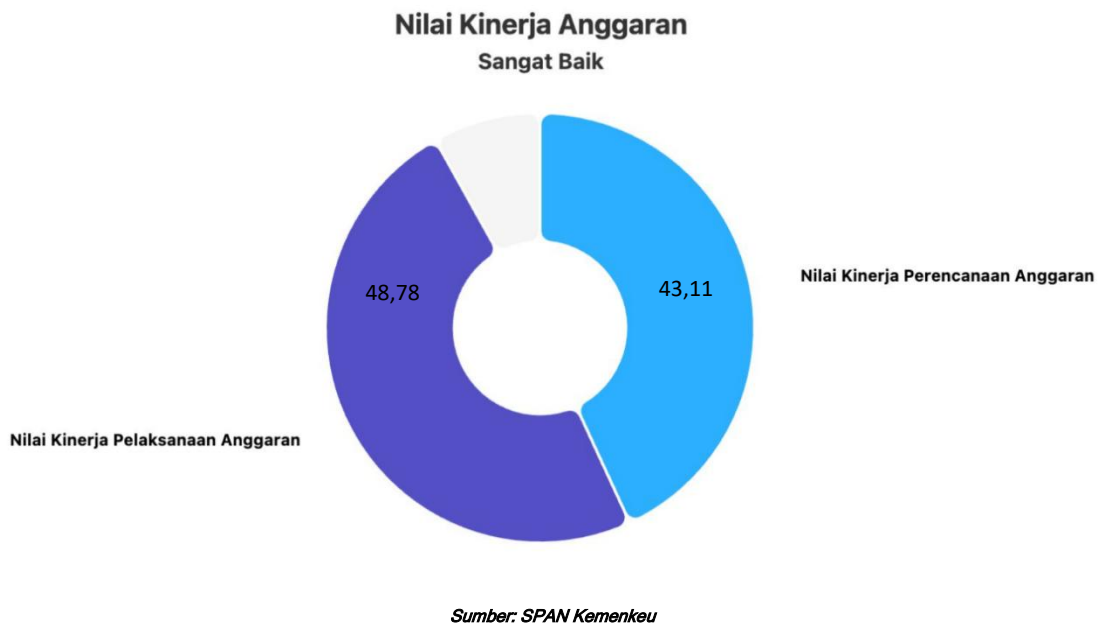
Efisiensi penggunaan anggaran didapatkan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI pada situs <https://smart.kemenkeu.go.id/>. Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Nilai ini merupakan nilai akhir dari penginputan aplikasi SMART yang dihitung dengan menjumlahkan antara Aspek Manfaat (Sasaran Strategis) dan Rata-rata Nilai Kinerja Eselon I dengan proporsi 50 banding 50. Range kategori penilaian hasil Nilai Kinerja Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29 Tabel Kategori Nilai Kinerja Anggaran

No	Range	Keterangan
1	>90	Sangat Baik
2	>80 s.d. 90	Baik
3	>60 s.d. 80	Cukup
4	>50 s.d. 60	Kurang
5	s.d. 50	Sangat Kurang

Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian tersusun dari:

1. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.
2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.
3. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi Kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan Pemerintah.



GAMBAR 3.2 NILAI SMART MENKO BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2024

Hingga laporan ini dibuat, nilai SMART Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025 belum tersedia, sehingga masih menggunakan nilai capaian tahun 2024, yaitu sebesar

91.89. Sepanjang tahun 2025 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan berbagai kegiatan dengan menggunakan prinsip efisiensi anggaran, walaupun terjadi blokir anggaran yang cukup tinggi. Salah satu penerapannya adalah pada kegiatan pengembangan kompetensi pegawai. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tercatat setidaknya melakukan beberapa kegiatan yang mengefisienkan anggaran diantaranya 1) Penyelenggaraan Diklat/workshop yang bersifat swakelola. Adapun biaya penyelenggaraan yang harus dibayarkan untuk diklat swakelola adalah narasumber, serta snack konsumsi. Nominal yang dikeluarkan penyelenggaraan swakelola ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pelaksanaan Diklat/workshop pihak ke tiga. 2) Pemanfaatan Teknologi Informasi yang mendorong pengurangan kertas, integrasi data dan kecepatan respon atas keluhan layanan. Beberapa sistem informasi yang dioptimalkan penggunaan pada tahun 2025 diantaranya Simersi (aplikasi terkait pelaksanaan RB), Sivera (aplikasi terkait verifikasi keuangan), ekon-GO (aplikasi terkait pengelolaan kinerja), Pengelolaan BMN, Layanan Permohonan Barang dan Persediaan, Monitoring Keuangan, Sistem Kepegawaian, Sipatuh, E-lorg, Elayanan dan SIPP yang pemanfaatannya menunjang efisiensi proses bisnis dan secara langsung berdampak pada efisiensi anggaran.



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB IV

EVALUASI KINERJA

- EVALUASI PERENCANAAN KINERJA
- TINDAKLANJUT ATAS EVALUASI SAKIP INSPEKTORAT
- RENCANA AKSI PENINGKATAN KINERJA

4.1. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA

Evaluasi atas perencanaan kinerja merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan kinerja organisasi. Proses pengelolaan kinerja tidak terlepas dari proses evaluasi, karena melalui evaluasi kinerja dapat diidentifikasi tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan serta diketahui tindakan korektif yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja pada periode berikutnya. Pelaksanaan evaluasi mengacu pada dokumen perencanaan kinerja, yaitu Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025–2029, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai dasar penetapan target dan ukuran keberhasilan kinerja.

Target Kinerja Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029, terdapat 2 (dua) Tujuan Strategis, 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) yang diukur melalui 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Masing-masing Sasaran Strategis (SS) diukur pencapaiannya melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target tahunan untuk periode Tahun 2025-2029, yang telah ditetapkan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

TABEL 4.1 TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja Tahunan				
		2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 1: Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian						
Sasaran Strategis 1 (SS-1): Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	100	100
Sasaran Strategis 2 (SS-2): Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas	Tingkat Input Material Sirkular (%)	9,2	9,4	9,6	9,8	10
	Pengeluaran Per kapita laki – laki dan Perempuan	L; 16.891 P; 9.920	L: 17.138; P: 10.086	L: 17.388; P: 10.256	L: 17.641; P: 10.428	L: 17.899; P: 10.603
Tujuan 2 : Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas						
Sasaran Strategis 1 (SS-1): Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing	Nilai Reformasi Birokrasi	83,95	84,2	84,7	85,1	85,6
	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	6,78	6,82	6,86	6,89	6,78
Sasaran Strategis 2 (SS-2):	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4

Terwujudnya pelayanan Prima yang berkualitas						
Sasaran Strategis 3 (SS-3): Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai	Tingkat Maturitas SPIP	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
	Tindak lanjut Rekomendasi BPK	75	75	75	75	75
	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Survei Penilaian Integritas (SPI)	82	82	82	82	82
	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	3	3	3	3	3
	Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27

Target Kinerja pada Rencana Kerja (Renja) dan PK Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 mengalami beberapa perubahan dibandingkan dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Perubahan tersebut berupa modifikasi dan pemutakhiran indikator kinerja guna meningkatkan relevansi pencapaian kinerja organisasi. Terdapat penambahan dua sasaran strategis, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Sesuai dengan Standar Nasional dan Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik. Untuk mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Sesuai dengan Standar Nasional, terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan sebagai indikator yang bersifat proses bisnis dan berfungsi mendukung IKU yang berorientasi *outcome*. Selain itu, pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik terdapat IKU Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat sebagai alat ukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit Eselon I.

Dalam rangka memperjelas *cascading* kinerja Reformasi Birokrasi, beberapa IKU yang merupakan indeks Reformasi Birokrasi (RB) diturunkan ke tingkat Eselon II di lingkungan Sekretariat. IKU tersebut meliputi Tingkat Maturitas SPIP, Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, Opini BPK, Survei Penilaian Integritas (SPI), Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR), serta Nilai Kapabilitas APIP (IACM).

Adapun hal lain yang mendorong adanya perbedaan revisi Indikator dan target kinerja Sekretariat di tahun 2025 diantaranya adalah (1) Capaian Kinerja tahun 2024 yang menjadi baseline penetapan target 2025, (2) Perubahan Target di dokumen perencanaan nasional, serta (3) Terdapat dinamika RB tahun ini sehingga belum terdapat *roadmap* RB Nasional. Berikut adalah tabel target kinerja berdasarkan rencana strategis dan perjanjian kinerja sekretariat tahun 2025:

TABEL 4.2 TARGET KINERJA PADA RENJA DAN PK 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja 2025	
	Renstra	Renja/PK
Nilai Reformasi Birokrasi	83,95	84,01
Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	6,78	6,76

Tingkat Input Material Sirkular	9,2	9,2
Pengeluaran Per kapita laki – laki dan Perempuan	L; 16.891 P; 9.920	L;16.891 P;9.920
Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan	100	100
Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	3 dari 4	3 dari 4
Tingkat Maturitas SPIP	3,58	-
Tindak lanjut Rekomendasi BPK	75	-
Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,5	-
Opini BPK	WTP	-
Survei Penilaian Integritas (SPI)	82	-
Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	3	-
Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	3,27	-

Capaian Perjanjian Kinerja 2025 dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Pada Bab III telah dijelaskan mengenai Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 yang memperoleh nilai sebesar **106,67%** atau berada pada kategori **Memenuhi Ekspektasi**. Berikut rician IKU pada Perjanjian Kinerja 2025 mencetak kinerja terbaik, diantaranya :

1. IKU Nilai Reformasi Birokrasi General tahun 2025 mencapai 84,01 atau sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan (**Memenuhi Ekspektasi**) dan melebihi target dari Rencana Strategis Sekretariat;
2. IKU Reformasi Birokrasi Tematik tahun 2025 mencapai 6,76 atau sebesar 100% sesuai dengan target tahun 2025 (**Memenuhi Ekspektasi**);
3. IKU Tingkat Input Material Sirkular tahun 2025 mencapai 9,2 atau sebesar 100% sesuai dengan target tahun 2025 (**Memenuhi Ekspektasi**);
4. IKU Pengeluaran Per kapita laki – laki dan Perempuan sudah mencapai 100% sesuai dengan target tahun 2025 (**Memenuhi Ekspektasi**);
5. Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan sudah mencapai 100% sesuai dengan target tahun 2025 (**Memenuhi Ekspektasi**);
6. IKU Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan sudah mencapai 100% sesuai dengan target tahun 2025 (**Memenuhi Ekspektasi**);
7. IKU Kepuasan layanan Sekretariat sudah mencapai 4 dari 4 atau 120% dari target (**Memenuhi Ekspektasi**);
8. IKU Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat telah mencapai 103% atau 120% dari target (**Memenuhi Ekspektasi**).

TABEL 4.3 PENGELOMPOKAN SASARAN PROGRAM RENSTRA DAN PERJANJIAN KINERJA 2025

Renstra 2025 – 2029		Perjanjian Kinerja 2025	
Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan (%)	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing	1.1. Nilai Reformasi Birokrasi General
Terwujudnya Dukungan	Tingkat Input Material Sirkular (%)		1.2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik

Renstra 2025 – 2029		Perjanjian Kinerja 2025	
Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas	Pengeluaran Per kapita laki – laki dan Perempuan	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas	2.1. Tingkat Input Material Sirkular
			2.2 Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan
Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing	Nilai Reformasi Birokrasi General	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	3.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan
	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Sesuai dengan Standar Nasional	4.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas	5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat
			6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat
Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai	Tingkat Maturitas SPIP		
	Tindak lanjut Rekomendasi BPK		
	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas		
	Opini BPK		
	Survei Penilaian Integritas (SPI)		
	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)		
	Nilai Kapabilitas APIP (IACM)		

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dokumen perencanaan kinerja 2025 penyusunan dan penetapannya telah mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah. Secara lebih spesifik Rencana Strategis 2025-2029 terdapat 5 (lima) Sasaran Program dengan 13 (tiga belas) IKU, sedangkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 terdapat 6 (enam) Sasaran Program dengan 8 (delapan) IKU. Meski terdapat beberapa perbedaan, namun esensi dalam perwujudan kondisi dan indikator yang digunakan tetap sama. Berikut adalah tabel target pada renstra dan realisasi kinerja sekretariat:

TABEL 4.4 PERBANDINGAN CAPAIAN ANTARA TARGET RENSTRA DAN REALISASI KINERJA

Sasaran Strategis	IKU	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Target Renstra	Realisasi Kinerja
		2025	2026	2027	2028	2029					
Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-



Sektoral yang Efektif	Dimanfaatkan (%)										
Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan	Tingkat Input Material Sirkular (%)	9,2	9,2*	9,4	-	9,6	-	9,8	-	10	-
Perekonomian yang berkualitas	Pengeluaran Per kapita laki – laki dan Perempuan	L; 16.891 P; 9.92	L; 16.891* P; 9.920*	L: 17.138; P: 10.086	-	L: 17.388; P: 10.256	-	L: 17.641; P: 10.428	-	L: 17.899; P: 10.603	-
Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator	Nilai Reformasi Birokrasi General	83,95	84,01*	84,2	-	84,7	-	85,1	-	85,6	-
Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	6,78	6,76*	6,82	-	6,86	-	6,89	-	6,78	-
Terwujudnya Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	3 dari 4	4 dari 4	3 dari 4	-	3 dari 4	-	3 dari 4	-	3 dari 4	-
Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai	Tingkat Maturitas SPIP	3,58	3,886	3,58	-	3,58	-	3,58	-	3,58	-
	Tindak lanjut Rekomendasi BPK	75	85,78	75	-	75	-	75	-	75	-
	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,5	N/A	0,5	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-
	Survei Penilaian Integritas (SPI)	82	81,77	82	-	82	-	82	-	82	-
	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	3	N/A	3	-	3	-	3	-	3	--
	Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	3,27	3,28	3,27	-	3,27	-	3,27	-	3,27	-

Keterangan : *Nilai Proyeksi

Tabel diatas menunjukkan bahwa beberapa nilai target di renstra perlu dimutakhirkan setiap tahun. Penyesuaian target ini tidak terlepas dari evaluasi atas capaian tahun 2025 yang dimana beberapa IKU sudah melebihi target serta menimbang kondisi internal dan eksternal Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hingga akhir periode Renstra 2025-2029, beberapa indikator telah tercapai dengan baik.

Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Kinerja Tahun 2026

Hasil evaluasi kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Sekretariat yang diperjanjikan pada tahun 2025 dikategorikan memenuhi ekspektasi. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, maka arah Perencanaan Kinerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.5 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS KEMENKO PEREKONOMIAN 2026

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target 2026
1.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing	1.1	Nilai Reformasi Birokrasi General	84,76
		1.2	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	6,76
2	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	2.1	Tingkat Input Material Sirkular	9,2
		2.2	Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan	Laki-laki Rp17.138.000; Perempuan Rp10.086.000
3.	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	3.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan	100%
4.	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan standar Nasional	4.1	Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	100%
5.	Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	3 dari 4
6.	Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat	92%

Perjanjian Kinerja Sekretariat Tahun 2026 memuat indikator kinerja yang ditetapkan pada level Eselon I dan disusun ke dalam beberapa kelompok utama. Kelompok indikator tersebut meliputi: (1) indikator yang berorientasi pada dampak, (2) indikator Program Prioritas atau *Directive* Menteri, (3) indikator proses bisnis, (4) indikator yang berorientasi pada layanan, dan (5) indikator pengembangan internal.

Kerangka penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dirancang untuk memastikan keterkaitan antara hasil yang ingin dicapai, kualitas proses pelaksanaan, serta penguatan tata

kelola organisasi. Secara umum Perjanjian Kinerja pada tahun 2026 masih sama dengan tahun 2025, namun terdapat peningkatan target pada beberapa indikator kinerja yaitu “Nilai Reformasi Birokrasi General”, “Tingkat Input Material Sirkular”, “Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan”, dan “Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat”.

4.2. TINDAKLANJUT ATAS EVALUASI SAKIP INSPEKTORAT

Sesuai dengan amanat Perpres RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) telah melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Nomor PW.04.01/34/INS.M.EKON/09/2025 tanggal 19 September 2025. Evaluasi AKIP untuk komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan terhadap implementasi SAKIP sampai dengan pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 sedangkan komponen Pelaporan Kinerja dilakukan terhadap implementasi SAKIP di Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP, nilai akhir implementasi SAKIP Sekretariat tahun 2025 adalah **78,95** dengan kategori **“BB”** atau Sangat Baik dengan rincian nilai per komponen sebagai berikut:

TABEL 4.8 HASIL EVALUASI AKIP SEKRETARIAT 2025

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a. Keberadaan (6%) b. Kualitas (9%) c. Pemanfaatan (15%)
2.	Pengukuran Kinerja	30%	a. Keberadaan (6%) b. Kualitas (9%) c. Pemanfaatan (15%)
3.	Pelaporan Kinerja	20%	a. Keberadaan (4%) b. Kualitas (6%) c. Pemanfaatan (10%)
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20%	a. Keberadaan (4%) b. Kualitas (6%) c. Pemanfaatan (10%)
	Total	100%	

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa terdapat 4 (empat) komponen dalam evaluasi AKIP Sekretariat yang terdiri dari Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%; Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%; Pelaporan Kinerja dengan bobot 20%; dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 20%. Masing-masing komponen akan terdiri dari 3 (tiga) sub komponen yaitu Keberadaan; Kualitas; dan Pemanfaatan.

Beberapa rekomendasi terkait penyelenggaraan SAKIP TA 2025 di Lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Indikator Penilaian pada komponen Pelaporan Kinerja yang diberikan oleh Tim Evaluator SAKIP Inspektorat yaitu:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja Sekretariat TA 2025 adalah **26.61**, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 4.9 HASIL EVALUASI PERENCANAAN KINERJA

No	Uraian	Nilai TA 2025
PERENCANAAN KINERJA (30%)		26.61
1	Keberadaan (6%)	4.50
2	Kualitas (9%)	8.15
3	Pemanfaatan (15%)	13.96

Dari hasil Rekomendasi perbaikan yang diterima, Sekretariat akan melaksanakan upaya-upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi Perencanaan Kinerja diantaranya :

TABEL 4.10 REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT PERENCANAAN KINERJA

No	Rekomendasi	Upaya Tindaklanjuti
1	Dokumen Perencanaan Kinerja jangka menengah berupa Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029 belum disusun sehingga tidak dapat dipublikasikan pada laman kinerja.ekon.go.id.	Perlu menyusun, menetapkan dan mempublikasikan Renstra Tingkat Eselon I sebagai dokumen perencanaan jangka menengah.
2	Dokumen Perencanaan Kinerja jangka pendek berupa Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 untuk masing-masing kode kegiatan belum ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).	Pengguna Anggaran (PA) perlu menetapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) per kegiatan.
3	Dokumen Perencanaan Anggaran berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) telah disusun tetapi belum menjelaskan antara keterkaitan kegiatan, anggaran, dan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja (PK).	Dokumen KAK dan RAB per kegiatan perlu menjelaskan keterkaitan antara anggaran dan kegiatan terhadap rencana IKU yang ditargetkan pada tahun anggaran tersebut.
4	Masih terdapat sasaran program level eselon I Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Manual IKU yang belum menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud, belum sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dan belum dijelaskan secara detail dan lengkap.	Perlu mengevaluasi kembali dokumen Manual IKU sebagai bagian tidak terpisahkan dari PK agar: a. Nomenklatur Sasaran Program digunakan untuk level Eselon I dan Sasaran Kegiatan untuk level Eselon II b. Deskripsi sasaran dalam dokumen manual IKU harus detil dan lengkap agar dapat menggambarkan output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud, harus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dan dipastikan narasinya sama dengan yang tercantum di dokumen PK.
5	Masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi kriteria SMART yaitu <i>Specific</i> seperti IKU "4.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan" pada level eselon I Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian karena tidak terdapat penjelasan mengenai kriteria yang digunakan dalam menghitung ketercapaian IKU.	c. Deskripsi IKU dalam dokumen manual IKU terdiri dari: 1) Definisi IKU harus diuraikan dengan detil (tidak bersifat general) dan menjelaskan kriteria yang digunakan untuk standar
6	Masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi kriteria SMART yaitu <i>Measurable</i> seperti IKU "2.1	

No	Rekomendasi	Upaya Tindakan Lanjut
	Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut terkait Undang-Undang Cipta Kerja” pada level eselon II Biro Hukum dan Organisasi karena formulasi perhitungannya kurang lengkap.	ketercapaian IKU sehingga memenuhi kriteria SMART, yaitu <i>Specific</i> .
7	Masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi kriteria SMART yaitu <i>Achievable</i> seperti IKU “1.1 Persentase Berita Positif mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator di Bidang Perekonomian di Media Massa” pada level eselon II Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan karena terdapat perbedaan antara target di Perjanjian Kinerja dan target di Manual IKU.	2) Formula harus menggunakan rumus perhitungan IKU yang lengkap dan benar serta menjelaskan sumber datanya sehingga memenuhi kriteria SMART, yaitu <i>Measurable</i> . 3) Definisi IKU harus relevan dengan tugas dan fungsi organisasi dan mendukung pencapaian sasaran sehingga memenuhi kriteria SMART, yaitu <i>Relevance</i> .
8	Masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi kriteria SMART yaitu <i>Relevance</i> seperti IKU “2.2 Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan” pada level eselon II Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan karena ketidaksesuaian antara sasaran kegiatan di Perjanjian Kinerja dan sasaran kegiatan di Manual IKU.	d. Beberapa hal dalam Manual IKU mengikuti kriteria berikut di bawah ini sehingga memenuhi kriteria SMART, yaitu <i>Achievable</i> : 1) Target yang dicantumkan di tahun berjalan harus sama dengan target di dokumen PK serta selaras satu sama lain dengan Jenis Konsolidasi Periode dan Periode Pelaporan. 2) Tingkat Kendali IKU yang dipilih harus selaras dengan Deskripsi IKU, baik definisi, formula, maupun sumber data IKU. 3) Polarisasi IKU yang dipilih harus konsisten dengan tipe karakteristik IKU apakah untuk memaksimalkan, di mana semakin besar nilai IKU semakin baik, meminimalkan, di mana semakin kecil nilai IKU semakin baik, atau menstabilkan, di mana nilai dalam rentang tertentu semakin baik.
9	Masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi kriteria SMART yaitu <i>Timebound</i> seperti IKU “5.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama” pada level eselon II Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama karena periode laporannya ganda.	e. Periode pelaporan harus dipilih salah satu, apakah bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan yang selaras dengan Jenis Konsolidasi Periode agar memenuhi kriteria SMART, yaitu <i>Timebound</i> .
10	Dokumen dasar penetapan target perjanjian kinerja telah didukung dengan pertimbangan yang terdokumentasi dengan baik tetapi belum didukung dengan kertas kerja perhitungan dan belum memberikan penjelasan bagi seluruh IKU sampai dengan level eselon II.	Perlu menyusun dokumen penetapan target untuk masing-masing IKU sampai dengan level Eselon II yang berisi argumen dan/atau pertimbangan yang logis disertai kertas kerja perhitungan dan basis data yang memadai.
11	Rencana Aksi yang disusun telah mendukung kinerja yang ingin dicapai namun terdapat rencana aksi yang bersifat general seperti IKU “2.1 Tingkat Input Material Sirkular” pada level eselon I Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.	Perlu mengevaluasi kembali dokumen Rencana Aksi sebagai bagian tidak terpisahkan dari PK, agar: a. Aktivitas dalam Rencana Aksi harus spesifik sesuai dengan ruang lingkup Deskripsi IKU di dokumen Manual IKU-nya (mendukung pencapaian IKU).
12	Rencana Aksi yang dilaksanakan telah mendukung tercapainya kinerja yang ditargetkan tetapi belum seluruhnya dipantau kemajuannya laporan kinerja triwulanan.	b. Aktivitas dalam Rencana Aksi harus dipantau kemajuan dan statusnya dalam Laporan Kinerja Triwulanan.
13	Terdapat 41 dari 238 pegawai yang belum menyusun dan menyampaikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Target tahun 2025 yang telah ditetapkan secara formal oleh pejabat yang berwenang.	Unit kerja perlu memastikan setiap pegawai menetapkan target individu melalui SKP Target sebagai bentuk komitmen terhadap target kinerja yang telah direncanakan.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja Sekretariat TA 2025 adalah **22,40**, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 4.11 HASIL EVALUASI PENGUKURAN KINERJA

No	Uraian	Nilai TA 2025
PENGUKURAN KINERJA (30%)		22.40
1	Keberadaan (6%)	5.62
2	Kualitas (9%)	6.51
3	Pemanfaatan (15%)	10.27

Dari hasil Rekomendasi perbaikan yang diterima, Sekretariat akan melaksanakan upaya-upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi Pengukuran Kinerja diantaranya :

TABEL 4.12 REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT PENGUKURAN KINERJA

No	Rekomendasi	Upaya Tindaklanjuti
1	Belum terdapat kebijakan/peraturan yang mengatur terkait mekanisme pengumpulan data kinerja oleh KPI Manager di masing-masing unit kerja level eselon I.	Perlu menyusun kebijakan/peraturan sebagai pedoman yang menjelaskan prosedur, penanggung jawab, beserta alur pengumpulan data kinerja di masing-masing unit kerja tingkat Eselon I.
2	Terdapat definisi dan cara mengukur indikator kinerja utama yang belum sesuai dalam Manual IKU.	Laporan Kinerja Triwulanan harus menjelaskan informasi capaian kinerja yang relevan untuk masing-masing IKU disertai data dukung/bukti yang lengkap dan dapat diandalkan serta upaya efisiensi dan kuantifikasinya atas penggunaan anggaran dan sumber daya dalam mencapai kinerja.
3	Manajemen data dukung laporan kinerja triwulanan telah dilakukan namun belum optimal karena masih terdapat ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian data dukung dengan kinerja yang diakui.	
4	Pengukuran kinerja belum seluruhnya memberikan informasi terkait upaya efisiensi yang dikuantifikasikan atas penggunaan anggaran dan sumber daya dalam mencapai kinerja.	
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang namun belum atas seluruh pegawai dimana pada TW I sebanyak 39 pegawai dari 200 pegawai yang belum melakukan penilaian SKP TW I dan pada TW II sebanyak 40 pegawai dari 238 pegawai yang belum melakukan penilaian SKP TW II.	
6	Pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Setiap pegawai dalam unit kerja perlu mengukur capaian target kinerja individu melalui SKP Penilaian tiap triwulan yang dipantau secara berjenjang oleh level manajerial di setiap organisasi sebagai akuntabilitas kinerja individu.
7	SOP <i>Reward and Punishment</i> di Lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diatur melalui SOP 02/SES.M.EKON.1/1/2025 belum diimplementasikan.	
8	Pengukuran kinerja belum seluruhnya digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.	Perlu adanya implementasi atas SOP <i>Reward and Punishment</i> yang telah ditetapkan.
9	Pengukuran kinerja belum seluruhnya mempengaruhi penyesuaian anggaran.	Pengukuran kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh masing-masing unit kerja sampai dengan level Eselon II untuk: a. Dasar penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja. b. Dasar penyesuaian anggaran tahun berjalan.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja Sekretariat TA 2025 adalah **15,01**, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 4.13 HASIL EVALUASI PELAPORAN KINERJA

No	Uraian	Nilai TA 2025
PELAPORAN KINERJA (20%)		15,01
1	Keberadaan (4%)	3.20
2	Kualitas (6%)	5.73
3	Pemanfaatan (10%)	6.08

Dari hasil Rekomendasi perbaikan yang diterima, Sekretariat akan melaksanakan upaya-upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi Pelaporan Kinerja diantaranya :

TABEL 4.14 REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT PELAPORAN KINERJA

No	Rekomendasi	Upaya Tindaklanjuti
1	Berdasarkan laman kinerja.ekon.go.id diketahui bahwa belum dilaksanakan reviu atas Laporan Kinerja Triwulanan.	Perlu dilakukan reviu atas Laporan Kinerja Triwulanan di level unit kerja Eselon I.
2	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan belum menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya untuk seluruh IKU.	Informasi kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dalam Laporan Kinerja Tahunan perlu dijelaskan untuk masing-masing IKU.
3	Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja Tahunan belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.	Informasi dalam Laporan Kinerja harus dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian aktivitas dan dasar penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, melalui pencantuman draft PK, draft rencana aksi, dan proyeksi kebutuhan anggaran periode berikutnya dalam Laporan Kinerja Tahunan.
4	Informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Tahunan belum seluruhnya dimanfaatkan dalam penyesuaian aktivitas dan dasar penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Unit kerja perlu melakukan upaya untuk memastikan Laporan Kinerja Tahunan menjadi kepedulian seluruh pegawai.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sekretariat TA 2025 adalah **14.93**, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 4.13 HASIL EVALUASI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

No	Uraian	Nilai TA 2025
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (20%)		14.93
1	Keberadaan (4%)	3.57
2	Kualitas (6%)	3.03
3	Pemanfaatan (10%)	8.33

Dari hasil Rekomendasi perbaikan yang diterima, Sekretariat akan melaksanakan upaya-upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diantaranya:

TABEL 4.15 REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

No	Rekomendasi	Upaya Tindaklanjuti
1	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang tetapi belum pada seluruh unit kerja level eselon II yaitu pada unit kerja Inspektorat.	Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perlu dilaksanakan oleh SDM dan pendalaman yang memadai pada seluruh unit kerja level Eselon II serta terdokumentasi dengan baik.
2	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan dilaksanakan pada seluruh level eselon II.	
3	Dasar pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum didukung dengan Surat Tugas Evaluasi.	Hasil Evaluasi Internal harus terdokumentasi dan menggambarkan hasil evaluasi seperti informasi apa yang telah diimplementasikan dengan baik, hal-hal yang masih perlu diperbaiki serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja.
4	Laporan Hasil Evaluasi Internal Sekretariat belum menggambarkan hasil evaluasi seperti informasi apa yang telah diimplementasikan dengan baik, hal-hal yang masih perlu diperbaiki serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja unit kerja.	

4.3. RENCANA AKSI PENINGKATAN KINERJA

Dalam rangka tindak lanjut peningkatan akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025, maka perlu dilakukan beberapa upaya rencana aksi:

1. Dokumen Manual IKU merupakan bagian tidak terpisahkan dari PK oleh karena itu informasi di dalamnya, mulai dari sasaran, definisi dan formula IKU, periode pelaporan sampai dengan target harus diuraikan dengan detil dan benar serta selaras dan konsisten satu sama lain agar sesuai kriteria SMART.
2. Dokumen SKP perlu dipantau dan dipastikan telah disusun oleh setiap pegawai sebagai bentuk komitmen dan kepedulian terhadap perencanaan dan pengukuran capaian/target kinerja secara berjenjang di Sekretariat.
3. Perlu menyusun perencanaan kinerja periode berikutnya yang didukung dengan rencana aksi serta proyeksi anggaran sebagai wujud pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Tahunan.
4. Perlu menyusun pokja/tim pengelolaan kinerja yang memiliki ruang lingkup penugasan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga jelas penanggungjawabnya.



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V

PENUTUP

-
- KESIMPULAN DAN LAMPIRAN

Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang disusun secara sistematis, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berisi capaian atas target-target kinerja, hambatan, serta strategi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan pertanggung jawaban kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat, agar dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja di masa mendatang.

Pada Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Secara garis besar, pencapaian yang diraih Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memenuhi ekspektasi, hal ini terlihat dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Tahun 2025 sebesar 106,67%. Adapun realisasi kinerja anggaran untuk mendukung Sasaran Program Sekretariat di Tahun 2025 mencapai 97,81% dari pagu anggaran. Berdasarkan analisis capaian kinerja, capaian kinerja (output) kegiatan mencapai 100%.

Kinerja Sekretariat merupakan hasil kerja sama dan partisipasi dari seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Melihat hasil kinerja di tahun ini, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian optimis bahwa target kinerja tahun depan akan kembali tercapai. Untuk itu akan dilakukan sejumlah upaya-upaya perbaikan dan adaptif pada perencanaan kinerja tahun 2026, sehingga dapat mendorong kinerja Sekretariat yang akan datang. Performa kinerja Sekretariat yang baik diharapkan dapat mendukung perwujudan kapasitas organisasi yang optimal dan mampu menjadi *supporting* unit dan *decision support* yang mampu menjadi *enabler* dalam memenuhi seluruh kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Susiwijono

Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak kedua,

Menteri Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian

Airlangga Hartarto

Pihak Pertama,

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

Susiwijono

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing	1.1	Nilai Reformasi Birokrasi General	84,01
		1.2	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	6,76
2.	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas	2.1	Tingkat Input Material Sirkular	9,2%
		2.2	Pengeluaran Perkapita laki – laki dan Perempuan	Laki-laki 16.891; Perempuan; 9.920
3.	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	3.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan	100%
4.	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan standar Nasional	4.1	Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	100%
5.	Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	3 dari 4
6.	Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat	85%

Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Total

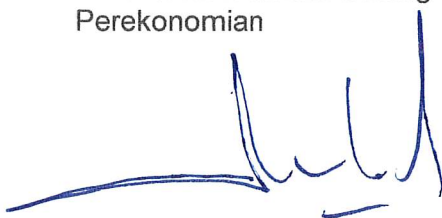
(Tiga Ratus Sebelas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Anggaran

Rp. 262.272.212.000,-
Rp. 48.985.416.000,-

Rp. 311.257.628.000,-

Pihak kedua,
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian



Airlangga Hartarto

Pihak Pertama,
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian



Susi Wijono

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing	Nilai Reformasi Birokrasi General	84,01	- Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi RB General - Pemenuhan Rencana Aksi RB General - Penguatan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB General - Digitalisasi Pelaporan dan Bukti Dukung RB General	- Melaksanakan rewiuw hasil evaluasi RB General tahun sebelumnya - Penyusunan draft Rencana Aksi RB General tahun 2025 - Pembentukan Tim Monev RB - Penentuan platform/tools yang akan digunakan dalam melaksanakan RB General - Pelibatan atau audiensi internal tentang penyusunan Rencana Aksi tahun 2025	- Finalisasi Rencana Aksi RB General yang di legalisasi ke dalam Persesmenko TA. 2025 - Sosialisasi finalisasi Rencana Aksi Kepada Seluruh Unit Kerja - Monitoring Evaluasi Implementasi Renaksi TW I - Pengumpulan Dokumen Pedukung Implementasi RB General TW I - Penyampaian Umpan Balik kepada Unit Kerja didalam Platform yang digunakan dalam Melaksanakan RB General - Optimalisasi aplikasi kinerja (e-kinerja, e-SAKIP)	- Monitoring Evaluasi Implementasi Renaksi TW II - Pengumpulan Dokumen Pedukung Implementasi RB General TW II - Penyampaian Umpan Balik kepada Unit Kerja didalam Platform yang digunakan dalam Melaksanakan RB General TW II	- Monitoring Evaluasi Implementasi Renaksi TW III dan TW IV - Pengumpulan Dokumen Pedukung Implementasi RB General TW III dan TW IV - Finalisasi pengumpulan seluruh bukti dukung untuk penilaian - Penyusunan laporan Buku Profil pelaporan Reformasi Birokrasi TA 2025
		Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	6,76	- Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi RB Tematik - Pemenuhan Rencana Aksi RB Tematik - Penguatan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB Tematik	- Melaksanakan rewiuw hasil evaluasi RB Tematik tahun sebelumnya - Penyusunan draft Rencana Aksi RB Tematik tahun 2025 - Pembentukan PIC RB Tematik	- Finalisasi Renaksi RB Tematik - Monitoring Evaluasi Implementasi Renaksi TW I - Pengumpulan Dokumen Pedukung Implementasi RB Tematik TW I - Penyampaian Umpan Balik kepada Unit Kerja didalam Platform yang digunakan dalam Melaksanakan RB Tematik	- Monitoring Evaluasi Implementasi Renaksi TW II - Pengumpulan Dokumen Pedukung Implementasi RB Tematik TW II - Penyampaian Umpan Balik kepada Unit Kerja didalam Platform yang digunakan dalam Melaksanakan RB Tematik TW II	- Monitoring Evaluasi Implementasi Renaksi TW III dan TW IV - Pengumpulan Dokumen Pedukung Implementasi RB Tematik TW III dan TW IV - Finalisasi pengumpulan seluruh bukti dukung untuk penilaian

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
2	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	Tingkat Input Material Sirkular	9,2%	- Penyusunan dan Sinkronisasi Kebijakan Nasional <i>Circular Economy</i> - Penguatan monitoring dan evaluasi nasional atas material sirkular - Penguatan kebijakan insentif dan disinsentif	- Melaksanakan rapat koordinasi kebijakan antar Kementerian/Lembaga - Identifikasi kebijakan tumpang tindih dalam penguatan <i>circular economy</i>	- Melaksanakan rapat koordinasi kebijakan antar Kementerian/Lembaga - Pengumpulan data penggunaan material sirkular di Kementerian Teknis	Melaksanakan rapat Koordinasi antar Kementerian /Lembaga	- Evaluasi pelaksanaan roadmap penggunaan material sirkular tingkat nasional - Penyusunan rencana perbaikan kebijakan di tahun berikutnya
		Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan	Laki – Laki Rp. 16.891 Perempuan Rp. 9.920	- Penguatan sinkronisasi kebijakan gender dalam pembangunan ekonomi - Monitoring dan evaluasi capaian keseimbangan pengeluaran gender - Penguatan edukasi dan sosialisasi gender equality - Pengembangan Kebijakan pengurangan kesenjangan pengeluaran Gender	- Koordinasi <i>crosscutting</i> antar Kementerian dan Lembaga untuk Harmonisasi kebijakan - Identifikasi kesenjangan kebijakan dan data pengeluaran gender di tingkat nasional dan daerah	- Monitoring pengumpulan data pengeluaran perkapita gender oleh Kementerian terkait - Fasilitasi workshop kebijakan pengeluaran gender - Monitoring kesesuaian data pengeluaran gender	- Penguatan forum sinergi lintas sektor dalam mempercepat kebijakan kesetaraan ekonomi gender - Koordinasi penguatan kebijakan pengurangan gap gender	- Evaluasi penerapan kebijakan pengeluaran gender - Penyusunan strategi penguatan kebijakan untuk tahun berikutnya
3	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efisien	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan	100%	Pemanfaatan Seluruh Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian pada lintas sektoral dalam bentuk naskah kedinasan dan/atau karya tulis ilmiah	Menindaklanjuti Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian pada Lintas Sektoral dalam Bentuk Naskah Kedinasan dan/atau Karya Tulis Ilmiah	Melaksanakan Sosialisasi dan Monitoring Kebijakan di Bidang Perekonomian pada Lintas Sektoral dalam Bentuk Naskah Kedinasan dan/atau Karya Tulis Ilmiah	Memanfaatkan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian pada Lintas Sektoral dalam Bentuk Naskah Kedinasan dan/atau Karya Tulis

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
4	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan Standar Nasional	Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	100%	- Penyelesaian Dokumen Perencanaan anggaran dan kinerja - Penyelesaian Dokumen Hukum dan organisasi - Penyelesaian Dokumen Administrasi Umum dan Manajemen SDM - Penyelesaian Dokumen Komunikasi dan Informasi Publik, Persidangan dan Naskah Menteri	- Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Perencanaan anggaran dan kinerja TW I - Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Hukum dan organisasi TW I - Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Administrasi Umum dan Manajemen SDM TW I - Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Komunikasi dan Informasi Publik, Persidangan dan Naskah Menteri TW I	- Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Perencanaan anggaran dan kinerja TW II - Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Hukum dan organisasi TW II - Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Administrasi Umum dan Manajemen SDM TW II - Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Komunikasi dan Informasi Publik, Persidangan dan Naskah Menteri TW II	- Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Perencanaan anggaran dan kinerja TW III - Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Hukum dan organisasi TW III - Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Administrasi Umum dan Manajemen SDM TW III - Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Komunikasi dan Informasi Publik, Persidangan dan Naskah Menteri TW III	- Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Perencanaan anggaran dan kinerja TW IV - Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Hukum dan organisasi TW IV - Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Administrasi Umum dan Manajemen SDM TW IV - Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Komunikasi dan Informasi Publik, Persidangan dan Naskah Menteri TW IV
5	Terselenggaranya Layanan Prima yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	3 dari 4	- Peningkatan standar layanan Sekretariat - Digitalisasi layanan Sekretariat - Penguatan kapasitas SDM - Penguatan Sarana dan Prasarana Layanan - Monitoring dan tindak lanjut Umpan Balik Layanan	- Evaluasi hasil survey dan penyusunan rencana aksi peningkatan layanan - Penyelenggaraan sosialisasi/workshop penguatan kapasitas SDM - Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Layanan pada TW I - Rekapitulasi terkait permohonan layanan dari unit kerja ke deputian pada TW I	- Penyelenggaraan sosialisasi/workshop penguatan kapasitas SDM - Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Layanan pada TW II - Rekapitulasi terkait permohonan layanan dari unit kerja ke deputian pada TW II - Tindak lanjut keluhan layanan dari unit kerja pada TW II	- Penyelenggaraan sosialisasi/workshop penguatan kapasitas SDM - Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Layanan pada TW III - Rekapitulasi terkait permohonan layanan dari unit kerja ke deputian pada TW III - Tindak lanjut keluhan layanan dari unit kerja pada TW III	- Penyelenggaraan sosialisasi/workshop penguatan kapasitas SDM - Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Layanan pada TW IV - Rekapitulasi terkait permohonan laporan - Penyusunan draft dan Pelaksanaan survei akhir tahun kepuasan layanan Sekretariat

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					Tindaklanjuti keluhan layanan dari unit kerja pada TW I			- Penyusunan laporan kepuasan layanan Sekretariat dan Analisis trend kepuasan dari tahun ke tahun - Penyusunan rekomendasi perbaikan layanan
6	Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemenko Perekonomian	85%	Penguatan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat keberhasilan zona integritas, nilai sakin dan tingkat digitalisasi arsip	- Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI TW I	- Penyusunan laporan kinerja Triwulan II - Laporan pemanfaatan SRIKANDI TW II	- Penyusunan laporan kinerja TW III - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI TW III	- Fasilitasi Pembangunan ZI di unit kerja - Penyusunan laporan kinerja TW IV - Penyusunan draft Perjanjian Kinerja 2026 - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI TW IV

Jakarta, Januari 2025

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


Susiwi Jono

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing
Deskripsi Sasaran Strategis		Penguatan birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejalan dengan arah pembangunan birokrasi nasional yang berfokus pada 2 (dua) aspek yaitu <i>hard element</i> dan <i>soft element</i> . Aspek <i>hard element</i> berfokus pada penciptaan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif, adapun aspek <i>soft element</i> berfokus pada penciptaan budaya birokrasi BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dengan ASN yang profesional.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.1. Nilai Reformasi Birokrasi General
Deskripsi IKU	:	Definisi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengukur tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi (RB) salah satunya melalui RB General. Penilaian dari RB General ini merupakan bagian dari pendekatan <i>double track reform</i>. RB General berfokus pada penyelesaian isu – isu struktural birokrasi (hulu), yang mencakup penguatan tata kelola organisasi, efektivitas proses bisnis, sistem kerja, dan peningkatan layanan publik. Nilai RB General merupakan cerminan dari aspek-aspek <i>hard element</i> RB yaitu pencapaian terhadap tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, lincah dan akuntabel. Penilaian didasarkan pada instrumen LKE RB yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB Formula Nilai RB General dihitung berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB terhadap capaian pelaksanaan pada indikator Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan. Setiap indikator memiliki bobot dan kriteria penilaian tertentu. Nilai akhir merupakan representase dari total skor yang diperoleh dibandingkan dengan skor maksimal yang dapat dicapai Tujuan Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan RB secara konsisten, terukur dan berkelanjutan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nilai RB General berfungsi sebagai alat ukur atas keberhasilan terhadap tata kelola organisasi.
Satuan Pengukuran		Nilai
Unit/Pihak Penyedia Data		Kementerian PAN-RB
Pejabat Penanggung Jawab Data		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi RB Kementerian PAN-RB
Tingkat Kendali IKU		(.....) High (X) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU		(X) Exact (....) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode		(.....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU		(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading		(X) Direct (...) Indirect
Polarisasi IKU	:	(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	84,01
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing
Deskripsi Sasaran Strategis		Penguatan birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejalan dengan arah pembangunan birokrasi nasional yang berfokus pada 2 (dua) aspek yaitu <i>hard element</i> dan <i>soft element</i> . Aspek <i>hard element</i> berfokus pada penciptaan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif, adapun aspek <i>soft element</i> berfokus pada penciptaan budaya birokrasi BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dengan ASN yang profesional.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik
Deskripsi IKU	:	Definisi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengukur tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi (RB) salah satunya melalui RB Tematik sebagai penguatan terhadap RB General untuk memberikan nilai akhir RB di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. RB Tematik berfokus pada dorongan kontribusi terhadap isu – isu pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sebagai instansi koordinator lintas sektor di bidang perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran kunci dalam menyinergikan program RB Tematik dengan agenda dari pembangunan ekonomi nasional, khusus nya pada : 1. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tata kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan bisa berdampak pada optimalnya penurunan kemiskinan 2. Peningkatan Investasi Reformasi Birokrasi melalui penyederhanaan proses bisnis dan penguatan kolaborasi serta sinergi antar lembaga birokrasi dan antar daerah 3. Pengelolaan Sumber Daya dan Hilirisasi Penguatan tata kelola dan kolaborasi antar lembaga dan antar daerah 4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden Penguatan tata kelola birokrasi merespon dan mengawal hal hal mendesak sesuai arahan Bapak Presiden, 5. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Digitalisasi berbasis arsitektur SPBE menjadi pilar bagi program Reformasi Birokrasi Tematik yang berdampak luas bagi masyarakat Melalui IKU ini, Kemenko Perekonomian merancang dan melaksanakan rencana aksi (renaksi) RB Tematik yang terukur dan struktur, mengintegrasikan program RB Tematik ke dalam kebijakan lintas sektor, dan memberikan kontribusi nyata terhadap outcome pembangunan. RB Tematik bersifat lintas fungsi dan <i>outcome-based</i>, sehingga mencerminkan orientasi reformasi birokrasi yang tidak hanya fokus pada perbaikan internal, tetapi juga pada capaian konkret di hilir yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Formula Nilai RB Tematik dihitung berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB terhadap capaian tematik yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB. Nilai akhir merupakan representase dari total skor yang diperoleh dibandingkan dengan skor maksimal yang dapat dicapai Rumusnya : Nilai RB Tematik = Jumlah total 5 indikator RB Tematik Tujuan Indikator ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyelesaian isu-isu strategis Nasional yang berdampak langsung kepada masyarakat
Satuan Pengukuran		Nilai
Unit/Pihak Penyedia Data		Kementerian PAN-RB
Pejabat Penanggung Jawab Data		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi RB Kementerian PAN-RB
Tingkat Kendali IKU		(.....) High (X) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU		(X) Exact (....) Proxy (.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(.....) Sum

(...) Average

(X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta

(...) Cascading Non Peta

(.....) Non-Cascading

Metode Cascading

(X) Direct

(...) Indirect

Polarisasi IKU

:

(X) Maximize

(.....) Minimize

(.....) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(....) Bulanan

(....) Triwulanan

(....) Semesteran

(X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	6,67
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis		Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran untuk menjalankan penugasan khusus yang bersifat lintas unit. Sasaran strategis ini menegaskan peran khusus Sekretariat yang mengemban <i>special mission</i> terhadap isu-isu strategis di bidang perekonomian. Dukungan Pengambilan kebijakan meliputi pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian isu-isu strategis dibidang perekonomian terutama yang bersifat <i>crosscutting</i> , dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.2.1. Tingkat Input Material Sirkular
Deskripsi IKU	:	Definisi Berdasarkan Peta Jalan (<i>Road Map</i>) dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2045. Terdapat 5 (lima) sektor prioritas penerapan ekonomi sirkular yaitu sektor pangan, tekstil, konstruksi, elektronik, dan retail (berfokus pada kemasan plastik). Tingkat input material sirkular merupakan indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran dalam meningkatkan efisiensi, daya guna, dan daur ulang sumber daya dan material. Khususnya dalam hal penggunaan kembali material (<i>reuse</i>), daur ulang (<i>recycle</i>), dan pemanfaatan materi limbah kembali ke dalam rantai produksi. Berdasarkan RPJMN 2025 - 2029, proyek prioritas yang menjadi kawalan Kementerian Perekonomian dalam menkoordinasikan kebijakan pada sektor Material Sirkular adalah : 1. Pengembangan kebijakan, teknologi dan fasilitasi pengelolaan sampah dengan prinsip sirkular 2. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Nikel 3. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Tembaga 4. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Bauksit 5. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Timah 6. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Kimia Indikator ini mengukur persentase kontribusi material daur ulang (sirkular) terhadap total input material yang digunakan dalam kegiatan ekonomi nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran untuk menkoordinasikan dan mengharmonisasikan kebijakan antar K/L pada proyek prioritas untuk mendukung Program Prioritas yang diampu oleh Kemenko Perekonomian Formula Persentase indikator dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : Rumusnya : $\text{Tingkat Input Material Sirkular} = \frac{\text{Jumlah PRO-P yang menerapkan Prinsip Sirkular}}{\text{Total PRO-P yang dikoordinasikan}}$ Tujuan Mengukur kualitas sinkronisasi dan koordinasi terkait tingkat penggunaan material sirkular dalam aktivitas perekonomian nasional.
Satuan Pengukuran		Persen
Unit/Pihak Penyedia Data		Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian
Pejabat Penanggung Jawab Data		Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian
Sumber Data	:	Rilis Data Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian
Tingkat Kendali IKU		(.....) High (...) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU		(....) Exact (X) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode		(.....) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU		(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading		(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	:	(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(....)
Bulanan

(....) Triwulanan

(....) Semesteran

(X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	9,2%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis		Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran untuk menjalankan penugasan khusus yang bersifat lintas unit. Sasaran strategis ini menegaskan peran khusus Sekretariat yang mengemban <i>special mission</i> terhadap isu-isu strategis di bidang perekonomian. Dukungan Pengambilan kebijakan meliputi pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian isu-isu strategis dibidang perekonomian terutama yang bersifat <i>crosscutting</i> , dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.2.2. Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan
Deskripsi IKU	:	Definisi Berdasarkan RPJMN th. 2025-2029, Kesenjangan gender dan penguatan peran perempuan merupakan Program Prioritas Nasional yang ke-4. Kesenjangan gender laki-laki dan perempuan dan penguatan peran perempuan merupakan salah satu indikator pada PN ke-4 yang disasar melalui peningkatan kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang. Salah satu diantaranya diukur melalui indikator pengeluaran perkapita laki – laki dan perempuan. Indikator ini mengukur kesenjangan rata-rata pengeluaran per kapita antara penduduk laki – laki dan perempuan sebagai salah satu parameter disparitas kesejahteraan ekonomi berdasarkan gender. Formula Indikator ini mengukur nilai rupiah dari pengeluaran per kapita antara laki-laki dan perempuan. Data diperoleh dari Survey Sosial Ekonomi Nasional BPS. Pengeluaran Per Kapita Laki-laki: Total pengeluaran yang dilakukan oleh laki-laki dibagi dengan jumlah populasi laki-laki. Pengeluaran Per Kapita Perempuan: Total pengeluaran yang dilakukan oleh perempuan dibagi dengan jumlah populasi perempuan. Tujuan Untuk mengukur kualitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian atas tingkat pengeluaran per kapita antara laki-laki dan perempuan dalam mengidentifikasi ketimpangan kesejahteraan ekonomi antarjenis kelamin
Satuan Pengukuran		Ribu Rupiah
Unit/Pihak Penyedia Data		Badan Pusat Statistik (BPS)
Pejabat Penanggung Jawab Data		Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Sumber Data	:	Survey Global Gender Gap Report BPS
Tingkat Kendali IKU		(.....) High (X) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU		(X) Exact (....) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode		(.....) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU		(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading		(X) Direct (...) Indirect
Polarisasi IKU	:	(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	Laki – Laki : Rp. 16.736 Perempuan : Rp. 9.579
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif memerlukan perencanaan yang matang, sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan dan berjalan kondusif. Sekretarian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas memberikan dukungan manajemen terkait penugasan, pembinaan dan administrasi terkait perencanaan. Selain dukungan manajemen terkait perencanaan, Sekretariat Ekon juga melaksanakan tugas khusus yaitu koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersifat lintas unit. Dalam mengelola semua hal tersebut diperlukan koordinasi efektif dengan unit kerja agar setiap program ataupun kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.3.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan
Deskripsi IKU	:	Definisi Persentase rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang dimanfaatkan dalam bentuk naskah kedinasan dan/karya tulis ilmiah yang ditindaklanjuti atau dimanfaatkan dalam bentuk disposisi pemanfaatan yaitu meliputi : (1) Penggunaan dalam penyusunan bahan koordinasi internal, lintas sektor, maupun tingkat nasional; (2) Penggunaan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan; dan (3) Penggunaan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan Indikator ini mengukur efektivitas koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang dilaksanakan melalui forum koordinasi, fasilitasi, dan sinergisitas antar Kementerian/Lembaga. Indikator Utama ini menekankan <i>outcome</i>, tingkat penerimaan dan pemanfaatan konkret dari hasil koordinasi yang telah dilaksanakan. Adapun rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang diampu oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025 adalah : 1. Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Kegiatan ini mencerminkan peran dari Kemenko Ekon dalam memastikan kebijakan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara tepat waktu, terintegritas, dan berdampak. Melalui koordinasi ini diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak terjadi duplikasi kebijakan, stagnasi pelaksanaan, atau konflik kepentingan antar Kementerian/Lembaga 2. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja Sebagai amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, Sekretariat Kemenko Ekon berperan dalam mengkoordinasikan kebijakan lintas sektoral yang mendukung penciptaan iklim usaha yang sehat, investasi yang kompetitif dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. 3. Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mencerminkan keadilan dan distribusi yang merata antardaerah, antarwilayah, serta kelompok masyarakat. Formula Rumus Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Ditindaklanjuti : $\% = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Terselesaikan}} \times 100 \%$ Tujuan Untuk mengukur pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sebagai pelaksanaan <i>special mission</i> di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Satuan Pengukuran	:	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Kelompok Substansi Analis Kebijakan
Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Sumber Data	:	Database output Analis Kebijakan
Tingkat Kendali IKU	:	(.....) High (X) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	:	(X) Exact (....) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	:	(.....) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta

(...) Cascading Non Peta

(.....) Non-Cascading

Metode Cascading

(X) Direct

(...) Indirect

Polarisasi IKU

:

(X) Maximize

(.....) Minimize

(.....) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(.....) Bulanan

(.....) Triwulanan

(....) Semesteran

(X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan Standar Nasional
Deskripsi Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan kolaboratif hanya dapat diwujudkan apabila Instansi Pemerintahan mampu mengimplementasikan arahan pembangunan birokrasi nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk dapat menyelenggarakan tata kelola yang mengacu pada Peraturan baik level nasional atau Kementerian. Implementasi tata kelola yang sesuai standar nasional dapat tercermin melalui keselarasan output-output yang dihasilkan Sekretariat dengan arahan Nasional atau instansi pengampu.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.4.1. Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah
Deskripsi IKU	:	Definisi Persentase penyelesaian dokumen penyelenggaraan tata kelola pemerintah merupakan ukuran yang menggambarkan capaian atas penyelesaian dokumen penyelenggaraan tata kelola di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penyelesaian Dokumen Tata kelola merupakan hasil dari proses bisnis sekretariat yang berfokus pada empat bidang utama yakni perencanaan, hukum dan organisasi, umum dan sumber daya manusia dan komunikasi, layanan informasi dan persidangan. Seluruh Dokumen Tata Kelola yang dihasilkan harus mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh instansi pembina. Adapun kriteria yang menunjukkan bahwa dokumen yang dihasilkan telah sesuai dengan standar apabila (1) Format dan Substansi telah sesuai dengan acuan yang digunakan, (2) Dokumen dihasilkan tepat waktu, (3) Dokumen yang mendapatkan sedikit perbaikan dari instansi pembina. Formula Rumus % Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah $\% = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditetapkan}} \times 100\%$ Kriteria penilaian dalam penyampaian laporan dokumen tepat waktu yaitu pelaporan dilaporkan pada waktu H-4 dari batas pengumpulan Tujuan Untuk mengukur kualitas pelaksanaan proses bisnis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Satuan Pengukuran		Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data		Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Pejabat Penanggung Jawab Data		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sumber Data	:	Seluruh Eselon II di Lingkungan Sekretariat
Tingkat Kendali IKU		(.....) High (X) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU		(X) Exact (....) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode		(.....) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU		(...) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (X) Non-Cascading
Metode Cascading		(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	:	(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	25%
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	50%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	75%
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas				
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Layanan prima dalam dukungan manajemen yang berkualitas merupakan kondisi yang diharapkan dapat terwujud sebagai hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan sekretariat yang memiliki tugas fungsi sebagai sekretaris Kementerian. Layanan prima dalam dukungan manajemen yang berkualitas harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar unit kerja bukan hanya bisa mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan tetapi juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan dukungan manajemen yang berkualitas, akan mempermudah unit kerja untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diharapkan.				
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian				
Deskripsi IKU	:	<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td> Layanan Sekretariat adalah layanan yang diberikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian kepada Kedeputian untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sekretariat Kemenko Perekonomian juga menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam : 1. Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perekonomian 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif meliputi ketatausahaan, SDM, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, humas, arsip 4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana 5. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 6. Pengelolaan data dan informasi 7. Pelaksanaan fungsi lainnya Indikator kepuasan layanan Sekretariat mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Sekretariat kepada Kedeputian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Kemenko Perekonomian. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu : 1. Aspek Ketanggapan dalam layanan (<i>Responsiveness</i>); Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan 2. Aspek Keandalan dalam layanan (<i>Reability</i>); Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan 3. Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (<i>Tangible</i>); Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan 4. Aspek Kepastian dalam Layanan (<i>Assurance</i>); Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman 5. Aspek Sikap dalam Layanan (<i>Emphaty</i>) Menunjukan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu : 1. Sangat Tidak Puas 2. Tidak Puas 3. Puas 4. Sangat Puas </td></tr><tr><th>Formula</th></tr><tr><td>Indikator Kinerja Utama Indeks kepuasan layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian diukur melalui Survey Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diluar Sekretariat. Daftar pertanyaan survey terdiri dari beberapa pertanyaan berupa 5 (lima) jenis aspek layanan yang telah diberikan oleh Sekretariat kepada Deputi. Jumlah responden dipilih secara acak/random dan berasal dari unit Kerja di Lingkungan Kemenko Perekonomian, diluar unit Sekretariat</td></tr></table>	Definisi	Layanan Sekretariat adalah layanan yang diberikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian kepada Kedeputian untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sekretariat Kemenko Perekonomian juga menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam : 1. Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perekonomian 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif meliputi ketatausahaan, SDM, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, humas, arsip 4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana 5. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 6. Pengelolaan data dan informasi 7. Pelaksanaan fungsi lainnya Indikator kepuasan layanan Sekretariat mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Sekretariat kepada Kedeputian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Kemenko Perekonomian. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu : 1. Aspek Ketanggapan dalam layanan (<i>Responsiveness</i>); Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan 2. Aspek Keandalan dalam layanan (<i>Reability</i>); Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan 3. Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (<i>Tangible</i>); Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan 4. Aspek Kepastian dalam Layanan (<i>Assurance</i>); Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman 5. Aspek Sikap dalam Layanan (<i>Emphaty</i>) Menunjukan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu : 1. Sangat Tidak Puas 2. Tidak Puas 3. Puas 4. Sangat Puas	Formula	Indikator Kinerja Utama Indeks kepuasan layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian diukur melalui Survey Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diluar Sekretariat. Daftar pertanyaan survey terdiri dari beberapa pertanyaan berupa 5 (lima) jenis aspek layanan yang telah diberikan oleh Sekretariat kepada Deputi. Jumlah responden dipilih secara acak/random dan berasal dari unit Kerja di Lingkungan Kemenko Perekonomian, diluar unit Sekretariat
Definisi						
Layanan Sekretariat adalah layanan yang diberikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian kepada Kedeputian untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sekretariat Kemenko Perekonomian juga menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam : 1. Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perekonomian 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif meliputi ketatausahaan, SDM, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, humas, arsip 4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana 5. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 6. Pengelolaan data dan informasi 7. Pelaksanaan fungsi lainnya Indikator kepuasan layanan Sekretariat mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Sekretariat kepada Kedeputian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Kemenko Perekonomian. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu : 1. Aspek Ketanggapan dalam layanan (<i>Responsiveness</i>); Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan 2. Aspek Keandalan dalam layanan (<i>Reability</i>); Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan 3. Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (<i>Tangible</i>); Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan 4. Aspek Kepastian dalam Layanan (<i>Assurance</i>); Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman 5. Aspek Sikap dalam Layanan (<i>Emphaty</i>) Menunjukan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu : 1. Sangat Tidak Puas 2. Tidak Puas 3. Puas 4. Sangat Puas						
Formula						
Indikator Kinerja Utama Indeks kepuasan layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian diukur melalui Survey Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diluar Sekretariat. Daftar pertanyaan survey terdiri dari beberapa pertanyaan berupa 5 (lima) jenis aspek layanan yang telah diberikan oleh Sekretariat kepada Deputi. Jumlah responden dipilih secara acak/random dan berasal dari unit Kerja di Lingkungan Kemenko Perekonomian, diluar unit Sekretariat						

Rumus Perhitungan : $\frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing – masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$ Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu : A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4 B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50 C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00 D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50	
Tujuan	
Memberikan gambaran tingkat kepuasan terhadap layanan Sekretariat dan dukungan adminstrasi Kegiatan dan Tata Kelola di lingkungan Kemenko Perekonomian	

Satuan Pengukuran	Indeks
Unit/Pihak Penyedia Data	Sekretariat Kemenko Perekonomian
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretaris Kemenko Perekonomian
Sumber Data	LHE Kepuasan Layanan Sekretariat 2024
Tingkat Kendali IKU	(.....) High (X) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (....) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(...) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (X) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan (...) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	3 dari4
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	3 dari 4

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik
Deskripsi Sasaran Strategis		Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang baik merupakan sasaran strategis pada level Sekretariat (Eselon I). Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan probis yang berfokus pada Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian yang efektif di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik. Sasaran strategis ini, untuk bertujuan memastikan bahwa Unit Sekretariat Kementerian telah menerapkan prinsip dari <i>Good Governance</i> yang efektif, transparan dan akuntabel dalam setiap proses kerja.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.6.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Deskripsi IKU	:	Definisi Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan persentasi pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Eselon I ini merupakan agregat dari nilai persentase pelaksanaan RB di level Eselon II, didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum dan Organisasi, dan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, dan Unit Inspektorat. Formula Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dihitung berdasarkan jumlah agregat dari persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan RB Tematik di level kebiroan dibandingkan dengan jumlah unit Biro yang melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian : Rumusnya : $\% \text{ RB Sekre} = \frac{\% \text{ Pelaksanaan RB Biro Hukor} + \% \text{ Pelaksanaan RB Biro Umum dan SDM} + \% \text{ Pelaksanaan RB Biro KLIP} + \%}{5}$ Tujuan Indikator ini bertujuan untuk mengukur komitmen Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Unit Kerja
Satuan Pengukuran		Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data		Sekretariat Kementerian
Pejabat Penanggung Jawab Data		Sekretaris Kementerian
Sumber Data	:	Seluruh Eselon II Sekretariat
Tingkat Kendali IKU		(.....) High (X) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU		(X) Exact (....) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode		(.....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU		(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading		(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	:	(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(.....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	85%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	20%
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	40%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	60%
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	85%